



e ISSN 2614-8935

p ISSN 2615-3815

INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 16 No. 2, Oktober 2019

Potensi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Unggulan Dalam Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai

(Rita Herawaty Br Bangun)

Sektor Basis di Kabupaten Blitar, Jawa Timur: Analisis PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2010-2016

(Kristian Budi T.)

Studi Diagnostik Tingkat Penerapan Kultur Teknis Kelapa Sawit Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Sawit Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas Utara

(Zulfi Prima Sani Nasution, Ratnawati Nurkhoiry, Suroso Rahutomo)

Studi Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek-Proyek Infrastruktur di Kota Binjai

(Suri Kencana, Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Syahrizal)

Analisis Hubungan Antara Tingkat Keterpaparan Media dengan Tingkat Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Sumatera Utara

(Windo Harjoin Sidabutar, Muhammad Ancha Sitorus, Widia Gustiasari)

Pengetahuan, Persepsi dan Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Gajah di Kawasan Aek Nauli, Danau Toba

(Wanda Kuswanda)

Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara

(Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sulistya Ekawati)

Diterbitkan oleh :

**Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara**

Inovasi	Vol. 16	No. 2	Hal. 75 - 162	Medan Oktober 2019	e ISSN 2614-8935 p ISSN 2615-3815
---------	---------	-------	------------------	-----------------------	--------------------------------------

Terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah
Terakreditasi Peringkat 2 dengan
Nomor Akreditasi : 30/E/KPT/2018



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 16, Nomor 2

Oktober 2019

e-ISSN 2614-8935

Jurnal INOVASI adalah jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan yang Terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 30/E/KPT/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Jurnal INOVASI sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik yang terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

**Pengarah
Penanggung Jawab**

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

**Ketua
Anggota**

Prof. Dr. Marlon Sihombing MA (*Kebijakan Publik*, Universitas Sumatera Utara)
Zahari Zein, M.Sc., Ph.D (*Lingkungan*, Universitas Sumatera Utara)
Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc (*Pertanian*, Universitas Sumatera Utara)
H. Makrum Rambe, SE., MM
Erwinsyah, SH., MH
Hendra Dermawan Siregar, STP., M.SP
Drs. H. Darwin Lubis, MM

Sekretariat Redaksi

Dra. Hj. Chandra Leka, MAP
Yanita, SE
Erwina Saragih, SP
Dewi Nurita
Elidawati
Ali Sahdi Harahap, S.Pd

**Editorial Board
Editor In Chief
Section Editor**

Nobrya Husni, ST
Anton Parlindungan Sinaga, ST
Deni Syahputra, ST
Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST
Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST
Silvia Darina, SP
Wahyu Nugroho
Deliyanto, S.Kom

**Layouter
Jurnal Manager**

Mitra Bestari Volume 16, Nomor 2, Oktober 2019

Edy Yasa Ardiansyah, ST.,MT (*Teknik*, Institut Teknologi Medan)
Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc (*Pertanian*, Universitas Sumatera Utara)
Fotarisman Zaluchu, M.Si., MPH., PhD (*Kesehatan*, Bappeda Kabupaten Nias)
Dr. Iskandar Muda, SE., M.Si., Ak (*Ekonomi*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Said Muzambiq, ST., M.Si (*Lingkungan*, Institut Teknologi Medan)
Zahari Zein, M.Sc., Ph.D (*Lingkungan*, Universitas Sumatera Utara)

Alamat Penerbit :

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126
Tel. (061) 7866225; 7883016 - Fax. (061) 7866248
Website: <http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>
Email: inovasiibpp@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

HORAS.....

Pembaca yang terhormat,

Jurnal INOVASI kembali terbit dengan tulisan ilmiah yang akan memperkaya khasanah keilmuan para pembaca. Sebagai jurnal ilmiah terakreditasi Kemenristekdikti pada level SINTA 2 menjadi tantangan bagi redaksi Jurnal INOVASI dan penulis untuk menerbitkan tulisan ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Artikel bertema pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi pembuka dalam Jurnal INOVASI edisi Oktober 2019. Tulisan tentang implementasi kultur teknis kelapa sawit turut hadir dalam edisi kali ini, dilanjutkan dengan artikel terkait infrastruktur dan kesehatan. Edisi terakhir di tahun 2019 ini ditutup dengan artikel bertema kehutanan terkait ekowisata gajah dan perhutanan sosial.

Selamat menyambut tahun 2020, semoga kerja keras dan kerja cerdas kita di tahun 2019 dapat berlanjut di tahun depan. Terima kasih dan selamat membaca.

-Dewan Redaksi-



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 16, Nomor 2

Oktober 2019

e-ISSN 2614-8935

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/dicopy tanpa ijin dan biaya.

DDC 338.1

Rita Herawaty Br Bangun

Potensi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Unggulan Dalam Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Oktober 2019, Vol 16, No. 2, halaman 75 - 84

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengidentifikasi subsektor unggulan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Variabel yang digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis location quotient (LQ) dan analisis shift share. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa subsektor unggulan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Berdasarkan hasil analisis shift share Kabupaten Serdang Bedagai memiliki spesialisasi pada subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan tahunan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Subsektor yang memiliki daya saing yang tinggi dan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai adalah subsektor tanaman hortikultura semusim, subsektor kehutanan dan penebangan kayu, dan subsektor perikanan karena memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan subsektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memberikan prioritas utama terhadap pengembangan subsektor unggulan yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai tanpa mengabaikan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan lainnya. Meningkatkan daya saing subsektor unggulan melalui penerapan kebijakan daerah yang mendorong terciptanya investasi dari pihak swasta yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jalinan kejasama dengan pihak swasta khususnya dalam hal pemodal dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian.

Kata kunci: potensi unggulan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, location quotient, shift share

DDC 339

Kristian Budi T

Sektor Basis di Kabupaten Blitar, Jawa Timur: Analisis PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2010-2016

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2019, Vol 16, No. 2, halaman 85 - 94

Penelitian ini bertujuan mengetahui sektor basis, mengetahui lapangan usaha yang memiliki daya saing, dan mengetahui struktur perekonomian di Kabupaten Blitar periode 2010-

2016. Teknik analisa yang digunakan adalah Analisa Location Quotient (LQ), Analisa Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Analisa Shift-Share. Hasil penelitian ini adalah sektor basis di Kabupaten Blitar meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lapangan usaha yang memiliki daya saing adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi. Struktur perekonomian Kabupaten Blitar dalam rentang waktu 2010-2016 ditopang oleh empat lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan konstruksi.

Kata kunci: sektor basis, daya saing, LQ, DLQ, shift-share

DDC 633

Zulfi Prima Sani Nasution, Ratnawati Nurkhoiry, Suroso Rahutomo

Studi Diagnostik Tingkat Penerapan Kultur Teknis Kelapa Sawit Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Sawit Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas Utara

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2019, Vol 16, No. 2, halaman 95 - 103

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi praktik budidaya kelapa sawit yang dilakukan saat ini dan pengembangan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara. Studi ini dilakukan melalui survei dan wawancara mendalam yang melibatkan 40 petani swadaya yang tersebar di kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan, dan Halongonan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang benih kelapa sawit unggul dan praktik standar budidaya kelapa sawit telah menyebabkan hasil panen aktual hanya setengah dari potensi hasil kesesuaian lahan S3, terutama untuk pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, dan Halongonan Timur. Selain itu, proses penjualan tandan buah segar (TBS) yang tidak dikelola melalui organisasi pekebun (kelompok atau koperasi) menyebabkan rantai pemasaran TBS yang panjang, sehingga mengurangi pendapatan pekebun swadaya. Terbatasnya akses keuangan dari bank membebani pekebun swadaya dalam menerapkan praktik standar budidaya kelapa sawit, terutama pemupukan. Memperkuat peran pemerintah daerah, bank dan perusahaan perkebunan sangat diharapkan untuk mengubah pola pikir pekebun mengenai pentingnya menggunakan benih kelapa sawit unggul, mengadopsi praktik-praktik terbaik budidaya kelapa sawit, membuka akses keuangan, dan memperkuat kelembagaan pekebun sehingga kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pekebun swadaya di Kabupaten Lawas Padang Utara dapat segera direalisasikan.

Kata kunci: pekebun swadaya, produktivitas, kelapa sawit, Padang Lawas Utara

DDC 620.006

Suri Kencana, Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Syahrizal

Studi Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek-Proyek Infrastruktur di Kota Binjai

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2019, Vol 16, No. 2, halaman 105 - 114

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mendapatkan pengetahuan terkait dengan penyebab keterlambatan yang sering terjadi pada pelaksanaan proyek-proyek konstruksi, menganalisis penyebab yang paling dominan, serta memberikan masukan/saran pencegahan keterlambatan di masa depan. Metode sampel acak strata proporsional menjadi teknik pengambilan sampel karena populasi yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner dengan penyebab keterlambatan proyek terangkum dalam 7 kategori dengan 35 variabel. Terdapat 15 proyek konstruksi yang menjadi objek penelitian dengan 32 responden di mana dari pihak pemilik proyek (owner) sebanyak 15 responden, pihak pelaksana proyek (kontraktor) sebanyak 12 responden dan konsultan supervisi sebanyak 5 responden. Harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat menjadi hal terpenting/dominan yang perlu diperhatikan dengan persentase sebesar 42%.

Kata kunci: penyebab keterlambatan, proyek konstruksi, Indeks Kepentingan

DDC 613

Windo Harjoin Sidabutar, Muhammad Ancha Sitorus, Widia Gustiasari

Analisis Hubungan Antara Tingkat Keterpaparan Media dengan Tingkat Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Sumatera Utara

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2019, Vol 16, No. 2, halaman 115 - 127

Analisis ini dilakukan bertujuan untuk menemukan bagaimana hubungan keterpaparan media dengan pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Sumatera Utara. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data hasil Survei RPJMN yang dilaksanakan pada Tahun 2017. Adapun sampel dalam survei ini adalah laki-laki dan perempuan berusia 15-24 tahun dan belum menikah yang ditemukan pada keluarga yang terpilih. Berdasarkan hasil analisa silang dapat dilihat dari 131 responden yang terpapar berat mengenai informasi KRR, 60 orang (45,8%) di antaranya memiliki tingkat pengetahuan KRR yang baik dan 71 orang (54,2%) memiliki tingkat pengetahuan KRR yang rendah. Sementara dari 989 orang responden yang terpapar lebih sedikit informasi KRR, 204 orang (20,6%) diantaranya memiliki tingkat pengetahuan KRR baik dan 785 orang (79,4%) diantaranya memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Hasil chi-square test, menunjukkan angka keterhubungan sebesar 0,000 dimana angka ini lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tingkat keterpaparan informasi KRR memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengetahuan KRR remaja di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: kesehatan reproduksi remaja, media informasi, pengetahuan, Sumatera Utara

DDC 639.9

Wanda Kuswanda

Pengetahuan, Persepsi dan Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Gajah di Kawasan Aek Nauli, Danau Toba

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2019, Vol 16, No. 2, halaman 129 - 137

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan, persepsi pengunjung dan rekomendasi kebijakan untuk mengembangkan wisata ilmiah gajah di ANECC, KHDTK Aek Nauli, dalam mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan di area ANECC selama enam bulan, mulai dari bulan Mei sampai Oktober 2018. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan wawancara. Responden merupakan pengunjung ANECC yang dipilih menggunakan metode purposive random sampling sebanyak 285 pengunjung. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pengunjung tentang keberadaan ekowisata gajah berasal dari temannya dan media sosial. Mereka berkunjung ke ANECC karena keingintahuan dan tertarik dengan adanya gajah. Persepsi 85% responden adalah positif terhadap wisata ilmiah gajah karena adanya pelayanan yang baik, penyajian atraksi gajah dan fasilitas yang cukup memadai serta masih gratis. Acuan kebijakan yang direkomendasikan untuk pengembangan ANECC adalah: mengimplementasikan animal welfare dan one health bagi gajah; memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pengelola; mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha (travel dan hotel); penyusunan paket ekowisata yang terintegrasi dengan Danau Toba; dan, meningkatkan promosi melalui internet marketing dan jejaring sosial dan menjalin kerjasama dengan masyarakat lokal.

Kata kunci: gajah, ekowisata, persepsi, Aek Nauli, Danau Toba

DDC 333.75

Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sulistya Ekawati

Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2019, Vol 16, No. 2, halaman 139 - 162

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kelembagaan implementasi program PS di Provinsi Sumut; dan, 2) memberi masukan penguatan kelembagaan implementasi program PS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi program PS di Provinsi Sumut belum terlaksana dengan baik dan berkategori rendah. Analisis kelembagaan program PS menunjukkan hasil: a) masih lemahnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; b) program PS dengan skema perizinan tidak mengubah tipologi karakteristik sumberdaya hutan (SDH) dari common pool goods menjadi private goods; dan, c) banyaknya aktor yang terlibat serta adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan para aktor menjadikan perilaku aktor belum sepenuhnya mendukung program PS. Rekomendasi penguatan kinerja kelembagaan implementasi program PS, yaitu: a) pada tingkat nasional diterbitkan Inpres atau Kepres dan pada tingkat Provinsi Sumut diterbitkan peraturan gubernur tentang fasilitasi implementasi PS; b) melakukan peningkatan kualitas pendamping dan pelaksana program PS dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan izin skema PS; c) menyusun rencana aksi bersama dalam pelaksanaan program PS dan adanya pengintegrasian dalam program kerja para pihak; d) meningkatkan motivasi pelaksana PS maka diadakan Inovasi Perhutanan Sosial Award; dan, e) mengembangkan usaha PS sebagai industri atau jasa berbasis SDH dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Kata kunci: implementasi program PS, analisis kelembagaan; perhutanan sosial; Sumatera Utara



The discriptors given are keywords. The abstrack sheet may by reproduced/ copied without permission or charge

DDC 338.1

Rita Herawaty Br Bangun

Potential of Leading Sub Sectors of Agriculture, Forestry and Fishing in Region Development of Serdang Bedagai District

Inovasi, Journal of Politics and Policy, October 2019, Vol 16, No. 2, p. 75 - 84

The purpose of this study is to analyze and identify the leading subsectors in the agriculture, forestry and fisheries sectors. The variables used in this study are a gross regional domestic product (GRDP) in the agriculture, forestry and fisheries sectors of Serdang Bedagai Regency and North Sumatra Province. The analytical methods used are location quotient analysis (LQ) and shift-share analysis. The results of the LQ analysis show that the leading subsectors in the agriculture, forestry, and fisheries sectors are the food crop subsector, the livestock subsector, and the fisheries subsector. Based on the results of the shift-share analysis, Serdang Bedagai Regency specializes in the food crop subsector, the annual plantation subsector, the livestock subsector, and the fisheries subsector. Subsectors that have high competitiveness and the potential to increase economic growth in Serdang Bedagai Regency are annual horticultural crops subsector, forestry subsector and logging, and fisheries subsector because they have competitive advantages compared to other subsectors. Determination of agricultural development priorities based on the economic potential of Serdang Bedagai Regency through the development of superior subsectors and increasing added value of agricultural products through capital assistance policies and the provision of supporting facilities and infrastructure. Policy support from Serdang Bedagai District Government by creating regional policies that stimulate new investments such as spatial and regional mapping and licensing facilities. The government of Serdang Bedagai gives main priority to development of leading food crop subsector, livestock subsector, and fisheries subsector which have competitive advantages as a booster economic growth of Serdang Bedagai without to ignore others of agriculture, forestry, and fisheries subsectors. To increase competitiveness advantages subsector through application of regional policy to increase private investation to create economic growth and cooperation linker with private investment especially capital and technology to increase production and economic value of agriculture product.

Keywords: leading potential, agriculture, forestry and fishing sector, location quetion, shift share

DDC 339

Kristian Budi T.

Sector Base in Blitar Region, East Java: Analysis of Gross Domestic Product Blitar Region 2010-2016

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2019, Vol 16, No. 2, p. 85 - 94

This study aims to find out the base sector, to know the business fields that have competitiveness, and to know the structure of the economy in Blitar Regency 2010-2016 period. The analysis technique used is Location Quotient Analysis (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) Analysis, and Shift-Share Analysis. The results of this study are the base sectors in Blitar Regency covering agriculture, forestry and fisheries; information and communication; real estate; government administration, defense and compulsory social security; education services; and health services and social activities. Business fields that have competitiveness are: agriculture, forestry and fisheries; mining and excavation; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; and financial and insurance services. The economic structure of Blitar Regency in the period 2010-2016 is supported by four business fields, there are: agriculture, forestry and fisheries; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; processing industry; and construction.

Keywords: base sector, competitiveness, LQ, DLQ, shift-share

DDC 633

Zulfi Prima Sani Nasution, Ratnawati Nurkhoiry, Suroso Rahutomo

Diagnostic Study on Oil Palm Cultivation Practices Level to Improve the Welfare of Palm Oil Independent Smallholders: A Case Study in North Padang Lawas Disrict, North Sumatra

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2019, Vol 16, No. 2, p. 95 - 103

This study aims to determine the current conditions of oil palm cultivation practices and develop policy recommendations to increase oil palm yield in North Padang Lawas District. The study was carried out through surveys and in-depth interviews involving 40 independent smallholders spread across the sub-district of Padang Bolak, Portibi, Halongonan, and Halongonan Timur. The results showed that lack of knowledge about oil palm certified seeds and standard practices of oil palm cultivation had caused the actual yield was only half of the potential yield of land suitability S3, especially for independent smallholders in the sub-district of Padang Bolak, Portibi, and Halongonan Timur. In addition, the process of selling fresh fruit bunches (FFB) that were not managed through farmer organizations (groups or cooperatives) caused a long chain of FFB marketing, thereby reducing the smallholder's income. Limited access to finance from banks burdened smallholders in implementing standard practices of oil palm cultivation, especially fertilization. Strengthening the role of local governments, banks and plantation companies are expected to change the mindset of smallholders regarding the importance of using legitimate oil palm seeds, adopting the best practices of oil palm cultivation, opening access to finance, and strengthening smallholders institutions so that the welfare and sustainability of independent smallholders in North Padang Lawas District can be realized soon.

Keywords: independent smallholders, yield, oil palm, North Padang Lawas

DDC 620.006

Suri Kencana, Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Syahrizal

A Study on The Causes of Delay in The Completion of Infrastructure Project in Binjai

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2019, Vol 16, No. 2, p. 105 - 114

The objective of the research is to study and find out the causes of lateness which usually occurs in implementing construction projects, to analyze the most dominant cause, to give input/suggestions of how to prevent the lateness in the future. Since the population was not homogenous, the samples were taken by using proportional stratum random sampling technique. The data were gathered by using questionnaires on the causes of lateness in 7 categories and 35 variables. There were 15 construction projects with 32 respondents with 15 respondents as the project owners, 12 respondents as the constructors, and 5 respondents as the supervisors/consultants. The price of construction materials which are rapidly increasing with the percentage of 42% should be heeded.

Keyword: causes of lateness, construction projects, Interest Index

DDC 613

Windo Harjoin Sidabutar, Muhammad Ancha Sitorus, Widia Gustiasari

Analysis of Relationship Between Media Exposure Levels with Knowledge Level of Teenager Sexual Reproductive Health in Sumatera Utara Province

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2019, Vol 16, No. 2, p. 115 - 127

This analysis was carried out aimed at finding out how the relationship between media exposure level and knowledge level of Teenager Sexual Reproductive Health in North Sumatera Province. The analysis was carried out by utilizing data from the RPJMN Survey conducted in 2017. The samples in this survey were men and women aged 15-24 years and unmarried found in selected families. In particular the data used in this analysis are data on media exposure and data on teenager sexual reproductive health knowledge in North Sumatera. There were 1120 teenagers complete all teenager questionnaires and the sum of the scores of each respondent were categorized into two categories and cross-examination was carried out by displaying the results of the Chi Square Test. Based on the results of cross-analysis can be seen from 131 respondents who were heavily exposed to KRR information, 60 people (45.8%) of whom had a good level of knowledge of KRR and 71 people (54,2%) had a low level of knowledge of KRR. While of the 989 respondents who were exposed to less information on KRR, 204 people (20.6%) of them had a good level of knowledge of KRR and 785 people (79.4%) of whom had a lack of knowledge. The results of the chi-square test show that the connection number is 0,000 where this number is less than 0.05, so it is concluded that the level of media exposure to the KRR information has a significant relationship with the level of KRR knowledge in Sumatera Utara Province.

Keywords: teenager sexual reproductive health, media information, knowledge, Sumatera Utara

DDC 639.9

Wanda Kuswanda

Knowledge, Perception and Policy of Elephant Ecotourism Management in The Aek Nauli Region, Toba Lake

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2019, Vol 16, No. 2, p. 129 - 137

This study aims to obtain information about knowledge and visitor perceptions as well as policy recommendations to develop elephant scientific tourism for supporting the tourist visits to Lake Toba in ANECC, SPFR of Aek Nauli, North Sumatra. This research was conducted in the ANECC area for six months, starting from May to October 2018. Data collection were used by questionnaires and interviews. Respondents are ANECC visitors who were selected by using the purposive random sampling method. Data analysis is carried out quantitatively whit frequency tables. The results showed that visitors knowledge about the existence of elephant ecotourism came from friends and social media. They visited ANECC for curiosity and interest in the presence of elephants. Perception of 85% respondents is positive for elephant scientific tourism because of good service, elephant attractions presentation and adequate facilities and free. The policy references are recommended for the ANECC development as follows: implement to animal welfare and health for elephants; reinforce coordination and communication between managers; develop cooperation with business society (travel and hotels); to make ecotourism packages that integrated with Lake Toba; and, improve promotion through internet marketing and social networking and collaborating with local communities.

Keywords: elephant, ecotourism, perception, Aek Nauli, Toba Lake

DDC 333.75

Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sulistya Ekawati

Institutional Analysis of Social Forestry Implementation in North Sumatera Province

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2019, Vol 16, No. 2, p. 139 - 162

This study aims to: 1) analyze the institutional implementation of SF programs in North Sumatera Province; and, 2) provide advice on institutional strengthening of SF program implementation. The results showed that the performance of SF program implementation in North Sumatera Province has not been realized properly and low categorized. Institutional analysis of the SF program shown: a) The central and local governments still low to provide policy support; b) The SF program with a licensing scheme does not change typology of characteristics of forest resources from common pool goods to private goods; and, c) The many actors involved and the different interests and power of the actors make the behavior of the actors not yet fully support the SF program. To strengthen institutional performance of the SF programs implementation is recommended: a) At the national level, regulate a presidential instruction or a presidential decree and at the provincial level, regulate a governor's regulation concerning the facilitation of SF implementation; b) Improving quality of counterparts and SF program practitioners in the management and business of SF; c) The expert group developed an action plan for enhancing SF scheme implementation; d) To increase the motivation of SF actors, the government organized a SF Innovation Award; and, e) Development of SF business as an forest-based industry or service by utilizing information technology.

Keyword: implementation of the SF program; institutional analysis; social forestry; North Sumatra



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 16, Nomor 2

OKTOBER 2019

e-ISSN 2614-8935

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
✂ Potensi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Unggulan Dalam Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai <i>(Rita Herawaty Br Bangun)</i>	75 - 84
✂ Sektor Basis di Kabupaten Blitar, Jawa Timur: Analisis PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2010-2016 <i>(Kristian Budi T.)</i>	85 - 94
✂ Studi Diagnostik Tingkat Penerapan Kultur Teknis Kelapa Sawit Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Sawit Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas Utara <i>(Zulfi Prima Sani Nasution, Ratnawati Nurkhoiry, Suroso Rahutomo)</i>	95 - 103
✂ Studi Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek-Proyek Infrastruktur di Kota Binjai <i>(Suri Kencana, Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Syahrizal)</i>	105 - 114
✂ Analisis Hubungan Antara Tingkat Keterpaparan Media dengan Tingkat Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Sumatera Utara <i>(Windo Harjoin Sidabutar, Muhammad Ancha Sitorus, Widia Gustiasari)</i>	115 - 127
✂ Pengetahuan, Persepsi dan Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Gajah di Kawasan Aek Nauli, Danau Toba <i>(Wanda Kuswanda)</i>	129 - 137
✂ Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara <i>(Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sulistya Ekawati)</i>	139 - 162

Hasil Penelitian

POTENSI SUBSEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN UNGGULAN DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

(POTENTIAL OF LEADING AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING SUB SECTORS IN REGION DEVELOPMENT OF SERDANG BEDAGAI DISTRICT)

Rita Herawaty Br Bangun

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jl. Asrama No. 179 Medan
email: rita.bangun@bps.go.id

Diterima: 15 Februari 2019; Direvisi: 24 Maret 2019; Disetujui: 16 Mei 2019

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan proses yang berkesinambungan dan bertahap dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah perlu dilakukan untuk kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengidentifikasi subsektor unggulan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Variabel yang digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *location quotient* (LQ) dan analisis *shift share*. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa subsektor unggulan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Berdasarkan hasil analisis *shift share* Kabupaten Serdang Bedagai memiliki spesialisasi pada subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan tahunan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Subsektor yang memiliki daya saing yang tinggi dan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai adalah subsektor tanaman hortikultura semusim, subsektor kehutanan dan penebangan kayu, dan subsektor perikanan karena memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan subsektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memberikan prioritas utama terhadap pengembangan subsektor unggulan yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai tanpa mengabaikan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan lainnya. Meningkatkan daya saing subsektor unggulan melalui penerapan kebijakan daerah yang mendorong terciptanya investasi dari pihak swasta yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jalinan kejasama dengan pihak swasta khususnya dalam hal pemodal dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian.

Kata kunci: potensi unggulan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, *location quotient*, *shift share*

ABSTRACT

Regional development is a continuous and gradual process by utilizing the resources and potential of each region to achieve community welfare goals. Identification of potential regional economic activities needs to be carried out for development policies based on efforts to increase economic growth. The purpose of this study is to analyze and identify the leading subsectors in the agriculture, forestry and fisheries sectors. The variables used in this study are a gross regional domestic product (GRDP) in the agriculture, forestry and fisheries sectors of Serdang Bedagai Regency and North Sumatra Province. The analytical methods used are location quotient analysis (LQ) and shift-share analysis. The results of the LQ analysis show that the leading subsectors in the agriculture, forestry, and fisheries sectors are the food crop subsector, the livestock subsector,

and the fisheries subsector. Based on the results of the shift-share analysis, Serdang Bedagai Regency specializes in the food crop subsector, the annual plantation subsector, the livestock subsector, and the fisheries subsector. Subsectors that have high competitiveness and the potential to increase economic growth in Serdang Bedagai Regency are annual horticultural crops subsector, forestry subsector and logging, and fisheries subsector because they have competitive advantages compared to other subsectors. Determination of agricultural development priorities based on the economic potential of Serdang Bedagai Regency through the development of superior subsectors and increasing added value of agricultural products through capital assistance policies and the provision of supporting facilities and infrastructure. Policy support from Serdang Bedagai District Government by creating regional policies that stimulate new investments such as spatial and regional mapping and licensing facilities. The government of Serdang Bedagai gives main priority to development of leading food crop subsector, livestock subsector, and fisheries subsector which have competitive advantages as a booster economic growth of Serdang Bedagai without to ignore others of agriculture, forestry, and fisheries subsectors. To increase competitiveness advantages subsector through application of regional policy to increase private investment to create economic growth and cooperation linker with private investment especially capital and technology to increase production and economic value of agriculture product.

Keywords: *leading potential, agriculture, forestry and fishing sector, location quotient, shift share*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses yang berkesinambungan dan bertahap dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian penting dari pelaksanaan pembangunan daerah. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor industri yang dinobatkan sebagai sektor unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Perlahan mulai disadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang ekonomi secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2003).

Sektor pertanian berperan sebagai penyokong bahan baku sektor industri. Jika mampu dikembangkan lebih lanjut produksi sektor pertanian dapat mencapai jumlah maksimal, juga dapat menghasilkan barang konsumsi lain yang bernilai lebih dibanding hanya sebagai penunjang sektor lainnya (Oktavia et al., 2015). Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi petunjuk kinerja

perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah, tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran/perubahan struktur ekonomi. Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor, perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian (Novita & Gultom, 2017).

Identifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah perlu untuk memperhatikan dua faktor utama yaitu sektor ekonomi yang unggul atau yang mempunyai daya saing dalam periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa mendatang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan dimasa mendatang walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. Dengan teridentifikasinya potensi kegiatan ekonomi daerah maka dapat disusun kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rizani, 2017).

Analisis secara keseluruhan akan mengetahui sektor basis perekonomian masa lalu dan kemudian dapat dipergunakan sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan pembangunan secara makro yang lebih baik di masa yang akan datang (Oktavia et al., 2015). Penelitian tentang pengembangan ekonomi berbasis sektor telah banyak dilakukan antar lain penelitian tentang prioritas pembangunan berdasarkan sektor produk

domestik regional bruto Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara (Bangun, 2018), penelitian tentang penentuan prioritas pembangunan melalui analisis sektor-sektor potensial di Kabupaten Gianyar yang menyimpulkan bahwa penentuan sektor potensial perlu dilakukan sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah (Riantika & Utama, 2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2018) tentang analisis potensi sektor ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.

Penelitian tentang potensi unggulan dan daya saing subsektor pertanian di Kabupaten Minahasa juga dilakukan oleh Pantow & Palar (2015) dan penelitian tentang pengembangan komoditas unggulan pertanian dengan konsep agribisnis di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh Azwartika & Sardjito (2013).

Beberapa pendekatan dan alat analisis untuk mengidentifikasi sektor unggulan dapat dilakukan dengan analisis *location quotient* dan *shift share*. Analisis *location quotient* digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan mengukur konsentrasi relative atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Hendayana (2003) menggunakan aplikasi metode *location quotient* dalam penelitiannya untuk menentukan komoditas unggulan pertanian nasional.

Syafruddin, dkk (2018) juga menggunakan metode *location quotient* untuk menentukan komoditas unggulan dan struktur komoditas hortikultura di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Shift share* digunakan untuk menganalisis dampak pertumbuhan regional, khususnya pertumbuhan lapangan kerja, menggambarkan tren pertumbuhan historis, memperkirakan pertumbuhan regional dan menganalisis efek dari insiatif kebijakan serta mengembangkan perencanaan strategis untuk komunitas. Abidin (2015) dan Rizani (2017) menggunakan analisis *shift share* dalam penelitiannya yang menganalisis transformasi dan potensi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah agraris yang menjadi lumbung pangan di Provinsi Sumatera Utara. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa pertanian dan kehutanan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian dan penyerap tenaga kerja yang besar dalam pembangunan daerah serta penyediaan bahan pangan bagi konsumsi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih mendominasinya sektor ini dalam struktur perekonomian Kabupaten Serdang

Bedagai. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih sebagai *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Serdang Bedagai selama lima tahun terakhir, peranan sektor ini terus menurun dan struktur perekonomian semakin bergeser dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke sektor ekonomi lainnya (BPS, 2017).

Kondisi ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain terjadinya konversi lahan pertanian, rendahnya nilai tambah produk pertanian dan produktivitas sub sektor pertanian yang masih rendah (BPS, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian untuk menganalisis dan mengidentifikasi sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan unggulan. Menetapkan subsektor unggulan dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Serdang Bedagai.

Pembangunan daerah yang berorientasi pada sektor unggulan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penentuan sub sektor unggulan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai prioritas pengembangan untuk meningkatkan peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada struktur perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi sub sektor unggulan dan klasifikasi pertumbuhan subsektor dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar dalam perencanaan dalam pembangunan pertanian untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai.

METODE

Sumber data sekunder berasal dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kabupaten Serdang Bedagai. Variabel yang digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai periode tahun 2015-2017. Metode analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Secara umum digunakan beberapa metode analisis data, yaitu:

a. Analisis *location quotient*

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Alat analisis ini juga dipakai untuk mengukur

konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Perhitungan basis tersebut menggunakan variabel PDRB wilayah atas suatu kegiatan dalam struktur wilayah.

Secara matematis formula LQ yang digunakan dalam penelitian Lee & Gordon (2005) dan Leeuwen & Földvári (2016) adalah sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{Y_{ij} / Y_j}{Y_i / Y} \quad (1)$$

Keterangan:

- LQ_i : Indeks Location Quotient
- Y_{ij} : Nilai tambah sektor i di Kabupaten Serdang Bedagai
- Y_j : PDRB Serdang Bedagai
- Y_i : Nilai tambah sektor i di Provinsi Sumatera Utara
- Y : PDRB Provinsi Sumatera Utara

Persamaan diatas akan menghasilkan 3 (tiga) kategori hasil perhitungan LQ dalam perekonomian daerah yaitu (Bangun, 2018):

- Jika nilai LQ > 1 artinya sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Artinya sektor tersebut dalam perekonomian daerah di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis.
- Jika nilai LQ = 1 artinya sektor yang bersangkutan baik di wilayah studi maupun di wilayah referensi memiliki peningkatan.
- Jika nilai LQ < 1 artinya sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis.

b. Analisis shift share

Analisis *shift share* digunakan untuk melihat potensi ekonomi suatu wilayah. Metode *shift share* bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kinerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar (baik regional maupun nasional). Abidin (2015), Puspitawati (2013) dan Ratnasari (2014) menggunakan *shift share* untuk menganalisis sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Metode *shift share* memiliki analisis yang lebih tajam bila dibandingkan dengan analisis *location quotient* (LQ) karena memberikan penjelasan secara terperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel.

Pendekatan klasik dalam analisis *shift share* yang paling umum digunakan. Disamping mudah dan sederhana, pendekatan ini cukup memberikan hasil yang cukup valid untuk analisis perkembangan ekonomi suatu wilayah yang kecil. Pendekatan ini menjadikan pertumbuhan sebagai perubahan suatu variabel di suatu wilayah kota/kabupaten (misalnya: PDRB, nilai tambah, pendapatan atau output) selama kurun waktu tertentu.

Sedangkan pengaruh-pengaruh yang terjadi antara lain pertumbuhan nasional, pertumbuhan proporsional dan keunggulan kompetitif. Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*), pengaruh pertumbuhan proporsional disebut *proportional shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan *differential shift* atau *regional share* (Abidin, 2015; Ratnasari, 2014).

Bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya seperti yang digunakan dalam penelitian Knudsen (2000) adalah:

$$\Delta E_{r,t} = E_{r,t} - E_{r,i,t-n} \quad (2)$$

Artinya pertambahan lapangan usaha dalam skala regional sektor i adalah jumlah lapangan usaha sektor i pada tahun akhir (t) dikurangkan dengan lapangan usaha sektor i pada tahun awal (t-n). Pertambahan lapangan kerja regional sektor i ini dapat diperinci atas pengaruh dari *national share*, *proportional shift*, dan *differential shift*.

$$\Delta E_{r,t} = (Ni + Pi + Di) \quad (3)$$

$$Ni = E_{r,t} - n(EN,t/EN,t-n) - E_{r,i,t-n} \quad (4)$$

$$Pi = \{(EN,t/EN,i,t-n) - (EN,t/EN,t-n)\} \times E_{r,i,t-n} \quad (5)$$

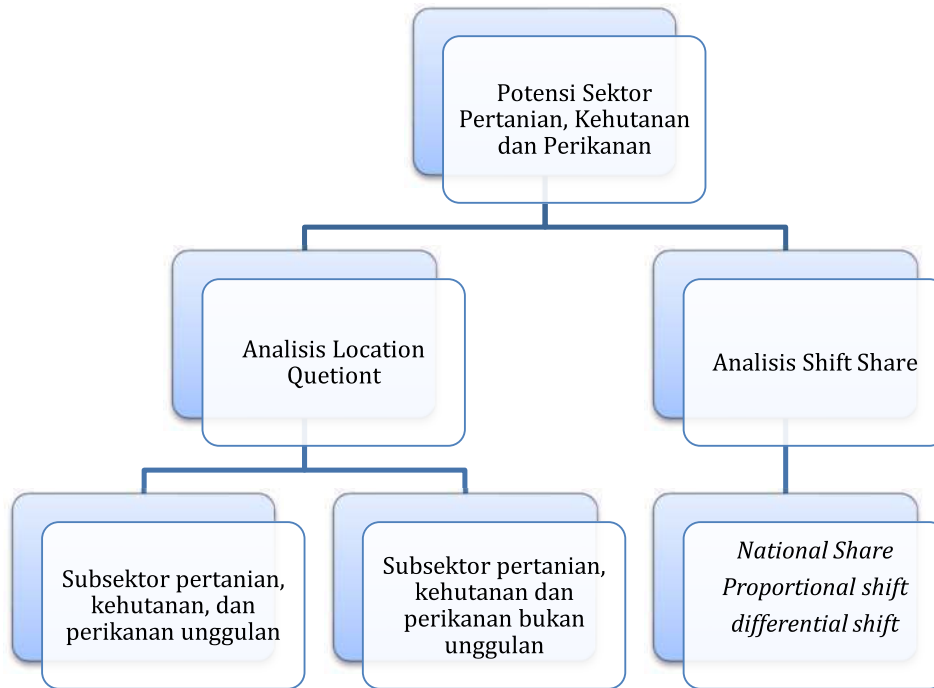
$$Di,t = \{E_{i,r,t} - (EN,i,t/EN,i,t-n)E_{r,i,t-n}\} \quad (6)$$

Keterangan :

- Δ : Perubahan, tahun akhir (tahun t) dikurangi dengan tahun awal (tahun t-n)
- N : Provinsi Sumatera Utara
- r : Serdang Bedagai
- E : Total PDRB (juta rupiah)
- i : Subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan
- t : Tahun
- t-n : Tahun awal
- Ni : *National share*
- Pi : *Proportional shift*
- Di : *Differential shift*

Pengukuran dari analisis *shift share*:

- a. Jika N_i bernilai positif, maka pertumbuhan subsektor i di Kabupaten Serdang Bedagai lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Sumatera Utara. Apabila N_i bernilai negatif, menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i di Kabupaten Serdang Bedagai lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama di daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. *Proportional shift* (P_i) merupakan komponen yang dipakai untuk menghasilkan besarnya *shift netto* bila terjadi perubahan pada PDRB yang bersangkutan. Jika P_i bernilai positif di Kabupaten Serdang Bedagai yang berspesialisasi di sektor secara nasional akan tumbuh lebih cepat dan jika negatif bila daerah berspesialisasi pada sektor akan tumbuh lebih lambat.
- c. D_i menunjukkan *differential shift* yang dipakai untuk mengukur besarnya *shift netto* yang diakibatkan sektor tertentu yang lebih cepat atau lambat pertumbuhannya di daerah yang bersangkutan karena faktor lokasional seperti melimpahnya sumber daya dan mengukur keunggulan kompetitif sektor di daerah tersebut. D_i bernilai positif pada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan D_i bernilai negatif pada sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif.



Gambar 1. Model alur pikir teoritis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai. Perkembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terus meningkat selama tahun 2015-2017. PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2015 sebesar 8,15 triliun rupiah meningkat menjadi 8,72 triliun rupiah pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 9,42 triliun rupiah (Gambar 2).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang dicapai pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan angka ADHK ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi (Bangun, 2018). Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu tahun 2015-2017 menunjukkan fluktuasi.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2015 tumbuh 5,88 persen namun di tahun 2016 melambat menjadi 4,15 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kembali melaju menjadi 5,33 persen pada tahun

2017. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan sumbangsih pada perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

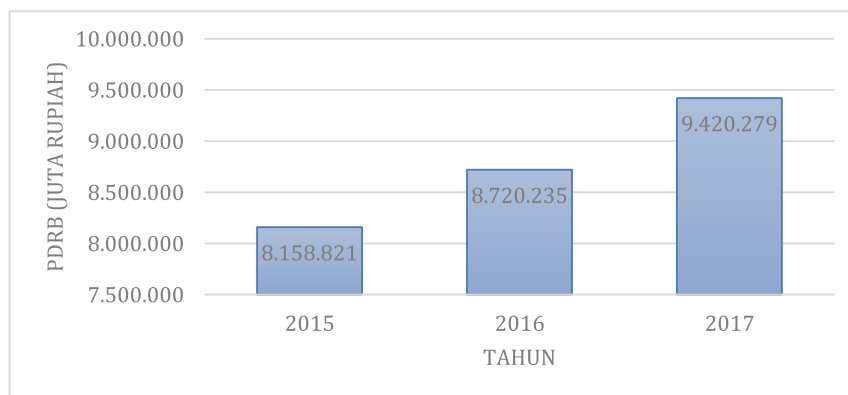
Berdasarkan Tabel 1, subsektor yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai khususnya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah subsektor perkebunan tahunan. Subsektor perkebunan tahunan menyumbang sebesar 16,12 persen terhadap perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai. Ketersediaan lahan dan iklim mempengaruhi usaha budidaya komoditas perkebunan sehingga menyebabkan subsektor ini sebagai penyumbang terbesar pada perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai. Penyumbang kontribusi terbesar berikutnya adalah subsektor tanaman pangan sebesar 10,27 persen dan subsektor perikanan sebesar 6,61 persen. Meskipun kontribusi dari ketiga subsektor ini terus menunjukkan penurunan namun tetap menjadi tumpuan bagi perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai khususnya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Analisis location quotient (LQ). Hasil penghitungan *Location Quotient (LQ)* Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan hasil penghitungan LQ terdapat tiga subsektor dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang bernilai lebih dari satu. Ketiga subsektor tersebut merupakan subsektor basis atau subsektor unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai. Subsektor tersebut adalah subsektor tanaman pangan, subsektor

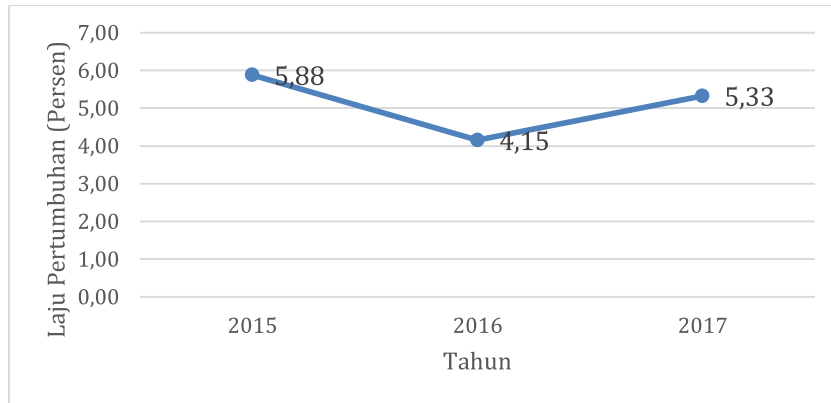
peternakan dan subsektor perikanan. Ketiga subsektor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai karena ketiga subsektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan juga sebagai salah satu sumber daya dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai.

Ketiga subsektor ini mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan memiliki potensi untuk ekspor ke luar kabupaten. Kawasan dan sumber daya alam menjadi salah satu faktor penentu suatu sektor atau subsektor tumbuh dengan baik (Bangun, 2018). Penelitian yang dilakukan Rizani (2017) menyatakan bahwa kawasan dan wilayah yang berdekatan dengan sumber daya akan tumbuh sesuai dengan jenis sumber daya yang dimiliki. Subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan menjadi subsektor unggulan didukung oleh letak geografis Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di dataran rendah dan berbatasan dengan Selat Melaka.

Subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan dan subsektor jasa pertanian masih sebagai subsektor yang bukan unggulan. Keenam subsektor ini tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan belum berpotensi untuk ekspor ke daerah lain. Keenam subsektor non basis ini juga harus tetap diperhatikan pertumbuhannya karena subsektor non basis ini menunjang pertumbuhan subsektor basis dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai.



Gambar 2. Perkembangan PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015-2017 (Juta rupiah)
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai (2017)



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam Perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015-2017 (Persentase)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai (2017)

Tabel 1. Kontribusi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015-2017 (Persentase)

Subsektor	Tahun		
	2015	2016	2017
Tanaman Pangan	11,06	10,78	10,27
Tanaman Hortikultura Semusim	0,05	0,05	0,05
Perkebunan Semusim	-	-	-
Tanaman Hortikultura Tahunan dan lainnya	2,13	2,03	1,96
Perkebunan Tahunan	16,94	15,94	16,12
Peternakan	3,59	3,58	3,56
Jasa Pertanian dan Perburuan	0,33	0,34	0,34
Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,21	0,20	0,19
Perikanan	6,16	6,50	6,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai (2017)

Analisis Shift Share. Analisis shift share menjelaskan pengaruh subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada wilayah Sumatera Utara terhadap subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Serdang Bedagai. Pengaruh komponen pertumbuhan produksi (Ni) menunjukkan seberapa besar pertumbuhan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh (positif atau negatif) terhadap pertumbuhan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai (Tabel 2).

Nilai *regional share* terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai adalah subsektor perikanan diikuti subsektor peternakan sedangkan subsektor perkebunan tahunan memberikan share yang terkecil pada perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai. Fenomena ini bisa dipahami karena faktor wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Selat Malaka.

Hasil pengolahan komponen shift share menunjukkan bahwa selama periode waktu tahun 2015-2017, pertumbuhan subsektor peternakan dan subsektor perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan subsektor tersebut di Provinsi Sumatera Utara sehingga penyimpangan yang terjadi menunjukkan arah yang positif. Subsektor yang mempunyai nilai positif menunjukkan bahwa daerah lain di Provinsi Sumatera Utara mengalami krisis di subsektor tersebut. Penyebab fenomena ini karena terjadinya penurunan lapangan kerja pada subsektor tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Goschin (2014) yang menyimpulkan adanya pergeseran sektor ekonomi di Rumania pasca akses ke United Eropa.

Subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan lainnya yaitu subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu

memiliki komponen pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan subsektor yang sama di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan penyimpangan yang

menunjukkan arah yang negatif. Penurunan pertumbuhan pada subsektor ini dipengaruhi adanya persaingan produksi antar wilayah dalam Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. Hasil penghitungan analisis *location quotient* tahun 2015-2017

No	Subsektor	Tahun			Rata-rata	Kriteria
		2015	2016	2017		
1	Tanaman Pangan	1,63	1,59	1,60	1,61	Basis
2	Tanaman Hortikultura Semusim	0,17	0,17	0,18	0,17	Non Basis
3	Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
4	Tanaman Hortikultura Tahunan	0,55	0,55	0,54	0,55	Non Basis
5	Perkebunan Tahunan	0,89	0,89	0,89	0,89	Non Basis
6	Peternakan	1,09	1,08	1,08	1,08	Basis
7	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,98	1,00	0,97	0,98	Non Basis
8	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,13	0,13	0,13	0,13	Non Basis
9	Perikanan	1,47	1,50	1,51	1,50	Basis

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 3. Komponen *shift share* subsektor pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015-2017

Subsektor	ΔE_i	N_i	$\Delta E_i - N_i$
Tanaman Pangan	152.097,37	167.000,24	-14.902,87
Tanaman Hortikultura Semusim	411,50	786,47	-374,97
Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00
Tanaman Hortikultura Tahunan	20.222,83	36.548,89	-16.326,06
Perkebunan Tahunan	284.665,83	336.886,19	-52.220,35
Peternakan	71.864,31	58.252,28	13.612,03
Jasa Pertanian dan Perburuan	3.333,08	5.218,42	-1.885,34
Kehutanan dan Penebangan Kayu	352,61	3.251,40	-2.898,79
Perikanan	128.764,10	87.974,48	40.789,62

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 4. Komponen pertumbuhan proporsional (P_i) subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015-2017

Subsektor	P_i	Kriteria
Tanaman Pangan	35.686,02	Tinggi
Tanaman Hortikultura Semusim	-636,63	Rendah
Perkebunan Semusim	0,00	Rendah
Tanaman Hortikultura Tahunan	-7.000,61	Rendah
Perkebunan Tahunan	435,28	Tinggi
Peternakan	20.901,26	Tinggi
Jasa Pertanian dan Perburuan	-1.590,44	Rendah
Kehutanan dan Penebangan Kayu	-4.297,66	Rendah
Perikanan	15.036,78	Tinggi

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 5. Komponen pertumbuhan *differential* (D_i) subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015-2017

Sub sector	D_i	Kriteria
Tanaman Pangan	-50.588,89	Rendah
Tanaman Hortikultura Semusim	261,66	Tinggi
Perkebunan Semusim	0,00	Rendah
Tanaman Hortikultura Tahunan	-9.325,45	Rendah
Perkebunan Tahunan	-52.655,63	Rendah
Peternakan	-7.289,23	Rendah
Jasa Pertanian dan Perburuan	-294,91	Rendah
Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.398,86	Tinggi
Perikanan	25.752,84	Tinggi

Sumber: Data diolah (2019)

Komponen proporsional merupakan suatu alat ukur dalam analisis shift share yang menunjukkan perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan produktivitas suatu sektor/subsektor ekonomi dibandingkan dengan sektor/subsektor ekonomi lainnya akibat pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara regional. Sektor/subsektor ekonomi yang mempunyai nilai P_i positif berarti sektor/subsektor ekonomi tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor/subsektor ekonomi yang lain sebaliknya jika sektor/subsektor ekonomi tersebut mempunyai P_i negatif artinya pertumbuhan sektor/subsektor ekonomi tersebut relatif lambat dibandingkan komoditi sektor/subsektor ekonomi lain (Bangun, 2018). Komponen pertumbuhan proporsional ditampilkan pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil penghitungan *proportional shift* pada tabel 5, dari sembilan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan terdapat empat subsektor yang memiliki rata-rata positif yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan tahunan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Subsektor tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan subsektor lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai memiliki spesialisasi pada subsektor tersebut.

Penerapan teknologi serta kebijakan pendukung dengan pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkatkan pertumbuhan sub sector tersebut yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Subsektor hortikultura semusim, subsektor perkebunan semusim, subsektor hortikultura tahunan, subsektor jasa pertanian dan perburuan dan jasa kehutanan dan penebangan kayu mempunyai nilai pertumbuhan negatif, artinya pertumbuhan subsektor tersebut lebih lambat dibandingkan subsektor lainnya.

Komponen pertumbuhan *diferensial* (Di) digunakan untuk mengetahui daya saing subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai. *Differential shift* (Di) positif menunjukkan bahwa sektor/subsektor ekonomi tersebut memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan sektor/subsektor ekonomi lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Sebaliknya *differential shift* (Di) negatif menunjukkan bahwa sektor/subsektor ekonomi tersebut memiliki daya saing lebih rendah dibandingkan sektor/subsektor ekonomi lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Komponen pertumbuhan *diffrensial* ditunjukkan pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil penghitungan *Differential Shift* (Di) pada tabel 5, subsektor tanaman hortikultura semusim, subsektor kehutanan dan penebangan kayu, dan subsektor perikanan mempunyai daya saing yang tinggi dan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. Subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan semusim, subsektor perkebunan tahunan, subsektor peternakan, subsektor jasa pertanian dan perburuan mempunyai daya saing yang rendah dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya. Subsektor perikanan mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak terlepas dari potensi kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah di subsektor perikanan sudah cukup baik.

KESIMPULAN

Perkembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang terus meningkat selama tahun 2015-2017. Hasil penghitungan analisis Location Quotient (LQ), subsektor yang merupakan subsektor unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Subsektor tersebut merupakan subsektor yang wajib untuk dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis shift share, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki spesialisasi pada subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan tahunan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan sedangkan subsektor tanaman hortikultura semusim, subsektor kehutanan dan penebangan kayu, dan subsektor perikanan mempunyai daya saing yang tinggi dan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai karena memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan subsektor lainnya.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai agar memberikan prioritas utama terhadap pengembangan subsektor unggulan yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai tanpa

- mengabaikan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan lainnya.
2. Meningkatkan daya saing subsektor unggulan melalui penerapan kebijakan daerah yang mendorong terciptanya investasi dari pihak swasta yang akan menggerakkan perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai.
 3. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai agar meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta khususnya dalam hal permodalan dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara atas penyediaan data PDRB Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. 2015. Aplikasi Analisis Shift Share Pada Transformasi Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Wilayah Di Sulawesi Tenggara. *Informatika Pertanian*, 24(2), 165-178.

Azwartika, R. R., & Sardjito. 2013. Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Dengan Konsep Agribisnis Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(2), 168-172.

Bangun, R. H. 2018. Analisis Prioritas Pembangunan Wilayah Berdasarkan Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Tengah-Sumatera Utara (. *Litbang Sukowati*, 2(1), 19-35.

BPS. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sedang Bedagei Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. Sei Rampah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagei.

BPS. 2018. *Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2018*. Sei Rampah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagei.

Goschin, Z. 2014. Regional Growth In Romania After Its Accession To EU: A Shift-Share Analysis Approach. *Procedia Economics And Finance*, 15(2004), 169-175.

Hendayana, R. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Jurnal Informatika Pertanian*, 12(2), 1-21.

Ibrahim, I. 2018. Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

(Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016). *Gorontalo Development Review*, 1(1 April), 44-58.

Knudsen, D. C. 2000. Shift-Share Analysis: Further Examination Of Models For The Description Of Economic Change. *Socio-Economic Planning Sciences*, 34(3), 177-198.

Lee, Y., & Gordon, R. H. 2005. Tax Structure And Economic Growth. *Journal Of Public Economics*, 89(5-6), 1027-1043. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.002>

Leeuwen, B. Van, & Földvári, P. 2016. The Development Of Inequality And Poverty In Indonesia, 1932-2008. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 379-402.

Novita, D., & Gultom, H. 2017. Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. *Journal Of Agribusiness Sciences*, 01(01), 1-7.

Oktavia, Z., Hadi Darwanto, D., & Hartono, S. 2015. Sektor Pertanian Unggulan Di Sumatera Selatan. *AGRARIS: Journal Of Agribusiness And Rural Development Research*, 1(2), 61-69. <https://doi.org/10.18196/Agr.129>

Pantow, S., & Palar, S. 2015. Analisis Potensi Unggulan Dan Daya Saing Sub Sektor Pertanian Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), 100-112.

Puspitawati, L. T. 2013. Analisis Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Kawasan Kedungsapur. *Economic Development Analysis Journal*, 2(2), 1-16.

Ratnasari, E. D. 2014. Sectors Analysis And Determination Of GDP Forming Leading Sector In District Kebumen. *Jurnal Fokus Bisnis*, 13(01), 1-29.

Riantika, I. B. A., & Utama, M. S. 2017. Penentuan Prioritas Pembangunan Melalui Analisis Sektor-Sektor Potensial Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP UNUD*, 6(7), 1185-1211.

Rizani, A. 2017. Analisis Potensi Ekonomi Di Sektor Dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2 Desember), 137-157.

Syafruddin, R. F., Sari, P. D., & Kadir, M. 2018. Penentuan Komoditas Unggulan Dan Struktur Tinggimongcong Kabupaten Gowa Berdasarkan Location Quotient (Lq) Dan Klassen Typology (Kt). *Jurnal Galung Tropika*, 7(April), 22-32.

Hasil Penelitian

SEKTOR BASIS DI KABUPATEN BLITAR, JAWA TIMUR: ANALISIS PDRB KABUPATEN BLITAR TAHUN 2010-2016

(SECTOR BASE IN BLITAR REGION, EAST JAVA: ANALYSIS OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BLITAR REGION 2010-2016)

Kristian Budi T.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya
Email: k_buditiawan@yahoo.com

Diterima: 17 Oktober 2018; Direvisi: 26 Februari 2019; Disetujui: 18 April 2019

ABSTRAK

Terjadi ketimpangan yang mencolok antara kawasan utara dan kawasan selatan Jawa Timur jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Kawasan utara telah memiliki infrastruktur yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan kawasan utara, kawasan selatan Jawa Timur belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga perkembangan ekonominya cenderung lebih lambat. Penyebab ketertinggalan wilayah selatan disebabkan oleh kondisi geografis kawasan tersebut terutama Kabupaten Blitar, yang merupakan pegunungan kapur yang kondisinya kering dan miskin sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sektor basis, mengetahui lapangan usaha yang memiliki daya saing, dan mengetahui struktur perekonomian di Kabupaten Blitar periode 2010-2016. Teknik analisa yang digunakan adalah Analisa Location Quotient (LQ), Analisa Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Analisa Shift-Share. Hasil penelitian ini adalah sektor basis di Kabupaten Blitar meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lapangan usaha yang memiliki daya saing adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi. Struktur perekonomian Kabupaten Blitar dalam rentang waktu 2010-2016 ditopang oleh empat lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan konstruksi.

Kata kunci: sektor basis, daya saing, LQ, DLQ, shift-share

ABSTRACT

There is a striking inequality between the northern region and the southern region of East Java. The northern region has an infrastructure that is able to lift economy up. Unlike the northern region, the southern region of East Java does not have adequate infrastructure so that the economy development tends to be slower. The reason is mostly caused by the geographical conditions of the region, especially Blitar district, which is hilly and rocky, barren and arid. This study aims to find out the base sector, to know the business fields that have competitiveness, and to know the structure of the economy in Blitar Regency 2010-2016 period. The analysis technique used is Location Quotient Analysis (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) Analysis, and Shift-Share Analysis. The results of this study are the base sectors in Blitar Regency covering agriculture, forestry and fisheries; information and communication; real estate; government administration, defense and compulsory social security; education services; and health services and social activities. Business fields that have competitiveness are: agriculture, forestry and fisheries; mining and excavation; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; and financial and insurance services. The economic structure of Blitar Regency in the period 2010-2016 is supported by four business fields, there are: agriculture, forestry and fisheries; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; processing industry; and construction.

Keywords: base sector, competitiveness, LQ, DLQ, shift-share

PENDAHULUAN

Buku PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 menyebutkan bahwa kabupaten/kota di Jawa Timur berperan dalam menghasilkan nilai tambah perekonomian. Pada tahun 2016 menghasilkan nilai tambah atas harga berlaku sebesar Rp. 1.855,04T, dan atas harga konstan tahun 2010 sebesar Rp. 1.405,24, sumbangan terhadap APBN sebesar 14,65%. Sumbangan terbesar terhadap perekonomian Jawa Timur diperoleh dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 60,24% pada tahun 2016. Lapangan usaha konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang terbesar berikutnya dalam pembentukan PDRB Jawa Timur, masing-masing sebesar 9,69% dan 5,66% (Gambar 1).

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, terjadi ketimpangan yang mencolok antara kawasan utara dan kawasan selatan Jawa Timur (Huda dan Eko, 2014). Kawasan utara telah memiliki infrastruktur yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan kawasan utara, kawasan selatan Jawa Timur belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga perkembangan perekonomiannya cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan kawasan utara maupun Provinsi Jawa Timur (Hamid, 2014).

Keberadaan kawasan industri saat ini berada di kawasan utara Jawa Timur, seperti: PT. Maspion Industrial Estate (MIE) di Kabupaten Gresik; PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya; dan PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan. Perusahaan-perusahaan tersebut berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi (Julianto, 2016).

Kontur geografis yang berbukit menghambat pembangunan aksesibilitas jalan yang merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian (Sukwika, 2018). Kesenjangan antarwilayah yang ditimbulkan juga relatif besar, wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah yang didukung oleh industri pengolahan memiliki kinerja perekonomian yang lebih baik. Hal ini berimbas pada nilai PDRB pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, ada beberapa wilayah yang memiliki pertumbuhan PDRB tinggi namun sebaliknya di wilayah yang lain (Santosa, 2015). Perkembangan perekonomian di Jawa Timur selalu berubah setiap waktu/dinamis. Perubahan keadaan perekonomian Jawa Timur lebih disebabkan oleh

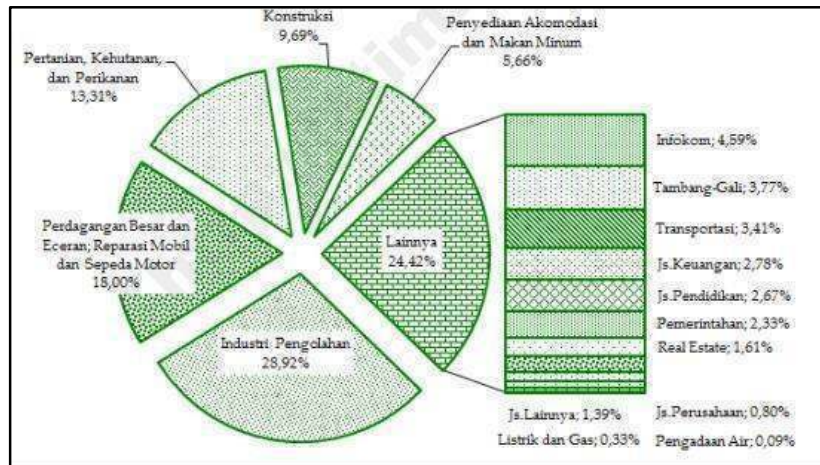
kinerja sektor maupun subsektor lapangan usaha yang menjadi roda penggeraknya (Qomariyah dkk, 2018).

Sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dimana tiga diantaranya berada di kawasan selatan Jawa Timur, yaitu: Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Jember; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Mojokerto; Kabupaten Gresik; Kota Malang; Kota Pasuruan; Kota Madiun; dan, Kota Batu. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Bojonegoro (kawasan utara Jawa Timur) sebesar 21,95%. Delapan kabupaten yang berada di sisi selatan Jawa Timur mampu berkontribusi sebesar 17,43% dari total keseluruhan kabupaten/kota pembentuk PDRB Jawa Timur atas harga berlaku pada tahun 2016. Angka tersebut jauh dibawah kontribusi kabupaten/kota di sisi utara Jawa Timur yang meskipun hanya 5 (lima) kabupaten/kota namun mampu berkontribusi sebesar 38,92% terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2016 (Hamidah dkk, 2017).

Penyebab ketertinggalan wilayah selatan disebabkan oleh kondisi geografis kawasan tersebut terutama Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Blitar, yang merupakan pegunungan kapur yang kurang mendukung pertanian namun di sisi yang lain masyarakatnya bekerja sebagai petani (Sholikhah, 2013). Penyebab timbulnya ketimpangan selain perbedaan ketersediaan sumber daya alam adalah infrastruktur, investasi, angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia (Iswanto, 2015) (Islami, 2018).

Berdasarkan buku Seri Analisis Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa ada 3 (tiga) isu strategis yang menjadi titik perhatian pembangunan di Jawa Timur. Salah satunya adalah "kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan". Pembangunan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam wajib memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, memberikan manfaat yang secara terus-menerus sama bagi tiap generasi, menyeimbangkan aktifitas manusia dengan kapasitas sumber daya alam yang menjadi sandarannya (Burhanuddin, 2016).

Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh komoditas unggulan yang ada di tiap wilayah. Setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif yang secara cepat dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dapat mendorong tumbuhnya investasi pembukaan lapangan kerja baru (Yulianto dan Eko, 2013).



Gambar 1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2012-2016
 Sumber: BPS Jawa Timur (2018)

Tabel 1. Potensi Unggulan di Jawa Timur (berdasarkan PDRB Jawa Timur Tahun 2016)

No.	Potensi	Kabupaten	Kontribusi (Rp. M)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo	246,981.64
2.	Industri Pengolahan	Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik	536,473.93
3.	Konstruksi	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto	179,816.56
4.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kota Malang	333,996.36
5.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Kota Surabaya	104,983.22
6.	Jasa lainnya	Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan	246,981.64

Sumber: BPS Jawa Timur (2018)

Keberagaman potensi dan daya tarik investasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan

(*sustainability*) untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan (Pratiwi dkk, 2018). Peningkatan kinerja perekonomian wilayah melalui sektor unggulan tidak serta-merta meninggalkan potensi sektor ekonomi

lainnya. Sektor yang tidak menjadi unggulan tetap diperhatikan sebab pembangunan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lainnya. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan komprehensif dalam menata pembangunan ekonomi di daerah (Husna dkk, 2013).

Jawa Timur merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Jawa Timur merupakan basis industri dan agrobisnis, sehingga pengembangan kawasan menjadi penting bagi perekonomian nasional. Dengan kondisi ekonomi nasional yang kurang menjanjikan, maka Jawa Timur bagian selatan cukup prospektif untuk dikembangkan sebagai motor penggerak perekonomian. Sayangnya pertumbuhan kawasan pesisir selatan hingga kini masih kalah dibandingkan dengan kawasan utara. Padahal kawasan selatan menyimpan potensi sumber daya alam dan sumberdaya kelautan yang relatif besar. Potensi ini tersebar di sepanjang pesisir kabupaten, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Jawa Timur memiliki potensi sektor perikanan tangkapan sebesar 1,7 juta ton per tahun dengan potensi lestari 804.612,8 ton per tahun, tapi baru dimanfaatkan 453.034,05 ton per tahun atau 56,30% saja dari potensi yang ada. Total tangkapan itu sebagian besar (sekitar 87,98%) diperoleh dari usaha penangkapan di kawasan pantai utara, sisanya (12,12%) didapat dari penangkapan di pantai selatan (Samudera Indonesia). Perikanan budidaya, potensi yang dimiliki wilayah pantai selatan cukup besar. Budidaya air payau produksinya dapat mencapai 1,5 ton/ha/musim tanam, air tawar 16 ton/ha/musim tanam dan budidaya laut 7,5 kg/m³/musim tanam (Lukito, 2008). Kawasan selatan menyimpan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menyejahterakan masyarakat di selatan Jawa Timur yang selama ini selalu tertinggal dari kawasan utara Jawa Timur (Hamid, 2014).

Cahyono (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Sub DAS Bengawan Solo Hulu" menyimpulkan bahwa masing-masing wilayah memiliki sektor unggulan yang berbeda sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan keunggulan komparatif yang dimiliki. Kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan pengembangan sektor unggulan secara inklusif dan memperhatikan perubahan arah kebijakan ekonomi nasional yang berdampak pada setiap wilayah yang ada.

Wilsonyudho (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Kesenjangan dalam

Pembangunan Wilayah" menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan harus dipacu dengan konsep *networking* yang erat yang melibatkan segenap stakeholder yang ada wilayah tersebut, menggerakkan seluruh elemen kelembagaan (*triple helix concept*) baik pemerintah (*government*), dunia pendidikan (*academia*), dan sektor swasta (*private*).

Sutikno, dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang". Hasil penelitian menunjukkan 7 (tujuh) satuan wilayah pengembangan di Kabupaten Malang. Karakteristik ketujuh wilayah ini berbeda satu dengan lainnya, sebab masing-masing memiliki potensi dan permasalahan sendiri. Penentuan ketujuh wilayah tersebut menggunakan analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share* (S-S), Analisis Scalogram, dan Analisis Daya Saing sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan potensi dari masing-masing wilayah yang dapat dikembangkan.

Perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya alam dan ketersediaan faktor produksi dan aktifitas untuk mengusahakan faktor-faktor produksi tersebut (Wahyudi dkk, 2014). Kabupaten Blitar dalam Angka Tahun 2017 menyebutkan bahwa perkembangan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Blitar periode tahun 2012-2016 selalu mengalami peningkatan, kurang lebih sebesar 4,9% per tahun. Kontributor PDRB Kabupaten Blitar terutama dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,51%; kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 17,44%; Industri Pengolahan sebesar 12,88%; dan Konstruksi sebesar 9,23%, sementara peranan sektor yang lain kontribusinya di bawah 5%.

Pembangunan ekonomi wilayah merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi ekonomi sehingga mempunyai daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan prioritas pembangunan, pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja pada sektor unggulan pada wilayah tersebut (Wiratama dkk, 2018). Penelitian ini bertujuan mengetahui sektor basis, mengetahui lapangan usaha yang memiliki daya saing, dan mengetahui struktur perekonomian Kabupaten Blitar periode 2010-2016.

Penelitian tentang sektor basis sudah banyak dilakukan dengan beragam kesimpulan didapat namun sektor basis ini bukanlah suatu hal yang bersifat statis namun berubah-ubah

sesuai dengan perkembangan perekonomian di masyarakat. Penelitian kali ini akan menemukan sektor basis yang *up to date*. Penelitian Diharapkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait dalam merumuskan kebijakan ekonomi di wilayahnya (kebijakan berbasis riset) (Kasanah, 2017).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan sumber data sekunder, disebut dengan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa data angka (kontribusi lapangan usaha PDRB) (Sugiyono, 2008). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Blitar selama bulan April-September 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literature terutama untuk mendapatkan data kuantitatif (PDRB Kabupaten Blitar, PDRB. Provinsi Jawa Timur) pada instansi terkait seperti BPS Kabupaten Blitar, Bappeda Kabupaten Blitar.

Analisis yang digunakan untuk menentukan sektor basis di Kabupaten Blitar adalah Analisis *Location Quotient* (LQ). Rumus yang digunakan adalah:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV} \text{ atau } LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{RV_j/RV}$$

Keterangan:

LQ_{ij} = indeks/kofisien *Location Quotient* sektor I di kab/kota j

X_{ij} = PDRB sektor I di kab/kota j

X_i = PDRB sektor I di provinsi (acuan)

RV_j = total PDRB kab/kota j

RV = total PDRB provinsi

Sumber: Muta'ali (2015)

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk menentukan sektor yang prospek dikembangkan di masa yang akan datang. Rumus yang digunakan adalah:

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{1 + g_{ij}/1 + g_j}{1 + G_i/1 + G} \right]^t$$

Keterangan:

DLQ = Indeks DLQ

g_{ij} = rata-rata laju pertumbuhan sektor atau subsektor i di Kabupaten j

g_j = rata-rata laju pertumbuhan di Kabupaten j

G_i = rata-rata laju pertumbuhan sektor atau subsektor i di tingkat provinsi/nasional

G = rata-rata laju pertumbuhan di tingkat provinsi/nasional

t = kurun waktu analisis

Sumber: Muta'ali (2015)

Analisis Shift-Share (SS) dapat digunakan untuk menganalisis struktur perekonomian di suatu wilayah. Hal yang utama dari analisis SS ini adalah diketahuinya berbagai indikator kegiatan ekonomi suatu wilayah pada dua waktu yang berbeda (Muta'ali, 2015). Analisa SS dihitung berdasarkan rumus:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

$$D_{ij} = E_{ij}.r_n + E_{ij} (r_n - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_n)$$

Keterangan:

D_{ij} = Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota)

N_{ij} = Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah acuan (provinsi/nasional)

M_{ij} = Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i wilayah acuan (provinsi/nasional)

C_{ij} = Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah amatan (kab/kota)

E_{ij} = PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) tahun awal analisis

E_{in} = PDB sektor/subsektor i di wilayah acuan (provinsi/nasional) tahun awal analisis

E_{en} = PDRB total wilayah acuan (provinsi/nasional) tahun awal analisis

E_{ijt} = PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) tahun akhir analisis

E_{int} = PDB sektor/subsektor i di wilayah acuan (provinsi/nasional) tahun akhir analisis

E_{ent} = PDRB total wilayah acuan (provinsi/nasional) tahun akhir analisis

Sumber: Muta'ali (2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi sektor basis yang dilihat dari nilai PDRB secara *time series* bertujuan untuk melihat sektor mana sajakah yang menjadi sektor basis dan non basis di Kabupaten Blitar. Hasil identifikasi nilai PDRB Kabupaten Blitar secara seri waktu dengan menggunakan analisis LQ ditampilkan pada Tabel 2. Hasil perhitungan LQ pada Tabel 2 menyimpulkan bahwa lapangan usaha yang menjadi sektor basis di Kabupaten Blitar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Jenis komoditas yang menjadi sektor basis di Kabupaten Blitar adalah berturut-turut

peternakan dan tanaman pangan. Sektor basis diartikan dapat memenuhi kebutuhan kab/kota setempat dan dapat melakukan ekspor ke wilayah lain. Seperti diketahui, sumbangan subsektor peternakan mencapai Rp. 4.821.093 juta atau berkontribusi sebesar 48% dari keseluruhan sumbangan subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Blitar tahun 2016.

Subsektor peternakan yang berkembang di Kabupaten Blitar meliputi sapi (sapi perah, sapi pedaging, kerbau, kuda, dll) sedangkan jenis unggas meliputi ayam petelur dan pedaging, itik, dan kelinci. Namun saat ini tengah dibangun peternakan sapi perah PT. Greenfileds Indonesia di Kecamatan Wlingi dengan jumlah sapi perah sebanyak 10 ribu ekor.

Tabel 2. Indeks LQ Kabupaten Blitar

No.	Lapangan Usaha	Tahun							Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	0,9
3.	Industri Pengolahan	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Konstruksi	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
6.	Transportasi dan Pergudangan	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.	Informasi dan Komunikasi	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
9.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9
10.	Real Estate	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
11.	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan,	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12.	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
13.	Jasa Pendidikan	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
15.	Jasa lainnya	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Sumber : Data diolah (2018)

Saat ini total produksi susu sapi segar di Kabupaten Blitar hanya mencapai 32.818 liter/tahun. Dengan hadirnya PT. Greenfields Indonesia diharapkan mampu menghasilkan susu sapi segar sebanyak 50 juta liter/tahun dan mendongkrak perekonomian peternak sapi perah.

Sektor basis berikutnya adalah subsektor tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, ketela. Subsektor tanaman pangan mampu menyumbang sebesar 24% terhadap keseluruhan kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Blitar dalam PDRB tahun 2016. Panen gabah kering rata-rata mencapai 117,51 kw/Ha dengan luas panen mencapai 64.998 Ha. Sedangkan komoditas jagung paling banyak dikembangkan di Kecamatan Bakung, Panggungrejo, dan Talun. Luas panen komoditas jagung di Kabupaten Blitar mencapai 50.462 Ha dengan rata-rata panen mencapai 34,14 kw/Ha.

Jumlah produksi komoditas telur ayam ras menjadi sektor basis yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Blitar sendiri namun dapat memenuhi sebesar 70% kebutuhan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan bahwa total nilai produksi telur ayam ras di Kabupaten Blitar mencapai Rp. 3.019.822,7 juta, mendominasi sumbangan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Blitar tahun 2016. Komoditas berikutnya yang menjadi sektor basis adalah sapi potong dengan total nilai produksi sebesar Rp. 1.896.190,2 juta pada tahun 2016.

Teknik analisis DLQ menemukan bahwa ada empat lapangan usaha yang memiliki prospek

menjadi sektor basis di masa yang akan datang, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi. Perhitungan $DLQ > 1$ menunjukkan bahwa proporsi laju pertumbuhan di keempat lapangan usaha tersebut pada PDRB Kabupaten Blitar lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan usaha yang sama pada PDRB Provinsi Jawa Timur, yang paling tinggi pertambangan dan penggalian (1,28).

Kabupaten Blitar memiliki potensi tambang Golongan B dan C sangat menjanjikan terutama terdapat di selatan apabila dapat di manfaatkan dan dikelola secara maksimal. Kegiatan pertambangan di kabupaten ini ada di dua lokasi yakni di Blitar utara dan selatan. Kegiatan di Blitar utara khusus kegiatan penambangan mineral sirtu berada di kantong lahar Gunung Kelud (Kali Badak, Kali Putih, Kali Semut, dan Kali Lekso). Sedangkan kegiatan penambangan di Kabupaten Blitar selatan terdiri dari tambang feldspar, bentoit, zeolit, clay, batu gamping, onyx dan pasir besi.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian memperoleh perhatian yang lebih besar mengingat Kabupaten Blitar memiliki deposit bahan galian yang besar dan mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menopang pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataan dari sekian potensi yang ada baru sebagian yang bisa dieksplorasi, namun belum dikelola secara profesional sehingga hasilnya tidak maksimal.

Tabel 3. Indeks DLQ Kabupaten Blitar

No.	Kategori	Indeks DLQ
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,28
3.	Industri Pengolahan	0,97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,89
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,86
6.	Konstruksi	0,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,81
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,92
10.	Informasi dan Komunikasi	0,96
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15
12.	Real Estate	0,96
13.	Jasa Perusahaan	0,88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,95
15.	Jasa Pendidikan	0,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95
17.	Jasa lainnya	1,00

Sumber : Data diolah (2018)

Tabel 4. Perhitungan *Shift-Share* Kabupaten Blitar

Lapangan Usaha	Nij	Ps	Ds	Nilai SS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.394.303	-1.058.005	3.300.096	4.636.394
Pertambangan dan Penggalian	311.629	-22.100	189.508	479.038
Industri Pengolahan	923.453	-31.501	680.565	1.572.517
Pengadaan Listrik dan Gas	5.274	-5.296	2.786	2.764
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.884	-1.021	518	2.381
Konstruksi	589.770	-6.703	713.987	1.297.054
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.100.067	138.921	1.249.399	2.488.388
Transportasi dan Pergudangan	82.013	19.474	58.766	160.253
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.068	18.752	57.150	131.969
Informasi dan Komunikasi	367.478	217.355	-9.964	574.868
Jasa Keuangan dan Asuransi	112.089	71.011	233.409	416.509
Real Estate	128.790	22.044	65.427	216.261
Jasa Perusahaan	24.929	-1.094	14.084	37.920
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	265.995	-143.015	194.882	317.862
Jasa Pendidikan	271.509	53.433	208.422	533.364
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46.415	32.249	28.382	107.046
Jasa Lainnya	102.867	-29.521	74.133	147.479
PDRB	6.785.532	-725.017	6.336.534	12.397.049

Sumber: Data diolah (2018)

Laju pertumbuhan pertambangan dan penggalian di tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 15% yang berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhannya. Penyebab turunnya kontribusi ini disebabkan karena permintaan bahan galian terutama batubara mengalami penurunan yang drastis. China sebagai importir batubara juga mengurangi impor batubara sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonominya.

Penyebab kedua adalah nilai komoditas batubara menurun tajam sehingga tidak ada kontribusi yang berarti pada tahun 2015. Sedangkan di satu sisi, laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2014 meningkat menjadi 19%. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya harga pasir besi di pasaran internasional yang mencapai Rp 350.000/ton (pada saat itu).

Berdasarkan analisis SS diketahui bahwa selama kurun waktu 2010-2016, PDRB Kabupaten Blitar mengalami pertambahan kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp. 12,39T. Hal ini dapat dilihat dari nilai SS yang positif pada semua lapangan pekerjaan. Kenaikan

kinerja perekonomian Kabupaten Blitar disumbangkan oleh empat lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan konstruksi. Pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Timur menunjukkan pengaruh pertumbuhan terhadap perekonomian Kabupaten Blitar pada setiap lapangan usaha dengan total nilai output Rp. 6,78T.

Sedangkan lapangan usaha yang kurang kompetitif/memiliki daya saing yang lebih rendah di tingkat Provinsi Jawa Timur adalah informasi dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan indeks DLQ<1. Selebihnya lapangan usaha lainnya memiliki daya saing terhadap wilayah yang lebih luas (Provinsi Jawa Timur) dicirikan dengan nilai Ds>1.

Nilai pergeseran proporsional (Ps) menunjukkan bahwa lapangan usaha di Kabupaten Blitar yang memiliki laju pertumbuhan lebih lambat (Ps negatif) daripada Provinsi Jawa Timur adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan

listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa lainnya.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar secara keseluruhan lebih lambat daripada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur. Lapangan usaha yang memiliki nilai Ps positif (laju pertumbuhan lebih cepat) daripada Provinsi Jawa Timur adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan social.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Blitar menjadi sektor basis pada tahun 2010-2016. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki daya saing adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi. Selama periode tahun 2010-2016 struktur perekonomian Kabupaten Blitar ditopang oleh empat lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan konstruksi.

REKOMENDASI

1. Pengembangan potensi ekonomi (sektor basis) diperlukan konsistensi dan sinergitas antar lembaga sehingga tercipta sebuah program perbaikan kesejahteraan masyarakat yang multisektoral dan komprehensif.
2. Kerjasama antar lembaga terutama instansi pemerintah sebagai regulator diperlukan dalam membuat tata aturan/produk kebijakan yang mengikat tidak hanya antar instansi pemerintah itu sendiri tetapi juga kepada pihak ketiga, terlebih lagi dapat mengakomodir munculnya lembaga NGO yang berorientasi non profit. Pihak ketiga inilah yang seringkali berada di garis depan, lebih cepat dalam mengatasi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan dan dukungan baik moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan sejawat Peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan masukan dan saran terkait perbaikan mutu kualitas dan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin. 2016. Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal EduTech* 2(1) hal. 11-17.

Lukito, O. 2008. Potensi Pesisir Selatan Jawa Timur [Online]. Dari: <https://okilukito.wordpress.com/2008/09/22/potensi-pesisir-selatan-jawa-timur/> [Diakses: 28 Juli 2017]

Cahyono, S.A, Wahyu Wisnu Wijaya. 2014. Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Sub DAS Bengawan Solo Hulu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 11(1) hal. 32-43

Hamid, A. 2014. Potensi Investasi Jalur Lintas Selatan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Bina Praja* 6(3) hal. 97-204

Hamidah, B.I.N, Fitriana Zahroh. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Huda, M, Eko Budi Santoso. 2014. Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya. *JURNAL TEKNIK POMITS* 3(2) 81-86

Husna, N, Irwan Noor, Mochammad Rozikin. 2013. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Menguatkan Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1(1) hal. 188-196

Islami, F.S. 2018. Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa timur, Indonesia. *Jurnal MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN* 33 (1) hal 29-39

Iswanto, D. 2015. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal SIGNIFIKAN* 4(1) hal 41-66

Julianto, P.A. 2016. Dinilai Strategis, Menperin Optimalkan Kawasan Industri Nasional. [Online]. Dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/05/110000026/Dinilai.Strategis.Menperin.Optimalkan.Kawasan.Industri.Nasional>. [Diakses: 25 Februari 2019]

Kasanah, K.N. 2017. Kebijakan Berbasis Penelitian. [Online]. Dari: <http://setKabupatengo.id/kebijakan-berbasis-penelitian/> [Diakses: 7 Agustus 2018]

Muta'ali, L. 2015. *Teknik Analisis Regional, untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Pratiwi, N, Dwi Budi Santosa, Khusnul Ashar. Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. *JIEP* 18(1) hal. 1-14

Provinsi Jawa Timur. 2015. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur 2015*. Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Qomariyah, S, Mustapit, Agus Supriono. 2018. Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditas Pertanian Tanaman Pangan serta Kontribusinya terhadap Perekonomian Kabupaten Bondowoso. *JSEP* 11(1) hal. 66-72

Santoso, S.H. 2015. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur. *Media Trend* 10(2) hal. 116-128

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sukwika, T. 2018. Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 6(2) hal. 115-130

Sutikno, dan Maryunani. 2007. Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics* 1(1) hal.1-17

Sholikhah, W. 2013. Analisis Pembangunan Pertanian Berkelanjutan melalui Agribisnis di Kawasan Blitar Selatan. Jurnal tidak diterbitkan. Malang: Pendidikan Pascasarjana Geografi Universitas Negeri Malang.

Wahyudi, W.W, Dominicus Savio Priyarsono, Amzul Rifin. 2014. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kasus: Kabupaten Pasaman Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Agribisnis Indonesia* 2(2) hal. 159-176

Wiratama, S, Herman Cahyo Diartho, Fajar Wahyu Prianto. 2018. Analisis Pembangunan Wilayah Tertinggal di Provinsi Jawa Timur. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* V(1) hal. 16-20

Wilsonoyudho, S. 2009. Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. *Forum Geografi* 23(2) hal. 167-180

Yulianto, D.Y, dan Eko Budi Santoso. 2013. Identifikasi Potensi Komoditas Unggulan pada Koridor Jalan Lintas

Selatan Jatim di Kabupaten Tulungagung-Trenggalek. *JURNAL TEKNIK POMITS* 2(2) hal. 118-122

Hasil Penelitian

STUDI DIAGNOSTIK TINGKAT PENERAPAN KULTUR TEKNIS KELAPA SAWIT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN SAWIT SWADAYA: STUDI KASUS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

(DIAGNOSTIC STUDY ON OIL PALM CULTIVATION PRACTICES LEVEL TO IMPROVE THE WELFARE OF PALM OIL INDEPENDENT SMALLHOLDERS: A CASE STUDY IN NORTH PADANG LAWAS DISTRICT, NORTH SUMATRA)

Zulfi Prima Sani Nasution, Ratnawati Nurkhoiry, Suroso Rahutomo

Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjend Katamsno No 51, Kampung Baru, Medan
email: zulfi.primasani@gmail.com

Diterima: 5 April 2019; Direvisi: 20 Juni 2019; Disetujui: 22 Juli 2019

ABSTRAK

Sejalan dengan berkembangnya pekebun swadaya, upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan mereka saat ini menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan. Kendala utama yang dihadapi oleh pekebun swadaya adalah produktivitas yang rendah, seperti yang dialami pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi praktik budidaya kelapa sawit yang dilakukan saat ini dan pengembangan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara. Studi ini dilakukan melalui survei dan wawancara mendalam yang melibatkan 40 petani swadaya yang tersebar di kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan, dan Halongonan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang benih kelapa sawit unggul dan praktik standar budidaya kelapa sawit telah menyebabkan hasil panen aktual hanya setengah dari potensi hasil kesesuaian lahan S3, terutama untuk pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, dan Halongonan Timur. Selain itu, proses penjualan tandan buah segar (TBS) yang tidak dikelola melalui organisasi pekebun (kelompok atau koperasi) menyebabkan rantai pemasaran TBS yang panjang, sehingga mengurangi pendapatan pekebun swadaya. Terbatasnya akses keuangan dari bank membebani pekebun swadaya dalam menerapkan praktik standar budidaya kelapa sawit, terutama pemupukan. Memperkuat peran pemerintah daerah, bank dan perusahaan perkebunan sangat diharapkan untuk mengubah pola pikir pekebun mengenai pentingnya menggunakan benih kelapa sawit unggul, mengadopsi praktik-praktik terbaik budidaya kelapa sawit, membuka akses keuangan, dan memperkuat kelembagaan pekebun sehingga kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pekebun swadaya di Kabupaten Lawas Padang Utara dapat segera direalisasikan.

Kata kunci: pekebun swadaya, produktivitas, kelapa sawit, Padang Lawas Utara

ABSTRACT

In line with the growth of independent smallholders, efforts to increase their productivity and sustainability are now a concern for policymakers. The main obstacle faced by independent smallholders is the low yield, as experienced by independent smallholders in North Padang Lawas District, North Sumatra. This study aims to determine the current conditions of oil palm cultivation practices and develop policy recommendations to increase oil palm yield in North Padang Lawas District. The study was carried out through surveys and in-depth interviews involving 40 independent smallholders spread across the sub-district of Padang Bolak, Portibi, Halongonan, and Halongonan Timur. The results showed that lack of knowledge about oil palm certified seeds and standard practices of oil palm cultivation had caused the actual yield was only half of the potential yield of land suitability S3, especially for independent smallholders in the sub-district of Padang Bolak, Portibi, and Halongonan Timur. In addition, the process of selling

fresh fruit bunches (FFB) that were not managed through farmer organizations (groups or cooperatives) caused a long chain of FFB marketing, thereby reducing the smallholder's income. Limited access to finance from banks burdened smallholders in implementing standard practices of oil palm cultivation, especially fertilization. Strengthening the role of local governments, banks and plantation companies are expected to change the mindset of smallholders regarding the importance of using legitimate oil palm seeds, adopting the best practices of oil palm cultivation, opening access to finance, and strengthening smallholders institutions so that the welfare and sustainability of independent smallholders in North Padang Lawas District can be realized soon.

Keywords: independent smallholders, yield, oil palm, North Padang Lawas

PENDAHULUAN

Perkembangan perkebunan rakyat kelapa sawit yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir ternyata belum diikuti dengan meningkatnya pengetahuan pekebun tentang praktik budidaya terbaik (Best Management Practices) (Purba et al., 2014). Secara nasional, capaian produktivitas perkebunan rakyat kelapa sawit Indonesia hanya 3,3 ton CPO/ha atau kurang dari 50% potensi bahan tanaman unggul (Ditjenbun, 2018).

Sebagian perkebunan rakyat mudah dikenali dari kondisi kebun yang tidak terawat, pohon-pohon yang menunjukkan gejala kekurangan hara serta tandan-tandan yang dipanen sebelum waktunya matang. Meskipun di sekitar perkebunan rakyat dijumpai perusahaan negara ataupun perusahaan swasta, namun alih teknologi kultur teknis budidaya kelapa sawit yang standar sering kali belum diterapkan. Hal lainnya adalah penggunaan bibit illegitim/asalan, yaitu bibit yang diperleh dari pengedar benih yang tidak bertanggung jawab atau dibuat sendiri dengan mengambil benih dari tanaman sembarang (Vermeulen dan Goad, 2006).

Faktor kesesuaian lahan untuk budidaya kelapa sawit sering kali masih kurang dipahami oleh pekebun rakyat. Banyak pekebun yang menanam kelapa sawit di areal berbukit - bergunung, di lahan gambut dalam, atau pada tanah pasir. Pekebun mencoba mengikuti budidaya kelapa sawit yang dilakukan perusahaan besar, namun karena terbatasnya modal dan teknologi menyebabkan faktor pembatas lahan tidak dikelola dengan baik dan justru kebun kelapa sawit tersebut seringkali akhirnya terbengkalai (Lee et al., 2014).

Selain itu keterbatasan permodalan membuat pekebun tidak bisa mengusahai lahan yang cukup luas, atau walaupun luas maka letaknya terpecah-pecah sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya. Lahan sempit ini terkadang juga dimanfaatkan untuk tanaman keras lainnya sehingga produksi kelapa sawit menjadi tidak optimal (Purba et al., 2014). Rendahnya hasil produksi setiap kali panen (umumnya dua minggu sekali) umumnya mengharuskan pekebun menjual hasil panen kepada para tengkulak yang kemudian

menjualnya kembali kepada pedagang pengumpul besar atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) (Nasution et al., 2014).

Hal ini tentu saja menimbulkan disparitas harga antara harga yang diterima pekebun dengan harga yang dibayarkan oleh PKS. Ditengarai bahwa pendapatan pekebun dari menjual tandan sawit tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sehingga pekebun melakukan pekerjaan sampingan lainnya (Lee et al., 2014; Purba et al., 2014). Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu wilayah pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit di Sumatera Utara yang terdiri dari 9 kecamatan dengan total luas areal mencapai 27.225 ha. Rerata produktivitas perkebunan sawit swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tergolong rendah yaitu sebesar 769,72 kg/ha/bulan (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2017), memerlukan pendekatan terencana untuk penanganan masalah tersebut. Namun, terbatasnya data empiris mengenai karakteristik pekebun, kondisi praktik budidaya terkini dan tantangan lainnya melemahkan upaya pemerintah Kab. Padang Lawas Utara dalam menyusun program-program perbaikan dengan pendekatan yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui karakteristik pekebun swadaya; b) mengetahui tingkat penerapan kultur teknis dan capaian produksi sawit di tingkat pekebun swadaya; dan, c) menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan produktivitas pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara.

METODE

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara pada April-Agustus 2018. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan luas areal perkebunan rakyat dan jumlah pekebun di setiap kecamatan serta posisi kecamatan di Kabupaten Paluta. Empat kecamatan terpilih menjadi lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, Kecamatan Halongonan dan Kecamatan Halongonan Timur.

Sampel pekebun swadaya juga dipilih secara *purposive* sejumlah 10 (sepuluh) orang

pekebun per kecamatan dengan pertimbangan terbatasnya informasi data pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sepuluh orang pekebun tersebut berasal dari empat desa di setiap kecamatan terpilih. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilengkapi kuesioner terstruktur.

Tabel 1. Sampel penelitian

No.	Kecamatan	Jumlah Sampel Pekebun (Orang)
1.	Padang Bolak	10
2.	Portibi	10
3.	Halongonan	10
4.	Halongonan Timur	10
Jumlah		40

Tabel 2. Indikator penilaian

Indikator	Keterangan
1. Pembangunan kebun	1. Pembangunan kebun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status lahan ▪ Sumber benih dan benih yang digunakan
2. Penerapan kultur teknis	2. Penerapan kultur teknis <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikasi pemupukan, penunasan, Pengendalian OPT ▪ Pelaksanaan panen dan pengendalian gulma
3. Pemasaran hasil produksi	3. Pemasaran hasil produksi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah produksi dan tujuan pemasaran ▪ Lama waktu penjualan hasil produksi ▪ Cara pembayaran hasil produksi

Sumber: Molenaar *et al.*, 2013

Pengelompokan pekebun dilakukan berdasarkan kepemilikan lahan, yaitu: (1) lahan sempit I; (2) lahan sedang; dan, (3) lahan luas, yang didefinisikan sebagai berikut (Adnyana dan Suhaeti, 2003):

- 1) Kepemilikan lahan sempit = kepemilikan lahan $\leq \mu - \frac{1}{2} \text{ stdev}$
- 2) Kepemilikan lahan sedang = $\mu - \frac{1}{2} \text{ stdev} < \text{kepemilikan lahan} \leq \mu + \frac{1}{2} \text{ stdev}$
- 3) Kepemilikan lahan luas = kepemilikan tanah $\geq \mu + \frac{1}{2} \text{ stdev}$

Catatan: μ adalah jumlah rata-rata kepemilikan lahan; stdev adalah standar deviasi kepemilikan lahan

Data hasil wawancara dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabulasi dan gambar. Pengukuran variabel-variabel penelitian dinyatakan dalam nilai rerata atau persentase. Analisis tingkat penerapan kultur teknis kelapa sawit di tingkat pekebun swadaya dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan mengadopsi pendekatan Molenaar *et al.*, (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Kebun. Kemudahan teknis budidaya menjadi alasan utama pekebun menanam kelapa sawit mengingat sebagian besar di antara mereka sebelumnya mengusahakan tanaman pangan. Kemudahan teknis budidaya tersebut disimpulkan pekebun dari pengalaman bekerja di perusahaan swasta atau dari pekebun lain yang telah lebih dulu menanam kelapa sawit. Di Halongonan Timur, pekebunnya relatif beruntung karena 80% diantaranya pernah bekerja dan mendapat pengetahuan budidaya sawit dari PT. Torganda, sebuah perusahaan perkebunan swasta yang beroperasi di Kab. Padang Lawas Utara.

Sebagian besar pekebun yakni 7 (tujuh) orang pekebun (70%) di Kecamatan Padang Bolak, 6 (enam) orang pekebun (60%) di Kecamatan Portibi dan 5 (lima) orang pekebun (50%) di Kecamatan Halongonan mengaku belajar dari mencoba sendiri (*learning by doing*) dan sebagian lagi mengaku belajar dari teman yang telah lebih dulu menanam sawit. Meskipun demikian, kurangnya informasi tentang bibit unggul menyebabkan banyak pekebun tertipu saat membeli bibit sawit.

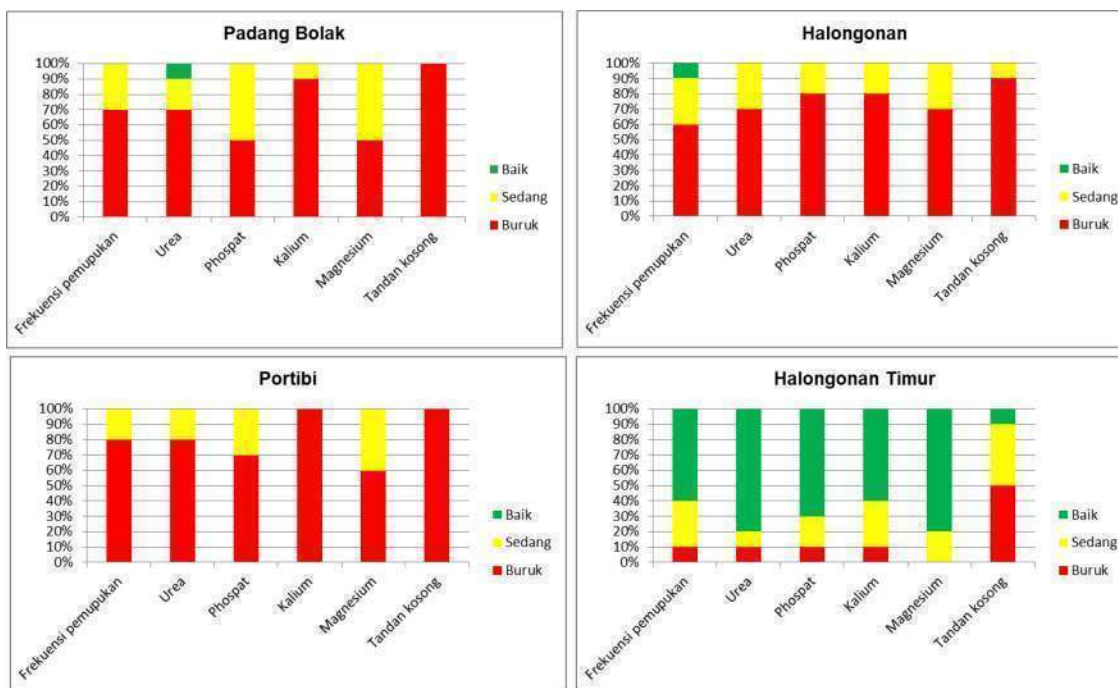
Sebanyak 9 orang pekebun (90%) di Kecamatan Padang Bolak, 9 (sembilan) orang pekebun (90%) di Kecamatan Portibi, dan 8 (delapan) orang pekebun (80%) pekebun di Kecamatan Halongonan mengaku menggunakan benih yang dibuat sendiri ataupun yang tidak jelas asal usulnya. Para pekebun di Kecamatan Halongonan Timur cukup beruntung dengan menanam bibit dari sumber yang terpercaya yang diperoleh dari PT. Torganda.



Gambar 1. Hasil segregasi buah di kebun salah satu pekebun swadaya di Kecamatan Portibi, 3 (tiga) tipe kelapa sawit teridentifikasi bersamaan di dalam satu areal kebun, yaitu: Tenera (kiri), Pisifera (tengah) dan Dura (kanan)

Penerapan Kultur Teknis. Meskipun kemudahan interaksi dengan berbagai pihak telah memungkinkan pekebun untuk mengetahui teknologi budidaya kelapa sawit lebih mudah, namun pekebun rakyat umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola kebun mereka (Vermeulen dan Goad, 2006). Pendampingan pekebun oleh penyuluh pertanian dan perkebunan di Kabupaten Padang Lawas Utara belum maksimal dilakukan, mengingat selama ini para penyuluh pertanian

lebih fokus pada kegiatan swasembada pangan Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale). Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman petani dalam hal benih unggul, penentuan jenis dan dosis pemupukan serta standar kegiatan pemeliharaan kebun. Gambar 2 memperlihatkan pemupukan masih belum tepat dalam hal frekuensi, aplikasi, pemilihan jenis pupuk dan keseimbangan hara (sebagian unsur hara berlebih sementara yang lain kurang).



Gambar 2. Praktik pemupukan tanaman pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Halongonan, Portibi, dan Halongonan Timur, ditinjau dari aspek frekuensi pemupukan dan jenis pupuk yang diaplikasikan

Sebagian besar pekebun mengaku bahwa mereka menentukan sendiri dosis pupuk yang diaplikasikan di lahan, sebagian lainnya mendapat informasi dari pekebun lain. Hanya pekebun di Kecamatan Halongonan Timur yang mengaku memupuk berdasarkan informasi rekomendasi pemupukan dari PT. Torganda. Gambar 2 juga memperlihatkan bahwa pekebun di Halongonan Timur lebih intensif dalam hal pemupukan. Sekitar 60% pekebun di Kecamatan Halongonan Timur mengaku telah melakukan pemupukan 2 kali setahun, dan hanya 10% yang mengaku tidak melakukan pemupukan sepanjang tahun 2018.

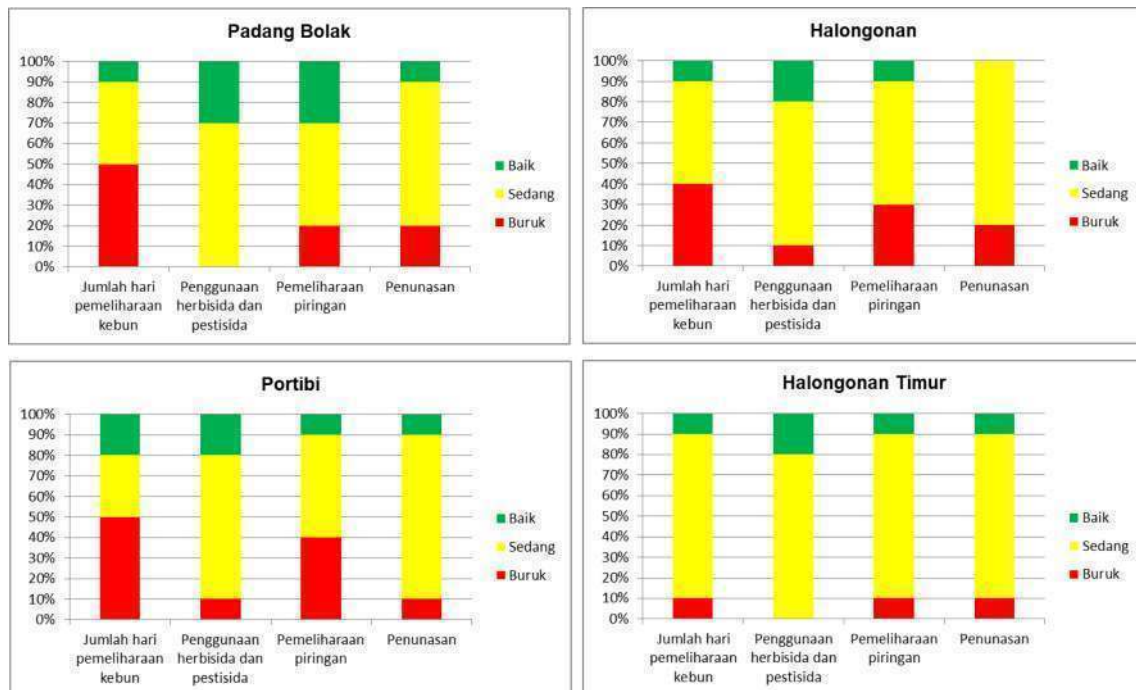
Hal ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan 70% pekebun Padang Bolak, 80% pekebun Portibi dan 60% pekebun Halongonan yang mengaku tidak memupuk kebun sawit mereka sepanjang tahun 2018. Terus meningkatnya harga pupuk dan ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu menjadi alasan utama pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara tidak melakukan pemupukan.

Pengalaman dan pemahaman terhadap budidaya sawit sejalan dengan perhatian pekebun dalam pemeliharaan kebunnya, yang terlihat dari jumlah hari pekebun untuk memelihara kebunnya. Hanya pekebun di

Kecamatan Halongonan Timur yang tergolong baik dalam melakukan pemeliharaan kebun (lebih dari 3 hari dalam sebulan). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pekebun di Kecamatan Padang Bolak, Portibi dan Halongonan yang tergolong buruk.

Pengendalian gulma di gawangan dan piringan dilakukan pekebun menggunakan herbisida seperti Gramoxon dengan frekuensi 2 kali setahun. Penunasan pelepah pada sebagian besar kebun swadaya dapat dikatakan tergolong sedang, yaitu 1 kali dalam setahun dengan tetap mempertahankan jumlah pelepah segar di pohon dan penyusunan pelepah tunasan di gawangan.

Data produksi pada penelitian ini diperoleh hanya berdasarkan wawancara pekebun yang terbatas mempunyai tanaman sawit dengan umur tertentu, namun tetap dapat dijadikan salah satu indikator masih rendahnya produksi kelapa sawit pekebun swadaya. Pada rentang umur produksi tinggi (7-17 tahun), rerata produktivitas kebun di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Halongonan Timur berturut-turut hanya 40%, 45%, 50% dan 70% dibandingkan dengan standar produktivitas kelas lahan S3 yang dikeluarkan oleh PPKS (Tabel 2).



Gambar 3. Praktik pemeliharaan kebun pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Halongonan, Portibi dan Halongonan Timur dari aspek jumlah hari pemeliharaan kebun, penggunaan herbisida dan pestisida, pemeliharaan piringan dan penunasan

Tabel 3. Produktivitas tanaman kelapa sawit pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Halongonan Timur

Umur Tanaman	Produktivitas (ton TBS/ha/tahun)				Produktivitas Kelas Lahan S3
	Padang Bolak	Portibi	Halongonan	Halongonan Timur	
4	5,1	5	-	-	12
5	8,6	7,5	10,75	-	15
6	7,85	7	7,5	-	19
7	9,3	7,5	9,1	15,5	23
8	-	-	13,9	-	26
9	14,7	-	15,7	20	27
10	-	12	14,4	-	28
11	9,5	-	7,25	-	29
12	-	-	16	18,5	30
13	-	11,4	-	-	30
14	14	-	15,7	19	29,5
15	-	10,2	14,8	-	28,5
16	16,8	10,5	14,7	21	27
17	10,9	-	-	-	26
18	-	-	-	21	25
19	12,5	-	-	20	24
20	-	-	-	21	23
21	16	-	-	-	22
22	-	-	-	19	21
23	-	-	-	19,5	20

Sumber: data primer (diolah)

Produktivitas kelapa sawit pekebun swadaya di Halongonan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya berhubungan dengan lebih intensifnya penggunaan input produksi terutama pupuk dan pengalaman berkebun yang lebih mendalam terutama dari pengalaman bekerja di PT. Torganda. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Purba *et al.*, 2014 dimana produktivitas kebun pekebun swadaya di Kabupaten Aceh Selatan, Pasaman Barat-Dharmasraya, dan Bengkulu Utara berturut hanya mencapai 48%, 49% dan 70% dari produktivitas lahan S3. Hasil serupa juga dijelaskan Euler *et al.*, (2016) bahwa pekebun rakyat di Sumatera hanya mendapatkan hasil panen sebesar 56% dari potensi hasil panen perkebunan sawit.

Pemasaran Hasil Produksi. Rendahnya penggunaan input produksi yang kemudian berdampak kepada rendahnya produktivitas kemungkinan juga disebabkan oleh keterbatasan modal usaha pekebun (Papenfus, 2002). Modal awal pekebun untuk berkebun kelapa sawit umumnya bersumber dari modal pribadi, demikian juga dengan biaya pemeliharaan dan pengadaan input lainnya. Hal inilah yang menyebabkan besarnya persentase pekebun yang mengaku tidak melakukan pemupukan sepanjang 2018, yaitu 70% di

Kecamatan Padang Bolak, 80% di Kecamatan Portibi dan 60% di Kecamatan Halongonan.

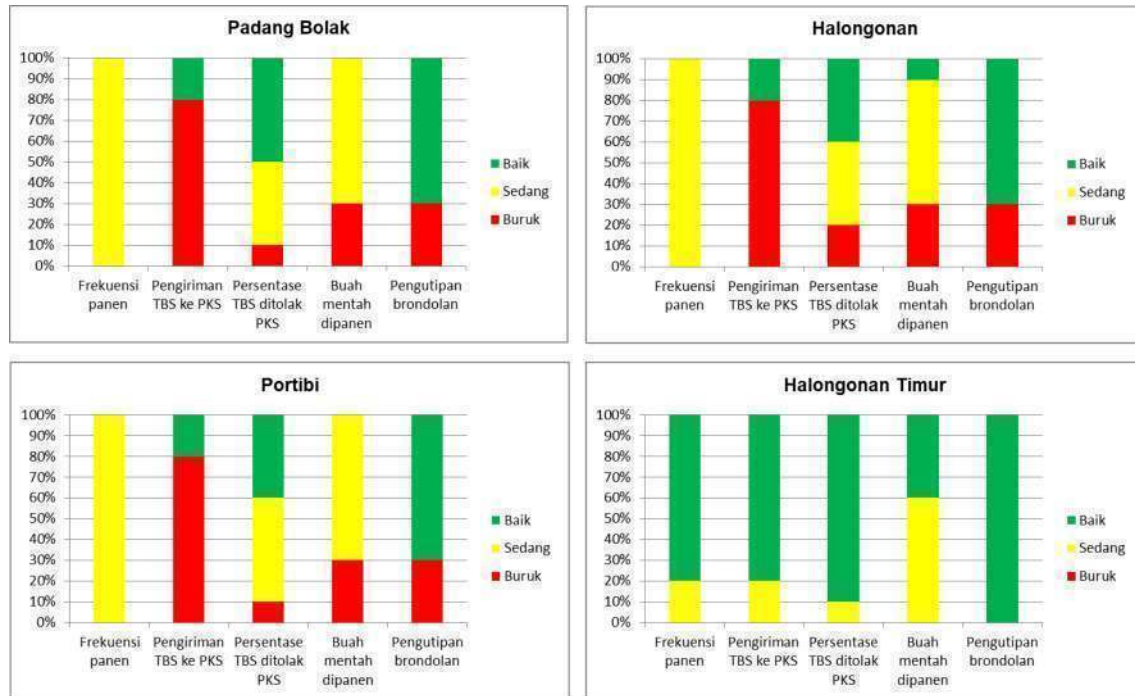
Rotasi panen merupakan salah satu faktor penting dalam capaian produktivitas lahan dan pendapatan pekebun rakyat (Lee *et al.*, 2014; Euler *et al.*, 2016). Secara umum, rotasi panen buah tergolong sedang yakni 2 kali sebulan khususnya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi dan Halongonan. Rotasi panen yang lebih baik dilakukan oleh pekebun di Kecamatan Halongonan Timur. Kepemilikan lahan yang lebih luas (rata-rata 12 ha) menjadi faktor utama rotasi panen yang lebih baik.

Pekebun di Kecamatan Halongonan Timur juga memiliki koperasi/kelompok tani yang tergolong aktif, sementara pekebun di kecamatan lainnya umumnya menjual TBS melalui agen buah yang kemudian mengumpulkannya kepada pemilik ramp untuk dijual ke PKS. Ketiadaan koperasi/kelompok tani yang berperan dalam pemasaran bersama hasil panen menyebabkan rendahnya harga yang diterima pekebun di Kecamatan Padang Bolak, Portibi dan Halongonan.

Pada saat survei dilakukan, rata-rata pekebun menerima harga TBS dari agen buah berkisar Rp 800-950/kg TBS, sedangkan pekebun di Halongonan Timur dapat menerima harga yang 24-27% lebih tinggi sekitar Rp1.100-Rp1.250/kg TBS. Hal ini sejalan dengan Nasution *et al.*, (2014) yang mengkaji efisiensi

pemasaran TBS pekebun swadaya di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pekebun swadaya yang menjual TBS langsung ke PKS menerima harga 6-17% lebih tinggi dibandingkan pekebun swadaya yang menjual melalui agen buah. Hasil penelitian tersebut juga

sejalan dengan Moolenar *et al.*, (2013) yang menjelaskan bahwa pekebun swadaya yang menjual TBS langsung ke PKS menerima harga 16% lebih tinggi dibandingkan menjual melalui agen buah dan 5% lebih tinggi dibandingkan menjual melalui koperasi.



Gambar 4. Praktik panen dan transportasi pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Halongonan, Portibi dan Halongonan Timur

Tabel 4. Distribusi kepemilikan lahan sawit pekebun swadaya di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Halongonan Timur

No	Pengelompokan Pekebun	Rang e (Ha)	Rerata (Ha)	(%)
Padang Bolak				
1	Pekebun Lahan Sempit (≤ 2 Ha)	0,5-2	1,5	50
2	Pekebun Lahan Sedang ($> 2 - 6$ Ha)	2,1-5,5	3,4	50
3	Pekebun Lahan Luas (> 6 Ha)	-	-	-
Portibi				
1	Pekebun Lahan Sempit (≤ 2 Ha)	0,5-2,0	1,5	50
2	Pekebun Lahan Sedang ($> 2 - 6$ Ha)	2,5-6,0	3,8	40

3	Pekebun Lahan Luas (> 6 Ha)	6,5	6,5	10
Halongonan				
1	Pekebun Lahan Sempit (≤ 2 Ha)	1,0-2,0	1,5	20
2	Pekebun Lahan Sedang ($> 2 - 6$ Ha)	2,2-6,0	3,6	50
3	Pekebun Lahan Luas (> 6 Ha)	6,2-10,5	7,5	30
Halongonan Timur				
1	Pekebun Lahan Sempit (≤ 2 Ha)	1,0-2,0	1,8	20
2	Pekebun Lahan Sedang ($> 2 - 6$ Ha)	2,25 - 6,0	3,0	20
3	Pekebun Lahan Luas (> 6 Ha)	7,0-45,0	12,6	60

Sumber: data primer, diolah

Kondisi Sosial Ekonomi. Luas lahan yang diusahakan untuk berkebun sawit juga menjadi faktor penentu pendapatan rumah tangga pekebun. Pekebun kelapa sawit Halongonan Timur memiliki lahan lebih luas dibandingkan pekebun di lokasi lainnya, mengingat para pekebun di wilayah tersebut telah lebih dulu menanam sawit. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa di Kecamatan Padang Bolak dan Portibi, luas kepemilikan lahan kebun tersebar cukup merata dalam kategori lahan sempit (< 2 ha) dan lahan sedang (2-6 ha).

Pendapatan pekebun kelapa sawit sangat bergantung pada besaran luas lahan kelapa sawit yang diusahakan dan juga pekerjaan lain yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebanyak 35-43% pekebun di Kecamatan Padang Bolak, 28-58% pekebun di Kecamatan Portibi, 33-53% pekebun di Kecamatan Halongonan dan 50-62% pekebun di Kecamatan Halongonan Timur mengatakan sawit sebagai sumber pendapatan utama. Tabel

5 memperlihatkan bahwa proporsi pendapatan pekebun yang diperoleh dari sawit tergolong lebih besar dibanding pendapatan dari kegiatan non sawit. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang dimiliki pekebun, maka semakin besar kontribusi sawit terhadap pendapatan rumah tangga yang diperoleh pekebun setiap bulan.

Pendapatan pekebun setiap bulan dari sawit bervariasi dari Rp855 ribu-Rp1,9 juta di Kecamatan Padang Bolak, Rp850 ribu-Rp3,7 juta di Kecamatan Portibi, Rp855-Rp4,2 juta di Kecamatan Halongonan dan Rp2,9 juta-Rp20,7 juta di Kecamatan Halongonan Timur. Diketahui bahwa lebih dari 60% pendapatan pekebun ternyata dibelanjakan untuk keperluan non-pangan dan semakin tinggi pendapatan pekebun maka proporsi belanja non pangan tersebut juga semakin besar. Di antara belanja non pangan yang tergolong tinggi adalah biaya kredit dan arisan.

Tabel 5. Tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pekebun di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Halongonan Timur (Rp 000)

Kelompok Lahan	Pendapatan (Rp/Bln/KK)			Proporsi Pendapatan (%)		Pengeluaran (Rp/Bulan/KK)		
	Sawit	Non Sawit	Total	Sawit	Non Sawit	Pangan	Non Pangan	Total
Padang Bolak								
Sempit ≤ 2,00 ha	855	1.556	2.411	35	65	1.000	1.317	2.317
Sedang > 2,00-6,00 Ha	1.938	2.570	4.508	43	57	1.585	3.570	1.585
Luas > 6,00 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-
Portibi								
Sempit ≤ 2.00 ha	855	2.150	3.005	28	72	1.340	1.557	2.897
Sedang > 2.00-6.00 Ha	2.166	1.545	3.711	58	42	1.750	2.413	4.164
Luas > 6 Ha	3.705	3.870	7.575	49	51	2.250	4.369	6.620
Halongonan								
Sempit ≤ 2.00 ha	855	1.750	2.605	33	67	1.425	1.675	3.100
Sedang > 2.00-6.00 Ha	2.052	3.150	5.202	39	61	1.987	2.325	4.312
Luas > 6 Ha	4.275	3.825	8.100	53	47	2.435	3.255	5.690
Halongonan Timur								
Sempit ≤ 2.00 ha	2.970	2.953	5.923	50	50	2.136	1.861	3.997
Sedang > 2.00-6.00 Ha	4.950	4.376	9.326	53	47	2.664	3.645	6.309
Luas > 6 Ha	20.790	12.735	33.525	62	38	4.265	18.059	22.324

Sumber: data primer (diolah)

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budidaya kelapa sawit telah menjadi strategi mata pencaharian yang penting bagi masyarakat pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil penelitian menjelaskan berbagai permasalahan umum yang dihadapi pekebun swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Masalah rendahnya produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan berbagai faktor pembatas memerlukan peran dari pemerintah daerah, perbankan dan perusahaan swasta untuk mengatasinya.

REKOMENDASI

Beberapa strategi yang direkomendasikan untuk peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit swadaya di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. Mengubah pola pikir pekebun agar menggunakan bibit sawit unggul dan mengadopsi praktik budidaya sawit sesuai standar melalui pendampingan dari pihak penyuluh pertanian/perkebunan dan Dinas Perkebunan Kabupaten yang bekerjasama dengan perusahaan perkebunan swasta setempat sebagai salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*
2. Penyediaan program pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan oleh pihak perbankan,
3. Penguatan kelembagaan pekebun dengan membentuk kelompok atau koperasi pekebun yang didampingi oleh Dinas Koperasi Kabupaten.

Strategi tersebut diharapkan dapat menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pekebun swadaya Kab. Padang Lawas Utara di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, Made Oka and R.N. Suhaeti. 2003. Penerapan Indeks Gini Untuk Mengidentifikasi Tingkat Pemerataan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan di Wilayah Jawa dan Bali. *Jurnal SOCA (Socio-Economic of Agriculture)* 3(2) hal. 1-13.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2017. *Statistik Perkebunan*. Medan: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Ditjenbun. 2018. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Ditjenbun.

Euler, M., Hoffmann, M. P., Fathoni, Z., and Schwarze, S. 2016. Exploring yield gaps in smallholder oil palm production systems in eastern Sumatra, Indonesia. *Agricultural Systems*, 146, pp 111-119.

Lee, J. S. H., Ghazoul, J., Obidzinski, K., Koh, L.P. 2014. Oil palm smallholder yields and incomes constrained by harvesting practices and type of smallholder management in Indonesia. *Agronomy for Sustainable Development*, 34 (2) : 501-513. Springer.

Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S., Taylor, C., & Harms, J. 2013. *Diagnostic study on Indonesian oil palm smallholders: developing a better understanding of their performance and potential*. International Finance Corporation, World Bank Group.

Nasution, Z.P.S., Rizki Amalia, dan Teguh Wahyono. 2014. Analisis Efisiensi Pemasaran Tandan Buah Segar. Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit* 22(3) hal. 153-163.

Papenfus, M.M. 2002. Investing in Oil Palm : An Analysis of Independent Smallholder Oil Palm Adoption in Sumatera, Indonesia. *Southeast Asia Policy Research Paper Working Paper* No. 15. ICRAF. Bogor. Indonesia.

Purba, A.R., Z.P.S. Nasution, R. Amalia, and T. Wahyono. 2014. Profile of Sumatera Oil Palm Smallholders. *Proceeding IOPC 2014*. Bali Nusa Dua.

Vermeulen, Sonja and N. Goad. 2006. *Towards Better Practice in Smallholder Palm Oil Production*. London, United Kingdom: International Institute for Environment and Development.

Hasil Penelitian

STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR DI KOTA BINJAI

(A STUDY ON THE CAUSES OF DELAY IN THE COMPLETION OF INFRASTRUCTURE PROJECT IN BINJAI)

Suri Kencana, Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Syahrizal

Universitas Sumatera Utara
Jl. Perpustakaan No. 1 Kampus USU Medan
email: suri.kencana0903@gmail.com

Diterima: 19 Juli 2019; Direvisi: 22 Juli 2019; Disetujui: 29 Juli 2019

ABSTRAK

Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai setiap tahunnya menyiapkan anggaran untuk pembangunan kotanya melalui proyek-proyek konstruksi gedung dan infrastruktur. Seperti kota-kota lainnya di Indonesia, sekitar 60% sampai dengan 70% proyek konstruksi mengalami keterlambatan, begitu pula halnya di Kota Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mendapatkan pengetahuan terkait dengan penyebab keterlambatan yang sering terjadi pada pelaksanaan proyek-proyek konstruksi, menganalisis penyebab yang paling dominan, serta memberikan masukan/saran pencegahan keterlambatan di masa depan. Metode sampel acak strata proporsional menjadi teknik pengambilan sampel karena populasi yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner dengan penyebab keterlambatan proyek terangkum dalam 7 kategori dengan 35 variabel. Terdapat 15 proyek konstruksi yang menjadi objek penelitian dengan 32 responden di mana dari pihak pemilik proyek (owner) sebanyak 15 responden, pihak pelaksana proyek (kontraktor) sebanyak 12 responden dan konsultan supervisi sebanyak 5 responden. Harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat menjadi hal terpenting/dominan yang perlu diperhatikan dengan persentase sebesar 42%. Terdapat beda pendapat antara pemilik proyek (owner) yang menyatakan bahwa gangguan keamanan selama proyek berlangsung yang menjadi penyebab keterlambatan. Sedangkan kontraktor/konsultan supervisi menyatakan harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat tersebut yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi gedung dan infrastruktur di Kota Binjai. Perencanaan yang baik, detail dan matang sesuai dengan kebutuhan serta mudah dipahami dan diaplikasikan di lapangan sehingga diperoleh konstruksi yang tepat dengan biaya yang ekonomis menjadi masukan/saran responden yang paling diharapkan sehingga di masa depan proyek konstruksi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.

Kata kunci: penyebab keterlambatan, proyek konstruksi, Indeks Kepentingan

ABSTRACT

Binjai Municipality, through the Public Works and Layout Agency of Binjai, prepares its budget each year to town development through building and infrastructure construction projects. As what happens in other towns in Indonesia, about 60% until 70% of construction projects at Binjai undergo lateness. The objective of the research is to study and find out the causes of lateness which usually occurs in implementing construction projects, to analyze the most dominant cause, to give input/suggestions of how to prevent the lateness in the future. Since the population was not homogenous, the samples were taken by using proportional stratum random sampling technique. The data were gathered by using questionnaires on the causes of lateness in 7 categories and 35 variables. There were 15 construction projects with 32 respondents with 15 respondents as the project owners, 12 respondents as the constructors, and 5 respondents as the supervisors/consultants. The price of construction materials which are rapidly increasing with the percentage of 42% should be heeded. According to the project owners, the lateness is caused by disturbance of the peace. The contractors argue that it is caused by the price of materials which is rapidly increasing. Good and mature planning should be in accordance with the needs and should

be able to be understood and applied in the field in order to get accurate construction with cheap financing so that in the future construction projects can be completed punctually according to what has been planned.

Keywords: causes of lateness, construction projects, Interest Index

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai setiap tahunnya menyiapkan anggaran untuk pembangunan kotanya melalui proyek-proyek konstruksi gedung dan infrastruktur lainnya. Pembangunan proyek konstruksi terus dikembangkan agar tercipta fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi jika melihat fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak proyek konstruksi yang mengalami permasalahan keterlambatan penyelesaian. Proyek konstruksi yang terlambat dalam penyelesaiannya merupakan masalah yang sangat tidak diharapkan baik bagi pemilik proyek (*owner*) maupun pelaksana proyek (kontraktor). Seperti kota-kota lainnya di Indonesia, sekitar 60% sampai dengan 70% proyek konstruksi mengalami keterlambatan.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mempelajari dan mendapatkan pengetahuan terkait dengan penyebab keterlambatan yang sering terjadi pada pelaksanaan proyek-proyek konstruksi. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis berapa banyak faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek di wilayah Pemerintah Kota Binjai; 2) Menganalisis berapa besar persentase urutan tertinggi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi gedung dan infrastruktur di Kota Binjai berdasarkan indeks frekuensi (F_i) dan indeks pengaruh (S_i) secara garis besar; 3) Menganalisis faktor yang paling signifikan sebagai penyebab keterlambatan penyelesaian proyek berdasarkan indeks kepentingan (I_i) dan besar persentasenya; dan, 4) Menganalisis *ranking* tertinggi untuk masukan/saran yang paling penting dan besar persentasenya.

Pada penelitian ini proyek yang menjadi objek penelitian adalah proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan membuat suatu bangunan yang umumnya mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan teknik arsitektur (Ismael, 2013).

METODE

Vaulzan (2012) menerangkan bahwa dalam menentukan strategi penelitian perlu diperhatikan tipe pertanyaan yang diajukan seperti pada Tabel 1. Analisis indeks frekuensi atau yang lebih dikenal dengan *frequency index* (F_i) adalah suatu tingkat kemunculan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Untuk mendapatkan hasil perhitungan dari nilai indeks frekuensi digunakan suatu formula yang ditunjukkan pada Persamaan 1.

Sedangkan analisis indeks pengaruh atau yang lebih dikenal dengan *severity index* (S_i) adalah suatu tingkatan dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing faktor risiko dan menyebabkan ketidاكلancaran kerja proyek. Untuk mendapatkan hasil perhitungan dari nilai indeks pengaruh digunakan suatu formula yang ditunjukkan pada Persamaan 2.

Alavifar, dkk. (2014) dan Khattri, dkk. (2016) juga menggunakan formula pada Persamaan 1 dan Persamaan 2 sebagai berikut:

$$F_i (\%) = \sum_{i=1}^5 \frac{(a_i * n_i)}{N} \times \frac{100}{5} \quad (1)$$

$$S_i (\%) = \sum_{i=1}^5 \frac{(b_i * n_i)}{N} \times \frac{100}{5} \quad (2)$$

Keterangan:

F_i : indeks frekuensi dalam satuan (%)

S_i : indeks pengaruh dalam satuan (%)

i : indeks kategori respon (1, 2, 3, 4, dan 5)

a_i dan b_i : bobot sesuai dengan nilai respon

n_i : frekuensi dari respon

N : total jumlah responden

100 : faktor perkalian untuk mendapatkan nilai persentase (maksimum 100%)

5 : skala pengukuran (skala ordinal).

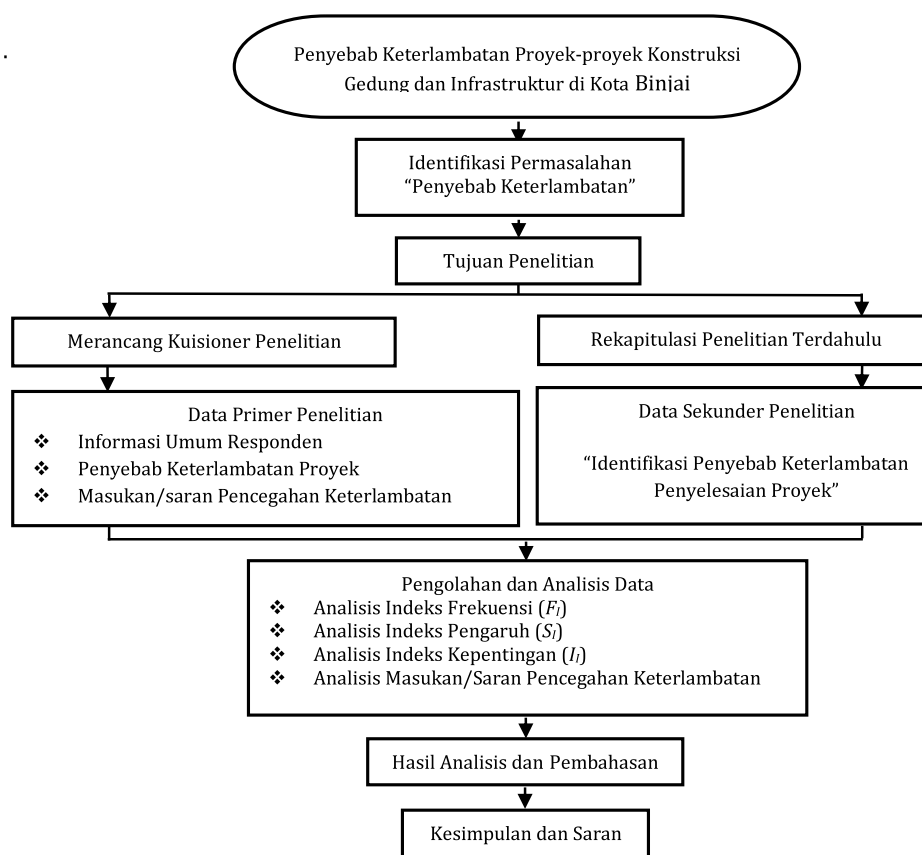
Analisis indeks kepentingan atau yang lebih dikenal dengan *importance index* (I_i) merupakan hasil dari perkalian antara indeks frekuensi (F_i) dengan indeks pengaruh (S_i) untuk menunjukkan faktor yang paling sering terjadi dan yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan. Untuk mendapatkan hasil perhitungan dari nilai indeks kepentingan digunakan suatu formula yang ditunjukkan pada Persamaan 3.

$$I_i (\%) = \frac{F_i (100\%) \times S_i (100\%)}{100} \quad (3)$$

Tabel 1. Strategi Penelitian

Strategi	Tipe Pertanyaan Penelitian
Eksperimen	Bagaimana, Mengapa
Survei	Siapa, Apa, Dimana, Berapa Banyak
Analisa Arsip	Siapa, Apa, Dimana, Berapa Banyak
Historis	Bagaimana, Mengapa
Studi Kasus	Bagaimana, Mengapa

Sumber: Vaulzan (2012)



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penyebaran kuisisioner dilakukan pada 15 proyek di Kota Binjai yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Total kuisisioner yang disebarkan adalah untuk 32 responden. Adapun faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek di wilayah Pemerintah Kota Binjai terbagi atas 7 kategori dengan 35 variabel. Data profil proyek perlu dijelaskan pada penelitian ini sehingga diketahui bahwa benar kuisisioner disebarkan pada proyek-proyek konstruksi

yaitu proyek konstruksi gedung dan infrastruktur. Proyek Infrastruktur dalam hal ini diwakili oleh proyek jalan/jembatan dan perpipaan, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Selain jenis konstruksi, data proyek pada penelitian ini juga harus diperkuat dengan data keterlambatan proyek. Sebagai bukti kebenarannya maka dapat ditunjukkan melalui data hasil kuisisioner bahwa benar terjadi keterlambatan pada proyek-proyek konstruksi yang menjadi

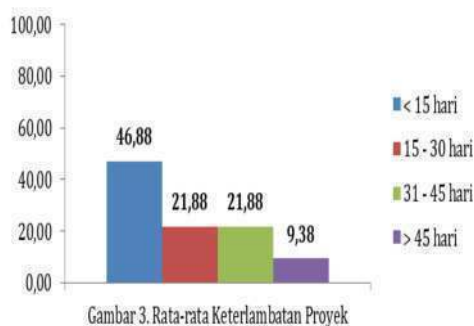
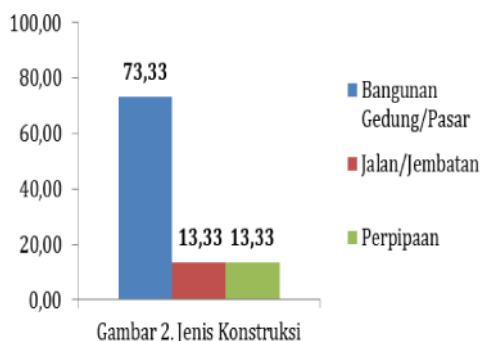
objek penelitian ini dan dapat dilihat pada Gambar 3.

Hasil jawaban responden dianalisis guna mendapatkan indeks frekuensi (F_i) dan indeks pengaruh (S_i). Analisis dilakukan dengan menggunakan formula yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhitungan dilakukan berdasarkan data hasil kuisioner secara umum dan juga melihat dari pendapat pemilik proyek (*owner*) dan kontraktor/konsultan supervisi. Dari hasil analisis tersebut diperoleh 5 *ranking* tertinggi untuk indeks frekuensi (F_i) penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi gedung dan infrastruktur di Kota Binjai seperti terlihat pada Tabel 2.

Berdasarkan pendapat pemilik proyek (*owner*) ternyata memiliki kesamaan

dengan pendapat responden secara umum bahwa gangguan keamanan selama proyek berlangsung menjadi penyebab keterlambatan yang paling sering terjadi. Sedangkan kontraktor/supervisi memiliki pendapat berbeda di mana harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat menjadi penyebab keterlambatan yang paling sering terjadi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Analisis indeks pengaruh (S_i) penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi juga mendapatkan *ranking* dalam pengolahan datanya dan diperoleh 5 *ranking* tertinggi untuk indeks pengaruh (S_i) seperti terlihat pada Tabel 4.



Tabel 2. *Ranking* Tertinggi Indeks Frekuensi (F_i)

Tingkat Frekuensi	Σi					N	$\Sigma (a_i * n_i)$	$F_i (\%) = \frac{\Sigma_{i=1}^5 (a_i * n_i)}{N} \times \frac{100}{5}$	Rank
	1	2	3	4	5				
Kesalahan dalam dokumen perencanaan	1	9	15	6	1	32	93	58,13	5
Ketidaksesuaian antara penggambaran dengan representasi di lapangan	1	6	15	9	1	32	99	61,88	3
Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat	1	7	11	12	1	32	101	63,13	2
Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	2	4	17	9	0	32	97	60,63	4
Gangguan keamanan selama proyek berlangsung	2	7	8	12	3	32	103	64,38	1

Berikut adalah contoh perhitungan indeks frekuensi pada *ranking* tertinggi:

$$\text{Jika: } \sum_{i=1}^5 (a_i * n_i) = (1*2)+(2*7)+(3*8)+(4*12)+(5*3) = 103$$

$$\text{Maka: } F_i (\%) = \sum_{i=1}^5 \frac{(a_i * n_i)}{N} \times \frac{100}{5} = \frac{103}{32} \times \frac{100}{5} = 64,38\%$$

Tabel 3. Perbandingan *Ranking* Tertinggi Indeks Frekuensi (F_i)

No	Umum	Pemilik Proyek (owner)	Kontraktor/Konsultan Supervisi
1	Gangguan keamanan selama proyek berlangsung	Gangguan keamanan selama proyek berlangsung	Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat
2	Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat	Kesalahan dalam dokumen perencanaan	Ketidaksesuaian antara penggambaran dengan representasi di lapangan
3	Ketidaksesuaian antara penggambaran dengan representasi di lapangan	Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat	Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)
4	Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	Gangguan keamanan selama proyek berlangsung
5	Kesalahan dalam dokumen perencanaan	Ketidaksesuaian antara penggambaran dengan representasi di lapangan	Kondisi alam yang berbeda dari saat survey

Tabel 4. *Ranking* Tertinggi Indeks Pengaruh (S_i)

Besar Pengaruh	$\sum i$					N	$\sum (b_i * n_i)$	$S_i (\%) = \sum_{i=1}^5 \frac{(b_i * n_i)}{N} \times \frac{100}{5}$	Rank
	1	2	3	4	5				
Estimasi durasi kontrak terlalu cepat/pendek	4	3	9	10	6	32	107	66,88	4
Kesalahan dalam dokumen perencanaan	4	3	9	5	11	32	112	70,00	2
Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat	2	3	13	10	4	32	107	66,88	5
Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	3	3	10	10	6	32	109	68,13	3
Kesulitan aliran kas keuangan dan pendanaan proyek dari kontraktor	2	6	6	10	8	32	112	70,00	1

Berikut adalah contoh perhitungan indeks pengaruh pada *ranking* tertinggi:

$$\text{Jika: } \sum_{i=1}^5 (b_i * n_i) = (1*2)+(2*6)+(3*6)+(4*10)+(5*8) = 112$$

$$\text{Maka: } S_i (\%) = \sum_{i=1}^5 \frac{(b_i * n_i)}{N} \times \frac{100}{5} = \frac{112}{32} \times \frac{100}{5} = 70\%$$

Melalui pendapat pemilik proyek (*owner*) mengenai penyebab keterlambatan yang paling berpengaruh pada proyek konstruksi di Kota Binjai ternyata masih juga memiliki kesamaan dengan pendapat responden secara umum yaitu kesulitan aliran kas keuangan dan pendanaan proyek dari kontraktor. Sedangkan kontraktor/supervisi masih berpendapat bahwa harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat tidak hanya menjadi penyebab keterlambatan yang paling sering terjadi tapi juga menjadi penyebab keterlambatan yang paling berpengaruh dan dapat dilihat pada Tabel 5.

Analisis dan perhitungang indeks kepentingan (*I_i*) juga memperhatikan hasil

indeks frekuensi (*F_i*) dan indeks pengaruh (*S_i*) baik dari sudut pandang responden secara umum maupun dari sudut pandang pemilik proyek (*owner*) dan kontraktor/konsultan supervisi. Dari hasil analisis dan perhitungan indeks kepentingan (*I_i*) tersebut diperoleh 5 *ranking* tertinggi yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek yang paling penting untuk diperhatikan adalah seperti pada Tabel 6.

Terdapat perbedaan pendapat antara pemilik proyek (*owner*) dan kontraktor/supervisi terhadap faktor penyebab keterlambatan yang paling dominan/penting untuk diperhatikan seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 5. Perbandingan *Ranking* Tertinggi Indeks Pengaruh (*S_i*)

No	Umum	Pemilik Proyek (<i>owner</i>)	Kontraktor/Konsultan Supervisi
1	Kesulitan aliran kas keuangan dan pendanaan proyek dari kontraktor	Kesulitan aliran kas keuangan dan pendanaan proyek dari kontraktor	Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat
2	Kesalahan dalam dokumen perencanaan	Kesalahan dalam dokumen perencanaan	Kesalahan dalam dokumen perencanaan
3	Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	Kesulitan aliran kas keuangan dan pendanaan proyek dari kontraktor
4	Estimasi durasi kontrak terlalu cepat/pendek	Ketidakmampuan sub-kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan	Terlambat menyetujui gambar kerja dan contoh material yang diajukan
5	Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat	Gangguan keamanan selama proyek berlangsung	Keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan untuk konstruksi

Berikut adalah contoh perhitungan indeks kepentingan pada *ranking* tertinggi:

$$\text{Jika: } F_i = 63,13\% \text{ dan } S_i = 66,88\%$$

$$\text{Maka: } I_i (\%) = \frac{F_i (100\%) \times S_i (100\%)}{100} = \frac{63,13 \times 66,88}{100} = 42,21\%$$

Tabel 6. *Ranking* Tertinggi Indeks Kepentingan (I_i)

Tingkat Kepentingan	Indeks Frekuensi (F_i)	Indeks Pengaruh (S_i)	Indeks Kepentingan (I_i)	Rank
Kesalahan dalam dokumen perencanaan	58,13	70,00	40,69	4
Ketidaksesuaian antara penggambaran dengan representasi di lapangan	61,88	65,00	40,22	5
Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat	63,13	66,88	42,21	1
Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	60,63	68,13	41,30	3
Gangguan keamanan selama proyek berlangsung	64,38	65,00	41,84	2

Tabel 7. Perbandingan *Ranking* Tertinggi Indeks Kepentingan (I_i)

No	Umum	Pemilik Proyek (owner)	Kontraktor/Konsultan Supervisi
1	Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat	Gangguan keamanan selama proyek berlangsung	Harga barang-barang konstruksi secara berkesinambungan terus meningkat
2	Gangguan keamanan selama proyek berlangsung	Kesalahan dalam dokumen perencanaan	Ketidaksesuaian antara penggambaran dengan representasi di lapangan
3	Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)	Cuaca buruk di sekitar lokasi proyek (hujan deras/banjir/bencana alam)
4	Kesalahan dalam dokumen perencanaan	Kesulitan aliran kas keuangan dan pendanaan proyek dari kontraktor	Kondisi alam yang berbeda dari saat survey
5	Ketidaksesuaian antara penggambaran dengan representasi di lapangan	Estimasi durasi kontrak terlalu cepat/pendek	Kesalahan dalam dokumen perencanaan

Harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat menjadi hal terpenting/dominan yang perlu diperhatikan karena berdasarkan analisis hal tersebut menjadi *ranking* pertama terpenting/dominan penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi gedung dan infrastruktur di Kota Binjai dengan persentase sebesar 42%.

Menurut pemilik proyek (*owner*) bahwa gangguan keamanan selama proyek berlangsung yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi di Kota Binjai. Sedangkan kontraktor/konsultan supervisi memiliki pendapat yang berbeda dan menyatakan harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat

tersebut yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi gedung dan infrastruktur di Kota Binjai.

Meskipun terdapat perbedaan dalam *ranking*, secara garis besar penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi gedung dan infrastruktur di Kota Binjai tidak terlepas dari harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat, gangguan keamanan selama proyek berlangsung serta kesulitan aliran kas keuangan dan pendanaan proyek dari kontraktor.

Pada data hasil kuisioner terdapat juga masukan/saran tentang cara pencegahan keterlambatan penyelesaian proyek

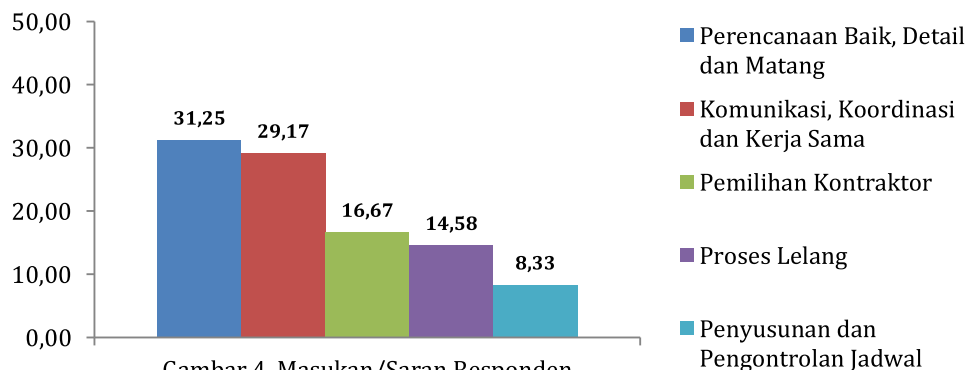
berdasarkan pandangan dan pengalaman dari masing-masing responden. Dari masukan/saran yang dirincikan terdapat 76 masukan/saran responden terhadap cara pencegahan keterlambatan proyek dan setelah dianalisis ternyata secara garis besar beberapa responden memiliki pandangan yang sama. Untuk itu dilakukan rekapitulasi terhadap masukan/saran

tersebut sehingga dihasilkan 22 masukan/saran yang padat dan berbeda.

Jika diambil 5 *ranking* tertinggi saja dan mengabaikan yang lainnya maka besar persentase untuk masing-masing masukan/saran tersebut seperti pada Tabel 8. Jika dituangkan dalam gambar grafik seperti pada Gambar 4.

Tabel 8. Ranking Tertinggi Masukan/Saran Responden

No	Rekapitulasi Masukan/Saran Pencegahan Keterlambatan Proyek	Jumlah Responden dengan Masukan/Saran yang Sama	Persentase	Rank
1	Perencanaan yang baik, detail dan matang sesuai dengan kebutuhan serta mudah dipahami dan diaplikasikan di lapangan sehingga diperoleh konstruksi yang tepat dengan biaya yang ekonomis	15	31,25	1
2	Pemilihan kontraktor yang transparan, berintegritas dan mampu secara finansial juga keahlian dengan memenuhi 5 M (Man Power, Management, Money, Material dan Minit)	8	16,67	3
3	Penyusunan dan pengontrolan jadwal pelaksanaan dengan efektif dan harus memperhitungkan kondisi alam/lingkungan	4	8,33	5
4	Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antar <i>stake holder</i> dan semua pihak terkait	14	29,17	2
5	Proses lelang harus dipercepat, cermat dan tidak terburu-buru sehingga waktu pelaksanaan relatif panjang dan lebih memadai	7	14,58	4



Perencanaan yang baik, detail dan matang sesuai dengan kebutuhan serta

mudah dipahami dan diaplikasikan di lapangan sehingga diperoleh konstruksi

yang tepat dengan biaya yang ekonomis menjadi masukan/saran responden yang paling diharapkan dengan persentase sebesar 31% dan perlu mendapatkan perhatian guna meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kembali keterlambatan pada penyelesaian proyek konstruksi gedung dan infrastruktur di Kota Binjai.

KESIMPULAN

Faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek di wilayah Pemerintah Kota Binjai dapat dibagi atas 7 kategori dengan total 35 variabel. Secara garis besar urutan tertinggi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi gedung dan infrastruktur di Kota Binjai dapat diuraikan berdasarkan indeks frekuensi (F_i) dan indeks pengaruh (S_i) sebagai berikut: a) Gangguan keamanan selama proyek berlangsung dengan indeks frekuensi (F_i) sebesar 64%; b) Kesulitan aliran kas keuangan dan pendanaan proyek dari kontraktor dengan indeks pengaruh (S_i) sebesar 70%. Karena indeks kepentingan (I_i) menggambarkan faktor kombinasi dari indeks frekuensi (F_i) dan indeks pengaruh (S_i), maka harga barang-barang konstruksi yang secara berkesinambungan terus meningkat menjadi faktor yang paling signifikan sebagai penyebab keterlambatan penyelesaian proyek dengan persentase 42%. Perencanaan yang baik, detail dan matang sesuai dengan kebutuhan serta mudah dipahami dan diaplikasikan di lapangan menjadi masukan/saran terpenting dengan *ranking* tertinggi dengan persentase 31%.

REKOMENDASI

Untuk perbaikan di masa depan dapat diberikan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian sejenis dapat dilakukan untuk proyek konstruksi yang berbeda di kota yang berbeda di Indonesia dengan metode yang berbeda pula.
2. Penelitian ini dapat ditingkatkan dengan menganalisis keputusan yang tepat dalam mengatasi keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi.
3. Penelitian juga dapat dilakukan dengan mengevaluasi pengaruh tim peneliti kontrak terhadap keterlambatan proyek konstruksi.
4. Penelitian menganalisis proses lelang dalam upaya pencegahan

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. R., Rahman, I. A., Azis, A. A. A. 2010. Causes of Delay in MARA Management Procurement Construction Projects. *Journal of Surveying, Construction & Property*.

Afshari, H., Khosravi, S., Gorbanali, A., Borzabadi, M., Valipour, M. 2011. *Identification of Causes of Non-excusable Delays of Construction Projects*. International Conference on E-business, Management and Economics, Hong Kong.

Alavifar, A. H., Motamedi, S. 2014, *Identification, Evaluation and Classification of Time Delay Risks of Construction Project in Iran*, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.

Al Hammadi, S., Nawab, M. S. 2014. Study of Delay Factors in Construction Projects. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*.

Arikunto, S. 2010. "Prosedur Penelitian – Pendekatan Praktik". Jakarta: Rineka Cipta,

Azhari, Aulia T. B., Majid, I. A. 2014. Faktor-faktor Risiko yang Mempengaruhi Kinerja Kontraktor pada Pelaksanaan Proyek Infrastruktur di Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*.

Aziz, A. M., Marthen, R. W., Dianita, R. K., Hartono, N. 2016. Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan Progress Terkait dengan Manajemen Waktu (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Gedung UPT PP Politeknik Negeri Semarang. *Wahana Teknik Sipil*.

Aziz, R. F. 2013. Ranking of Delay Factors in Construction Projects After Egyptian Revolution. *Alexandria Engineering Journal*.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Binjai Dalam Angka Tahun 2017. Kota Binjai: BPS Kota Binjai

Haseeb, M., Xinhai-Lu, Bibi, A., Maloof-ud-Dyia, Rabbani, W. 2011. Problems of Projects and Effects of Delays in the Construction Industry of Pakistan. *Australian Journal of Business and Management Research*.

Heryanto, I., dan Triwibowo, T. 2013. *Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: Penerbit Informatika,.

Hossen, M. M., Kang, S., Kim, J. 2015. *Construction Schedule Delay Risk Assessment by Using Combined AHP-RII Methodology for An International NPP*

Project. South Korea: KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS).

Ibironke, O. T., Oladinrin, T. O., Adeniyi, O., Eboime, I. V. 2013. Analysis of Non-Excusable Delay Factors Influencing Contractors' Performance in Lagos State, Nigeria. *Journal of Construction in Developing Countries*.

Ismael, I. 2013. Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Faktor Penyebab Keterlambatan dan Tindakan Pencegahannya. *Jurnal Momentum, Institut Teknologi Padang*.

James, O. D., Lekan, A. M., Oloke, C. O., Olusanya, O., Olayeni, T. P., Dele, O., Joy, P., Ignatious, O. 2014. Causes and Effect of Delay on Project Construction Delivery Time. *International Journal of Education and Research*.

Khattari, T., Agarwal, S., Gupta, V., Pandey, M. 2016. Critical Causes of Delay in Construction Project in Jhansi Region. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*.

Mali, L., Warudkar, A. A. 2016. Causes of Delay in the Constructions Industry in Pune Region of India. *International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM)*.

Messah, Y. A., Widodo, T., Adoe, M. L. 2013. Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*.

Mohammed, K. A., Isah, A. B. D. 2012. Causes of Delay in Nigeria Construction Industry. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*.

Mukuka, M., Aigbavboa, C. O., Thwala, W. D. 2014. *Contructions Professionals' Perception on the Causes and Effect of Projects of Project Delay in Lusaka, Zambia*, South Africa: Department of Construction Management & Quantity Surveying, University of Johannesburg.

Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pinori, M., Sompie, B. F., Willar, D. 2015. Analisis Faktor Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi Gedung Terhadap Mutu, Biaya dan Waktu di Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*.

Puruhita, H. W., Suprpto, M., As'ad, S. 2014. Evaluasi Penyebab Keterlambatan Dalam Penyelesaian Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Rosalia Indah Group). *Jurnal Magister Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret - Surakarta*.

Ronald, M. A. S., Firmansyah, I. 2014. Rekomendasi Hasil Analisis Waktu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Pemerintah di Lingkungan Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*.

Subroto. 2015. "Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Swasta di Bidang Konstruksi pada Kota Medan", Tesis Program Magister Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Sulaiman, M., Munirwansyah, Azmeri. 2017. Analisis Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Ditinjau Dari Waktu Pelaksanaan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala - Banda Aceh*.

Suyatno. 2010. "Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung (Aplikasi Model Regresi)", Tesis Program Magister Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Vaulzan, M. 2012. *Analisa Faktor Risiko Interface pada Tahap Desain Rekayasa untuk Mengatasi Keterlambatan pada PT. XYZ dengan Menggunakan Regresi Linier Berganda dan Simulasi Monte Carlo*, Tesis Program Pascasarjana - Universitas Indonesia.

Wirabakti, D. M., Abdullah, R., Maddeppungeng, A. 2014. Studi Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. *Jurnal Konstruksi*.

Hasil Penelitian

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KETERPAPARAN MEDIA DENGAN TINGKAT PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

(ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA EXPOSURE LEVELS WITH KNOWLEDGE LEVEL OF TEENAGER SEXUAL REPRODUCTIVE HEALTH IN SUMATERA UTARA PROVINCE)

Windo Harjoin Sidabutar, Muhammad Ancha Sitorus*, Widia Gustiasari***

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara
Jl. Gunung Krakatau No. 110 Medan
email: harjoin09@yahoo.co.id

Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. Mansyur No. 1 Medan

Diterima: 23 Januari 2019; Direvisi: 18 Maret 2019; Disetujui: 27 Mei 2019

ABSTRAK

Masa remaja merupakan masa yang berbeda dengan masa anak-anak, baik secara fisik maupun secara mental. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membatasi usia remaja pada laki-laki dan perempuan dengan kisaran usia 15-24 tahun dan belum menikah. Pada rentang usia ini, perubahan secara fisik bagi remaja laki-laki ditandai dengan adanya perubahan suara, adanya jakun dan perubahan fisik perempuan dengan mulai tumbuhnya payudara serta terdapat perkembangan organ reproduksi secara maksimal. Informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja perlu diketahui mengingat perubahan yang dialami remaja sebagai bekal untuk menghadapi perubahan-perubahan agar tidak menjadi bumerang. Berbagai media baik melalui media massa maupun tokoh-tokoh tertentu dikembangkan sebagai alat penyampai informasi. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk menemukan bagaimana hubungan keterpaparan media dengan pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Sumatera Utara. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data hasil Survei RPJMN yang dilaksanakan pada Tahun 2017. Adapun sampel dalam survei ini adalah laki-laki dan perempuan berusia 15-24 tahun dan belum menikah yang ditemukan pada keluarga yang terpilih. Secara khusus data yang dimanfaatkan dalam analisis ini adalah data tentang keterpaparan media dan data pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di Sumatera Utara. Terdapat 1120 orang remaja mengisi seluruh kuesioner remaja sampai selesai dan hasil penjumlahan skor masing-masing responden dikategorikan ke dalam dua kategori dan dilakukan uji silang dengan menampilkan hasil Uji Chi Square. Berdasarkan hasil analisa silang dapat dilihat dari 131 responden yang terpapar berat mengenai informasi KRR, 60 orang (45,8%) di antaranya memiliki tingkat pengetahuan KRR yang baik dan 71 orang (54,2%) memiliki tingkat pengetahuan KRR yang rendah. Sementara dari 989 orang responden yang terpapar lebih sedikit informasi KRR, 204 orang (20,6%) diantaranya memiliki tingkat pengetahuan KRR baik dan 785 orang (79,4%) diantaranya memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Hasil chi-square test, menunjukkan angka keterhubungan sebesar 0,000 dimana angka ini lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tingkat keterpaparan informasi KRR memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengetahuan KRR remaja di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: kesehatan reproduksi remaja, media informasi, pengetahuan, Sumatera Utara

ABSTRACT

Teens age period is a different period from childhood, both physically and mentally. State Ministry for National Population and Family Planning (BKKBN) restricts teenagers to men and women between the ages of 15-24 and unmarried. In this age, physical changes of teenager for men are marked by changes in sound, the presence of Adam's apple and the physical changes of women are marked by breast growth and reproductive organs growth to the maximum. Information about

teenager sexual reproductive health needs to be known as a shield to deal with changes so that they do not backfire. Various media both through mass media and certain figures were developed as information delivery tools. This analysis was carried out aimed at finding out how the relationship between media exposure level and knowledge level of Teenager Sexual Reproductive Health in North Sumatra Province. The analysis was carried out by utilizing data from the RPJMN Survey conducted in 2017. The samples in this survey were men and women aged 15-24 years and unmarried found in selected families. In particular the data used in this analysis are data on media exposure and data on teenager sexual reproductive health knowledge in North Sumatra. There were 1120 teenagers complete all teenager questionnaires and the sum of the scores of each respondent were categorized into two categories and cross-examination was carried out by displaying the results of the Chi Square Test. Based on the results of cross-analysis can be seen from 131 respondents who were heavily exposed to KRR information, 60 people (45.8%) of whom had a good level of knowledge of KRR and 71 people (54.2%) had a low level of knowledge of KRR. While of the 989 respondents who were exposed to less information on KRR, 204 people (20.6%) of them had a good level of knowledge of KRR and 785 people (79.4%) of whom had a lack of knowledge. The results of the chi-square test show that the connection number is 0,000 where this number is less than 0.05, so it is concluded that the level of media exposure to the KRR information has a significant relationship with the level of KRR knowledge in Sumatra Utara Province.

Keywords: *teenager sexual reproductive health, media information, knowledge, Sumatera Utara*

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kepada kedewasaan. Jika pada masa kanak-kanak didominasi dengan proses meniru perilaku orang lain, maka masa remaja merupakan masa bagi remaja untuk mencari dan menentukan jati diri secara mandiri. Beberapa perubahan baik secara fisik maupun mental sangat mempengaruhi cara remaja bersikap dan memandang dunia luar. Perubahan secara fisik bagi remaja laki-laki ditandai dengan adanya perubahan suara, adanya jakun dan perubahan fisik perempuan dengan mulai tumbuhnya payudara. Sedangkan perubahan non fisik meliputi kelabilan emosi, perkembangan jiwa, dan pembentukan karakter yang sering ditemui dari gejala yang ditunjukkan dalam perilakunya. Seluruh perubahan ini memunculkan suatu dorongan yang kuat untuk terlepas dari ketergantungan dengan orang tua, keinginan dihargai sebagai orang dewasa dan mempunyai hak terhadap dirinya dalam berkeputusan serta bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya.

Wibowo (2004) mengungkapkan bahwa remaja mempunyai rasa ingin tahu yang besar, namun remaja justru kurang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Sebagai bentuk rasa keingintahuannya, maka remaja mencari informasi sebanyak-banyaknya. Remaja seringkali merasa tidak nyaman atau tabu untuk membicarakan masalah seksualitas dan kesehatan reproduksinya. Akan tetapi karena faktor keingintahuannya, mereka akan berusaha untuk mendapatkan informasi ini. Seringkali remaja merasa bahwa orang tuanya menolak membicarakan masalah seks sehingga mereka kemudian mencari alternatif sumber informasi lain seperti teman atau media massa.

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Tujuan penggunaan media bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut berikut (Bungin, 2001): 1) Kognitif yakni media massa dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang; 2) Afektif yakni media massa dapat mengubah emosi dan perasaan sehingga dapat membentuk sikap masyarakat; dan, 3) Perilaku yakni tindakan nyata.

Media memegang peran penting dalam penyebaran informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. Berdasarkan Survey Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017 menunjukkan bahwa dalam lingkup nasional, sumber informasi KRR bagi remaja adalah media elektronik khususnya televisi sebesar 92,2% sementara yang mendapat paparan informasi melalui media luar ruang seperti spanduk, baliho dan lain-lain sebanyak 42,7% (BKKBN, 2017).

Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa remaja umur 15-19 tahun lebih suka berdiskusi/curhat mengenai masalah kesehatan reproduksi kepada teman sebayanya, dimanasebesar 57,1% laki-laki dan 57,6% perempuan berdiskusi/curhat mengenai kesehatan reproduksi dengan temannya. Sementara itu, remaja umur 15-19 tahun menyukai bilasumber informasi kesehatan reproduksi diperoleh dari teman sebaya (33,3% laki-laki dan 19,9% perempuan), guru (29,6% laki-laki dan 31,2% perempuan), ibu (12,7% laki-laki dan 40% perempuan), dan tenaga kesehatan (2,6% laki-laki dan 35,7% perempuan).

Jenis informasi yang sering diperoleh remaja adalah bahaya penyalahgunaan NAPZA, bahayaminum minuman beralkohol dan tentang HIV-AIDS termasuk penggunaan kondom untuk

pengecahan penularannya (PKPR, 2014). Selain HIV-AIDS terdapat beberapa aspek yang menjadi komponennya.

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi. Sementara Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural (Rostina, 2008).

Adapun komponen kesehatan reproduksi remaja dapat dipaparkan adalah organ reproduksi yakni bagian tubuh yang berfungsi untuk melanjutkan keturunan. Organ reproduksi pada wanita meliputi indung telur (ovarium), umbai-umbai (fimbriae), saluran telur (tuba falopi), rahim (uterus), leher rahim (serviks), liang kemaluan (vagina), bibir kelamin (labia). Organ reproduksi pada laki-laki meliputi batang zakar (penis), saluran kencing (uretra), kantong pelir (skrotum), epididimis, saluran sperma dan kelenjar prostat. Komponen selanjutnya adalah menstruasi atau haid yakni proses keluarnya cairan bercampur darah dari vagina perempuan. Cairan ini berasal dari dinding rahim perempuan yang luruh. Menstruasi kadang-kadang disertai rasa sakit/ mules, bau badan, emosi, dll. Pada waktu haid, pakailah pembalut, yang harus sering diganti (sekitar 4 jam sekali) & cuci vagina dengan bersih (Moeliono, 2003).

Mimpi basah merupakan komponen selanjutnya dimana yang terjadi dengan keluarnya air mani disebut ejakulasi. Karena sering terjadi pada waktu tidur inilah, maka keluarnya air mani disebut sebagai mimpi basah. Kehamilan pada remaja juga merupakan salah satu komponen kesehatan reproduksi remaja, dimana hanya dengan satu kali hubungan seks saja dapat mengakibatkan kehamilan yang tak diharapkan dan atau penyakit.

Kehamilan bisa terjadi karena organ reproduksi sudah matang, tetapi tidak berarti remaja siap secara fisik, mental dan sosial untuk mengandung, melahirkan, dan mengasuh bayi dan akan banyak persoalan muncul (Moeliono, 2003). Onani atau masturbasi yakni aktivitas menyentuh atau meraba bagian tubuh dengan tujuan untuk merangsang secara seksual dirinya sendiri. Aktivitas ini dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

Penyakit seksual menular juga merupakan salah satu penting dimana hubungan seks satu kali saja juga bisa menularkan penyakit bila dilakukan dengan orang yang sudah tertular salah satu penyakit. sebagaimana disebutkan

sebelumnya, HIV/ AIDS merupakan komponen penting dalam kesehatan reproduksi mengingat kasus yang terjadi sangat banyak. HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Defficiency Syndrome) adalah virus yang merusak kekebalan tubuh. AIDS kumpulan gejala penyakit karena infeksi yang memperlemah sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan hanya melalui cairan tubuh orang yang sudah terinfeksi melalui cairan dari vagina/sperma dan cairan darah (transfusi, jarum suntik) (Moeliono, 2003).

Menurut Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2012 remaja di Indonesia mendapat informasi dari televisi untuk remaja perempuan 92,60% dan remaja laki-laki 72,90%. Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2012 menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan remaja tahun 2007 tentang kesehatan reproduksi masih rendah diantaranya remaja yang tidak mengetahui tentang hari-hari masa subur sebesar 37,9%, remaja yang menyatakan tidak tahu tentang sekali hubungan seksual dapat hamil sebanyak 49,3%, sedangkan 43,4% tidak pernah mendengar tentang penyakit menular seksual. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi maka dapat menjerumuskan remaja menuju perilaku seks bebas yang dapat menyebabkan penularan penyakit menular seksual dan HIV/ AIDS (SKRRI, 2012).

Penelitian sejenis dari Winarni (2006) dengan judul Hubungan Sumber-Sumber Informasi dengan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi di SMUN 1 Jetis Bantul Yogyakarta didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan sumber-sumber informasi dengan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di SMUN 1 Jetis Bantul Yogyakarta.

Penelitian serupa dari Addisi Dyah Prasetyo Nastiti (2009) dengan judul Hubungan antara Banyaknya Media Massa dengan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada kelas X SMU Negeri 5 Madiun didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan banyaknya media massa dengan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada kelas X SMU Negeri 5 Madiun. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan penggunaan media massa dengan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja SMAN 8 Surakarta karena di SMA tersebut belum memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolahnya sehingga siswa lebih cenderung mengakses informasi dari media massa.

Mengingat media memiliki peran yang besar dalam meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, analisis ini dilakukan dengan

upaya untuk menemukan bagaimana hubungan keterpaparan media dengan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan hasil Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN Tahun 2017. Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN Tahun 2017 merupakan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN yang memberikan informasi tentang capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana (KB), dan Pembangunan Keluarga. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data tentang keterpaparan media dan data pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di Sumatera Utara pada tahun 2017.

Penelitian ini adalah penelitian korelasional yang dilakukan dengan analisis hubungan dengan tujuan untuk menemukan apakah terdapat atau tidak terdapat hubungan antara tingkat keterpaparan media dengan tingkat pengetahuan KRR pada remaja di Provinsi Sumatera Utara. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja pria dan wanita berusia 15-24 tahun serta belum menikah pada saat Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN Tahun 2017.

Sampel adalah remaja pria dan wanita berusia 15-24 tahun serta belum menikah pada rumah tangga terpilih. Pemilihan rumah tangga dipilih dengan teknik *systematic random sampling* dimana kerangka sampelnya didata dengan menggunakan update data *real* pada saat survei. Terdapat 1120 orang remaja yang mengisi kuesioner dengan lengkap yang kemudian dianalisis pada tulisan ini.

Data univariat seperti umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, kuintil kekayaan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Analisis tabel silang dilakukan dengan mengelompokkan kategori keterpaparan media pada kategori terpapar ringan dan berat, kemudian pengetahuan reproduksi remaja dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni kategori tinggi dan rendah. Sebelum dilakukan pengelompokan data pada masing-masing kategori, data hasil survey di-*scoring* dengan memberikan nilai "1" pada setiap jawaban ya dan "0" pada jawaban tidak.

Hasil agregat pada keterpaparan media dan pengetahuan KRR tidak terdapat jumlah 0, maka dapat dibagi kedalam dua kategori dengan

membagi keduanya berdasarkan *mean*/rata-tata, artinya dari *mean* ke bawah dikategorikan pada tingkat keterpaparan media kategori ringan dan tingkat pengetahuan KRR kategori rendah dan sebaliknya agregat *mean* ke atas dikategorikan pada tingkat keterpaparan media kategori berat dan tingkat pengetahuan KRR kategori tinggi.

Hasil agregat yang sudah dikelompokkan disajikan dalam tabel silang sekaligus menguji hubungan diantara kedua variabel dengan Uji Chi Square. Berdasarkan hasil uji chi square, akan terlihat ada tidaknya hubungan di antara kedua variabel dimana jika hasil signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan terdapat hubungan namun jika lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan tidak terdapat hubungan di antara kedua variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (SRPJM) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilaksanakan pada Bulan Februari hingga Bulan Mei tahun 2017. Survey berskala nasional ini dilaksanakan pada 34 provinsi di Indonesia dan untuk Provinsi Sumatera Utara, survey ini dilaksanakan di 33 kabupaten/kota dengan jumlah lokus 78 klaster yang dipilih dengan mempertimbangkan weighting dan kuintil kekayaan. Tabel 1 di bawah memberikan gambaran karakteristik remaja yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pertanyaan pada kuesioner remaja adalah ditanyakan pada anak laki-laki dan perempuan anak kandung atau anak angkat yang terdapat pada keluarga terpilih yang memiliki usia pada kisaran 15-24 tahun dan juga belum menikah. terlihat bahwa 54,8 persen responden berjenis kelamin laki-laki dan 45,2 persen selebihnya memiliki jenis kelamin perempuan. Pada tabel di atas terlihat pula 67,9 persen responden berusia 15-19 tahun atau remaja awal dan selebihnya 32,1 berusia 20-24 atau remaja akhir.

Kondisi ini menggambarkan bahwa remaja awal berusia 15-19 tahun masih dalam usia sekolah jenjang SMP atau SMA sederajat sehingga masih memungkinkan untuk tetap tinggal bersama dengan orang tua mereka. Sementara remaja yang berusia 20-24 sudah menamatkan pendidikan SMA dan sebagian besar sudah merantau dan berdomisili di daerah yang berbeda dengan orang tua mereka. Hal ini juga sejalan dengan data BPS bahwa remaja berumur 14-19 tahun berjumlah 13.500 orang sementara remaja berumur 20-25 tahun berjumlah 12.300 orang (BPS, 2018).

Tabel 1. Karakteristik Responden

Variabel	Frekuensi	Persen
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	614	54,8
Perempuan	506	45,2
Umur		
15-19 Tahun	761	67,9
20-24 Tahun	359	32,1
Pendidikan		
Tidak pernah sekolah	2	0,2
Belum sekolah	2	0,2
SD	66	5,9
SLTP	221	19,7
SLTA	698	62,3
D1/D2/D3/Akademi	25	2,2
Perguruan Tinggi	106	9,5
Pekerjaan		
Pertanian	44	3,9
Industri	6	0,5
Perdagangan	10	0,9
Jasa	38	3,4
PNS/TNI/POLRI	3	0,3
Belum Bekerja	818	73
Pensiunan	1	0,1
Swasta	67	6
Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga	29	2,6
Lainnya	104	9,3
Daerah Tempat Tinggal		
Perkotaan	426	38
Perdesaan	694	62
Kuintil Kekayaan		
Terbawah	243	21,7
Menengah Bawah	225	20,1
Menengah	254	22,7
Menengah Atas	213	19
Teratas	185	16,5
TOTAL	1120	100

Sumber: Hasil Penelitian (2017)

Jika dilihat dari segi pendidikan, terlihat bahwa 62,3 persen remaja di Provinsi Sumatera Utara sudah mengesep pendidikan hingga pendidikan SMA sederajat, 19,7 persen pernah mengesep pendidikan setingkat SMP sederajat. Hal ini relevan dengan dominasi kisaran umur pada bahasan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa kesadaran pendidikan pada remaja di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang positif dan membaik. Namun sangat disayangkan atas sedikitnya masing masing 2 orang atau 0,2 persen dari 1120 responden remaja tidak pernah sama sekali dan belum mengesep dunia pendidikan. Jika dihubungkan pada angka agregat provinsi dan nasional angka ini tentunya akan menunjukkan jumlah yang perlu diperhatikan.

Tujuh puluh tiga persen responden belum bekerja jika dilihat pada tabel di atas. Hal ini

masih relevan jika dihubungkan dengan umur dan jenjang pendidikan yang pernah dikecap oleh responden. Dominasi umur 15-19 tahun dengan pendidikan yang pernah diduduki pada tingkat SMA kemudian SMP menunjukkan hal yang wajar jika dominasi responden belum bekerja. Namun ada kejanggalan persentase pekerja paling kecil yakni pensiunan sebesar 0,1 persen. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kategori pekerjaan yang dimiliki oleh responden.

Pemilihan lokasi penelitian pada SRPJM tahun 2016 dan 2017 di kategorikan pada kategori *rural dan urban* dengan sistem *weighting* memperhatikan jumlah penduduk sesuai dengan konsep kluster. Jika diperhatikan pada tabel di atas, 62 persen responden bertempat tinggal di daerah pedesaan dan 38 persen responden bertempat tinggal di daerah perkotaan. Hal ini

sesuai dengan karakteristik provinsi Sumatera Utara yang didominasi oleh daerah pedesaan dengan perbandingan yang dapat dilihat pada paparan sebelumnya.

Selain mempertimbangkan karakteristik wilayah tempat tinggal responden, pertimbangan terhadap kuintil kekayaan menjadi metodologi baru untuk menentukan klaster dalam SRPJMN 2017. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase kuintil kekayaan pada kelompok kategori menengah ke bawah tidak jauh berbeda yakni masing masing 22,7 %, 20,1 % dan 21,7 % pada kuintil kekayaan menengah, menengah ke bawah dan terbawah.

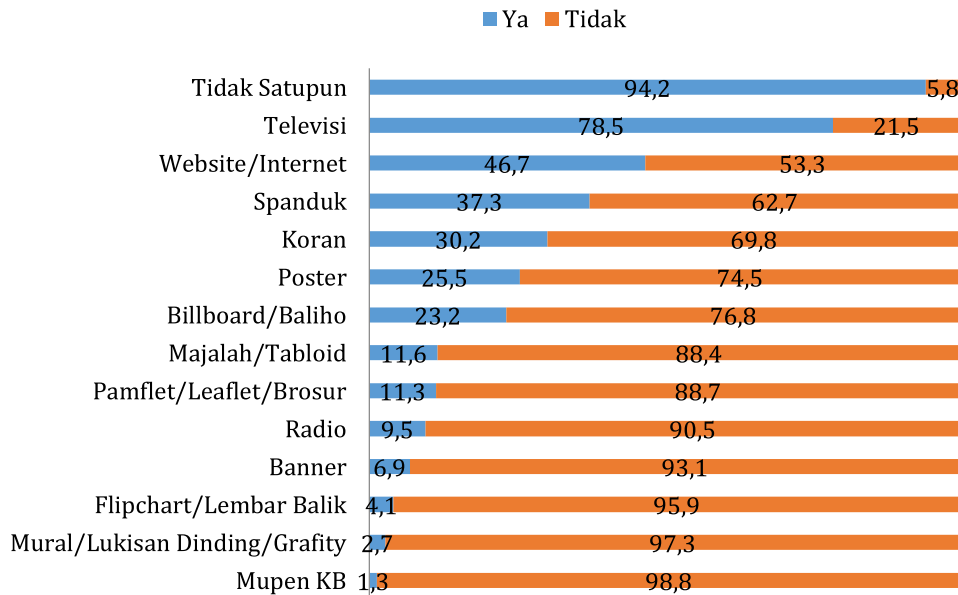
Namun pada kategori menengah ke atas terdapat kecenderungan persentase yang semakin berkurang, dimana pada kategori menengah-atas terdapat 19 persen dan pada kuintil kekayaan teratas sebanyak 16,5 persen. Kondisi ini menggambarkan sebaran remaja di Provinsi Sumatera Utara didominasi pada keluarga dengan standard kekayaan yang menengah ke bawah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam SRPJMN pada tahun 2017 sudah relevan dengan kondisi remaja di Sumatera Utara dan mampu menggambarkan bagaimana kondisi di lapangan yang sebenarnya. Kondisi keterpaparan media baik melalui media massa maupun melalui

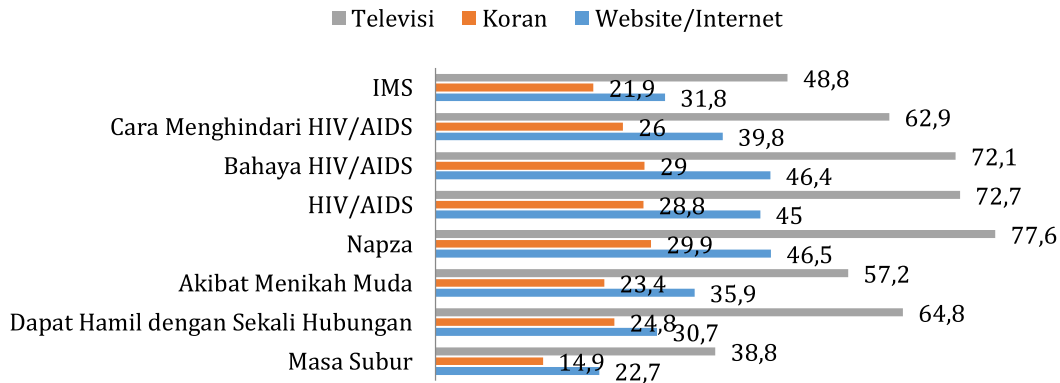
petugas yang menyampaikan informasi KRR, seperti ditampilkan pada Gambar 1.

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa televisi masih mendominasi dalam penyampaian informasi mengenai KRR sebanyak 78,5 persen, sementara terbanyak kedua adalah website/internet sebanyak 46,7 persen, spanduk dan koran masing-masing 37,2 persen dan 30,2 persen. Radio, majalah, pamphlet dan media informasi lain yang tertera di atas masih sangat minim sebagai sarana remaja di Provinsi Sumatera Utara dalam mengakses informasi KRR. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pendekatan melalui media televisi dan juga internet yang semakin tahun semakin besar tingkat pengaruhnya.

Menurut analisa hasil SDKI 2017, 81 persen wanita dan 77 persen pria menonton televisi minimal sehari dalam seminggu sementara persentase remaja yang membaca Koran atau majalah mengalami penurunan yakni 15 persen wanita dan 14 persen pria (SDKI, 2018:21). Hal ini relevan dengan hasil yang disajikan dalam gambar di atas, hingga kini televisi masih mendominasi perolehan informasi remaja di Indonesia, demikian pula di Sumatera Utara.



Gambar 1. Keterpaparan Informasi KRR melalui Media Massa
Sumber: Hasil Penelitian (2017)



Gambar 2. Analisa Silang Informasi Melalui Media Massa dan Pengetahuan KRR
Sumber: Hasil Penelitian (2017)

Selain televisi, tren penggunaan internet semakin hari semakin meningkat, hasil ini juga dipotret oleh SDKI 2017 yang menunjukkan hasil bahwa 89 persen wanita dan 87 persen pria menggunakan internet untuk mengakses berbagai informasi. Memang semakin tergambar jelas bahwa penggunaan media digital menarik bagi banyak pihak khususnya remaja, bahkan kehadiran media digital menjadi salah satu bagian dari gaya hidup selain alasan kecepatan akses juga interaksi yang lebih banyak dimungkinkan (Simon, 2013; Levine, 2011; Westerman, 2014). Untuk hasil silang lebih lanjut informasi KRR yang disampaikan melalui media massa di tampilan pada Gambar 2.

Informasi KRR yang paling banyak diperoleh melalui televisi adalah pengetahuan mengenai Napza sebesar 77,6 persen, kemudian disusul oleh pengetahuan mengenai HIV/AIDS termasuk bahaya dan cara menghindari sebesar 72,7 persen, 72,1 persen dan 62,9 persen sementara informasi yang juga banyak diperoleh adalah pengetahuan mengenai kemungkinan dapat hamil hanya dengan sekali melakukan hubungan seksual. Informasi mengenai penyakit seksual menular, masa subur dan akibat menikah muda masih kurang maksimal terlebih lagi pada pengetahuan mengenai masa subur wanita. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Israwati (2011) sebagai hasil analisis data sekunder atas survei remaja tahun 2009, dimana terdapat 95,9 % yang mengetahui informasi tentang NAPZA, 92,2 persen mendapat informasi HIV.

Tidak jauh berbeda dengan informasi yang diperoleh melalui surat kabar atau koran, informasi Napza memang paling mendapat sorotan sebesar 29,9 persen, kemudian disusul oleh pengetahuan mengenai bahaya, pengetahuan dan cara menghindari HIV/ADS masing-masing 29 persen, 28,8 persen dan 26 persen. Informasi mengenai penyakit seksual menular, akibat menikah muda, hamil dengan

sekali melakukan hubungan dan paling kecil pengetahuan mengenai masa subur masih kurang ditemukan pada koran.

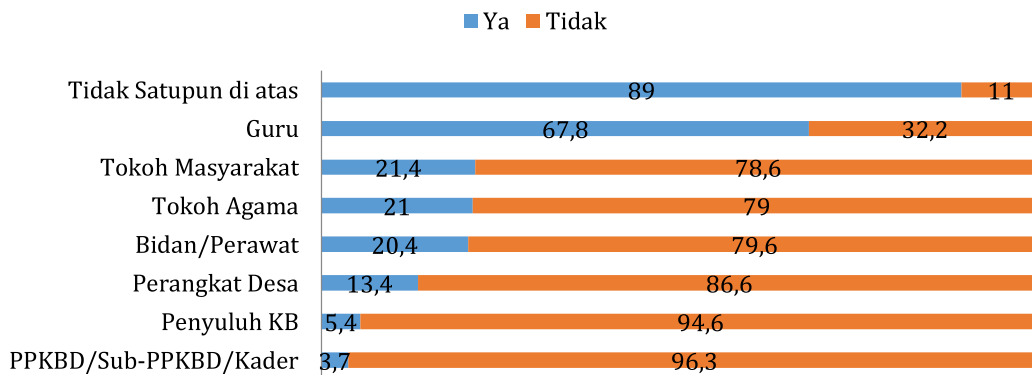
Demikian pula dengan informasi KRR yang disampaikan melalui website/internet, dominasi informasi mengenai Napza diperoleh oleh sebanyak 46,5 persen, masing-masing 46,4 persen, 45 persen dan 39,8 persen pada bahaya, pengetahuan dan cara menghindari HIV disampaikan melalui website. Melalui pemaparan dan hasil silang, penyampaian informasi mengenai masa subur wanita masih sangat minim melalui televisi, koran maupun website. Hal ini juga terjadi pada pengetahuan mengenai penyakit seksual menular, kemungkinan dapat hamil dengan sekali melakukan hubungan seksual dan akibat menikah muda. Ulasan khusus mengenai paparan informasi KRR melalui petugas dapat dilihat pada Gambar 3.

Guru merupakan tokoh yang paling intens menyampaikan pengetahuan mengenai KRR sebesar 67,8 persen, kemudian disusul oleh tokoh masyarakat sebesar 21,4 persen, tokoh agama 21 persen, melalui bidan/perawat sebesar 20,4 persen dan perangkat desa sebesar 13,4 persen. Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa penyampaian informasi KRR yang paling minim justru dari PPKBD/Sub-PPKBD/Kader dan PLKB yakni sebesar 3,7 dan 5,4 persen. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pengelola dan pengambil kebijakan untuk menekankan penyampaian informasi KRR melalui petugas PLKB dan PPKBD.

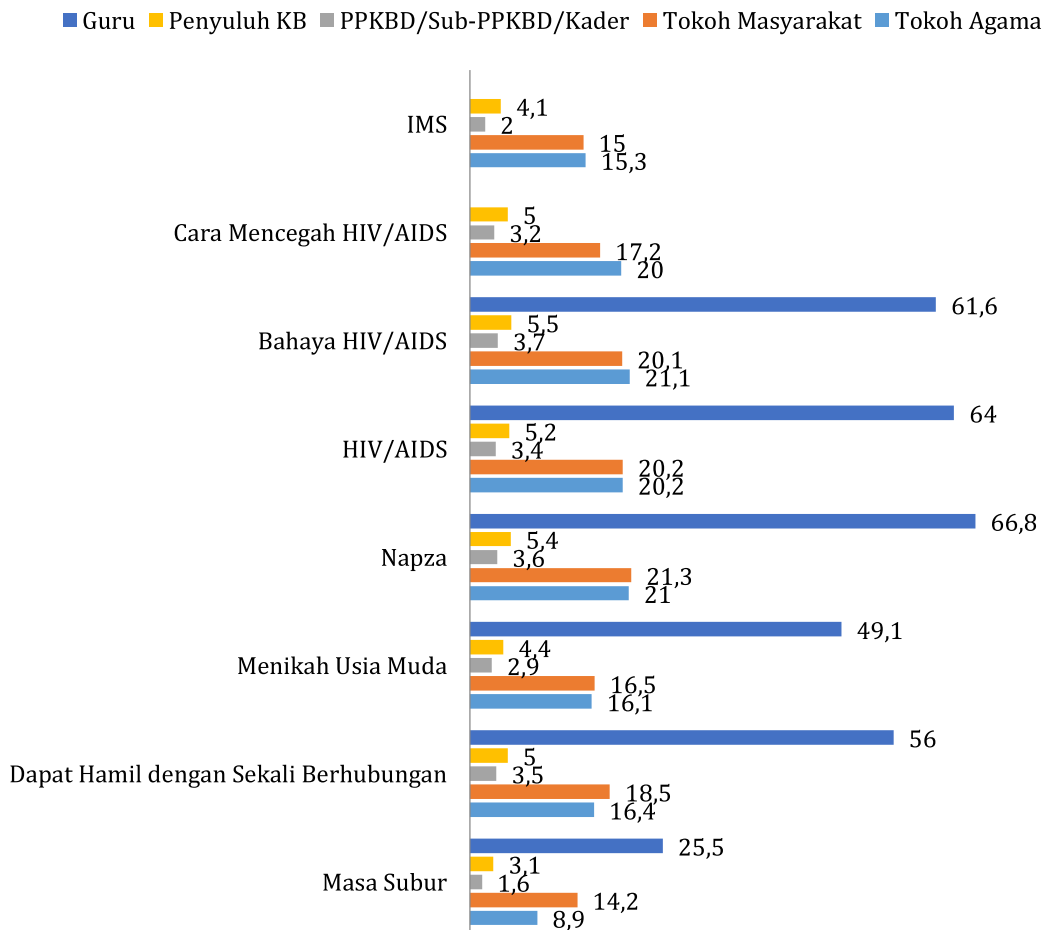
Sementara peningkatan pengetahuan melalui guru terus dimanfaatkan mengingat guru memiliki intensitas pertemuan yang lebih banyak dengan remaja di sekolah. Analisis yang dilakukan Huriyah (2008), menemukan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja di lingkungan sekolah, baik melalui guru maupun teman-teman sebaya. Hal

ini menunjukkan hasil yang relevan, sementara untuk melihat secara detail informasi KRR apa saja yang diperoleh melalui Guru, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Adat, PPKBD dan Penyuluh KB dapat di tampilkan pada Gambar 4.



Gambar 3. Keterpaparan Informasi KRR Melalui Petugas
Sumber: Hasil Penelitian (2017)



Gambar 4. Analisa Silang Informasi Petugas dan Pengetahuan KRR

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa informasi mengenai Napza, pengetahuan, bahaya dan cara mencegah HIV/AIDS masih mendominasi baik melalui guru, penyuluh KB, PPKBD, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tidak jauh berbeda dengan penyampaian informasi KRR melalui media massa, informasi mengenai masa subur masih sangat minim

disampaikan melalui kelima petugas, terendah kedua adalah informasi mengenai penyakit seksual menular, kemungkinan hamil dalam sekali hubungan seksual dan menikah usia muda. Informasi mengenai hal tersebut harus diperbanyak secara kuantitas dan kualitas baik melalui media massa maupun melalui petugas.

Tabel 3. Pengetahuan KRR

Kategori	Laki-laki		Wanita		Total	
	f	%	f	%	f	%
Masa Subur Wanita						
Tidak pernah mendengar istilah masa subur	78	7	31	2,8	109	9,7
Lainnya	22	2	32	2,9	54	4,8
Ditengah antara dua haid	17	1,5	67	6	83	7,4
Segera setelah haid berakhir	71	6,3	126	11,3	197	17,6
Selama haid	20	1,8	34	3	54	4,8
Menjelang haid	36	3,2	64	5,7	100	8,9
Tidak tahu	370	33	152	13,6	523	46,7
Perempuan dapat Hamil Hanya dalam Sekali Hubungan						
Dapat hamil	385	34,4	353	31,5	738	65,9
Tidak dapat hamil	99	8,8	70	6,3	169	15,1
Tidak tahu	130	11,6	83	7,4	213	19,0
Mengetahui akibat dari menikah usia muda						
Ya	396	35,4	367	32,8	763	68,1
Tidak	218	19,5	139	12,4	357	31,9
Pernah mendengar tentang NAPZA						
Ya	599	53,5	483	43,1	1082	96,6
Tidak	483	43,1	23	2,1	38	3,4
Pernah Mendengar HIV/AIDS						
Ya	527	47,1	453	40,4	980	87,5
Tidak	87	7,8	53	4,7	140	12,5
Mengetahui Bahaya HIV/AIDS						
Ya	483	44,7	383	39,1	821	83,3
Tidak	89	9,1	70	7,1	159	16,2
Cara Menghindari HIV/AIDS						
Ya	376	38,4	337	34,4	713	72,8
Tidak	151	15,4	116	11,8	267	27,2
IMS						
Ya	368	32,9	273	24,4	641	57,2
Tidak	246	22	233	20,8	479	42,8
Umur Sebaiknya Perempuan Menikah						
≥ 21 Tahun	404	36,1	395	35,3	799	71,3
≤ 20 Tahun	210	18,8	111	9,9	321	28,7
Umur Sebaiknya Laki-Laki Menikah						
≥ 25 Tahun	442	39,5	401	35,8	843	75,3
≤ 24 Tahun	172	15,4	105	9,4	277	24,7
Sebaiknya Perempuan Pertama Sekali Memiliki Anak						
21-30 Tahun	405	36,2	387	34,6	792	70,7
≤ 20 Tahun	209	18,7	119	10,6	328	29,3
Batas Umur Terendah/Termuda Aman Melahirkan						
21-30 Tahun	412	36,8	367	32,8	779	69,6
≤ 20 Tahun	202	18	139	12,4	341	30,4
Batas Umur Tertinggi/Tertua Aman Melahirkan						
20-35 Tahun	364	32,5	334	29,8	698	62,3
> 35 Tahun	250	22,3	172	15,4	422	37,7
Total					1120	100,0

Sumber: Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Televisi, Internet dan Guru merupakan pilar penting sebagai media penyampai arus informasi KRR kepada remaja di Provinsi Sumatera Utara. Sementara informasi mengenai Napza dan HIV/AIDS cukup memadai sementara pengetahuan mengenai masa subur masih sangat minim baik secara kuantitas maupun kualitas. Lebih rinci mengenai pengetahuan KRR dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pemahaman remaja terhadap beberapa komponen dalam KRR. Masa subur wanita merupakan salah satu komponen yang penting untuk diperhatikan sementara melalui tabel di atas, hanya 7,4 persen responden yang mengetahui dengan benar bahwa masa subur wanita berada di antara dua haid 6 persen diantaranya responden perempuan dan 1,5 persen responden laki-laki. Sementara 46,7 persen tidak tahu dengan pasti kapan masa subur wanita berlangsung dan hasil ini didominasi oleh responden laki-laki sebanyak 33 persen sedangkan perempuan 13,6 persen.

Berbeda halnya dengan pengetahuan mengenai kemungkinan perempuan dapat hamil hanya dalam sekali hubungan seksual, dimana 65,9 persen menjawab dapat hamil, 34,4 persen dinyatakan oleh responden laki-laki dan 31,5 dinyatakan oleh responden perempuan dan 15,1 persen menjawab tidak dapat hamil. Selanjutnya terdapat 68,1 persen terdiri dari 35,4 responden laki-laki dan 32,8 persen responden perempuan yang mengetahui akibat menikah muda. Napza hampir diketahui oleh seluruh responden remaja yakni sebesar 96,6 persen terdiri dari responden laki-laki sebanyak 53,5 persen dan 43,1 persen responden perempuan.

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa proporsi pengetahuan responden laki-laki mengenai bahaya dan cara mencegah HIV/AIDS dan penyakit seksual menular lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi pengetahuan responden perempuan. Hasil yang sama juga ditemukan pada pengetahuan mengenai kemungkinan perempuan hamil dalam sekali hubungan seksual, akibat menikah muda dan pengetahuan tentang Napza.

Tidak berbeda dengan pengetahuan responden remaja laki-laki mengenai umur

sebaiknya laki-laki dan perempuan menikah, umur sebaiknya perempuan punya anak pertama kali serta batas umur terendah maupun tertinggi dalam melahirkan, lebih tinggi jika dibandingkan dengan responden remaja perempuan. Responden remaja perempuan hanya dominan pada pengetahuan mengenai masa subur.

Hasil mengenai umur sebaiknya perempuan menikah yaitu 71,3 persen responden menjawab sesuai dengan batasan umur menikah yang diharapkan oleh BKKBN yakni di atas 21 tahun, namun masih terdapat 28,7 persen yang menjawab di bawah 20 tahun. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan umur sebaiknya perempuan punya anak pertama sekali yakni 70,7 persen menjawab pada rentang waktu 21-30 tahun, namun masih terdapat 29,3 persen yang menjawab memiliki anak di bawah umur 20 tahun.

Remaja memahami bahwa umur sebaiknya laki-laki menikah di atas umur 25 tahun sesuai dengan ketentuan BKKBN terdapat 75,3 persen sementara 24,7 memahami bahwa laki-laki sebaiknya menikah di bawah umur 24 tahun. Pada pengetahuan mengenai batas umur termuda dan tertua aman melahirkan sudah baik pada 69,6 persen dan 62,3 persen responden. Hasil ini tentu menunjukkan perlunya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai KRR ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan KRR pada remaja di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya baik. Remaja perempuan hanya unggul pada pemahaman mengenai masa subur perempuan, pada indikator pengetahuan KRR lainnya, remaja laki-laki di Provinsi Sumatera Utara lebih baik dibandingkan dengan remaja perempuan. Menurut analisis yang dilakukan oleh Ernawati (2018), adapun faktor yang mempengaruhi pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di Desa Sidoharjo adalah jenis kelamin, jumlah sumber informasi dan pemanfaatan peran orang tua. Artinya sumber informasi menjadi faktor yang penting diperhatikan demikian pula dengan jenis kelamin.

Tabel 4. Analisis Silang Pengetahuan KRR dan Keterpaparan Media

Keterpaparan Media Informasi KRR	Pengetahuan KRR				Total	
	Tinggi		Rendah		f	%
	F	%	f	%		
Terpapar Berat	60	45,8	71	54,2	131	100
Terpapar Ringan	204	20,6	785	79,4	989	100
Total	264	23,6	856	76,4	1120	100

Tabel 5. Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	40.694 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	39.309	1	.000		
Likelihood Ratio	35.815	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	40.658	1	.000		
N of Valid Cases	1120				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30.88.

b. Computed only for a 2x2 table

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2017)

Setelah dilakukan scoring dan penjumlahan pada setiap indikator mengenai keterpaparan media KRR dan pengetahuan KRR, hasil tersebut dibagi menjadi dua kategori dengan pembagian kedua kategori ditentukan pada garis median yang membagi dua rentang tingkat keterpaparan maupun tingkat pengetahuan KRR. Setelah dilakukan pengkategorian dilanjutkan dengan analisis silang dengan menyertakan analisis Chi Square yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat atau tidak terdapat hubungan pada kedua variabel.

Berdasarkan hasil analisa silang pada tabel 4 dapat dilihat dari 131 responden yang terpapar berat mengenai informasi KRR, 60 orang (45,8%) di antaranya memiliki tingkat pengetahuan KRR yang tinggi dan 71 orang (54,2%) memiliki tingkat pengetahuan KRR yang rendah. Sementara dari 989 orang responden yang terpapar lebih sedikit informasi KRR, 204 orang (20,6%) diantaranya memiliki tingkat pengetahuan KRR baik dan 785 orang (79,4%) diantaranya memiliki tingkat pengetahuan KRR yang kurang. Dapat disimpulkan bahwa semakin berat tingkat keterpaparan remaja terhadap media informasi KRR, semakin tinggi pula persentase tingkat pengetahuan KRR, sebaliknya semakin ringan keterpaparan media informasi KRR remaja maka semakin rendah pula tingkat pengetahuan KRRnya.

Berdasarkan hasil *chi-square test* yang disajikan dalam tabel 5, angka signifikansi antara kedua variabel sebesar 0,000 dimana angka ini lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keterpaparan informasi KRR dengan tingkat pengetahuan KRR remaja di Provinsi Sumatera Utara.

Analisis pada hubungan antara keterpaparan media dengan tingkat pengetahuan KRR pada remaja di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Iswarati (2011) dan ia memperoleh kesimpulan yang sama. Penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan KRR remaja di Indonesia disebabkan oleh rendahnya keterpaparan media informasi.

Adanya hubungan antara keterpaparan media dengan pengetahuan KRR juga pernah ditemukan oleh Rahmawati dkk (2012) yang dilakukan pada remaja kelas XI SMA Darul Ulum 3 Jombang dengan tujuan untuk menganalisis fakto-faktor yang mempengaruhi pengetahuan KRR di daerah pedesaan Ponorogo. Begitu juga dengan penelitian Ernawati (2018) yang menemukan tiga faktor utama yang mempengaruhi pengetahuan KRR yakni: jenis kelamin; banyaknya jumlah sumber informasi; dan, pemanfaatan orang tua sebagai sumber informasi KRR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis data penelitian ini sesuai dengan kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keterpaparan media KRR dengan tingkat pengetahuan KRR pada Remaja di Provinsi Sumatera Utara. Pengetahuan mengenai masa subur wanita, usia menikah, umur aman melahirkan masih berada pada tingkat yang kurang. Televisi merupakan sumber informasi KRR utama bagi remaja di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kecenderungan pergeseran kepada website/internet. Sementara petugas yang paling berperan dalam penyampaian informasi KRR adalah guru.

REKOMENDASI

1. Materi yang disampaikan padaberbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) remaja baik di Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) maupun di sekolah hendaknya difokuskan pada peningkatan pengetahuan remaja

mengenai masa subur wanita, usia ideal untuk menikah, umur yang aman melahirkan. Hal ini didasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa pengetahuan remaja pada materi tersebut berada pada tingkat yang kurang.

2. Televisi dan internet dapat dijadikan sebagai alternatif utama dalam menyampaikan ketiga materi ini, mengingat tingginya peran kedua media ini dalam meningkatkan pengetahuan remaja di Provinsi Sumatera Utara.
3. Keterlibatan guru dalam menyampaikan pesan KRR perlu ditingkatkan karena Guru memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding peran petugas lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta semua pihak yang telah mendukung penelitian hingga diterbitkannya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2018. *Sumatera Utara dalam Angka 2017*. Medan: Badan Pusat Statistik

Kementerian Kesehatan, Usaid. 2017. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2002. *Data survei Kesehatan Reproduksi Indonesia*. Jakarta: BKKBN.

Bungin, Burhan, 2001, *Erotika Media Massa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Ernawati, Hery. 2018. *Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di Daerah Pedesaan*. Indonesian Journal for Health Sciences; Vol.02, No.01, Maret 2018, Hal 58-64.

Guse, Kylene, Deb Levine, Summer Martins, Andrea Lira, Jenna Gaarde, Whiney Westmorland and Melissa Giliam. 2012. "Interviews Using New Digital Media to Improve Teenager Health 51 (6): 535-43."

Huriah, T., dan Nisma, H. 2008. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi oleh Teman Sebaya (Peer Group) terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMP Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta*. Mutiara Medika 8(2).

Isnaeni, Rofiqoch. 2017. *Hubungan Keterpaparan Media terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi*. Medsains 3(02) November 2017: 5 – 10.

Iswarati. 2011. *Pengetahuan dan Sumber Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*. Jurnal Manajerial 9(18) Januari 2011: 1 – 16.

Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kemenkes.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Modul Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja bagi Konselor Sebaya*. Jakarta: Kemenkes.

Levine, Deb. 2011. "Using Technology, New Media and Mobile for Sexual and Reproductive Health." *Sexuality Research and Social Policy* 8 (1): 18-26.

Moeliono, Laurike. 2003. *Proses Belajar Aktif Kesehatan Reproduksi Remaja, Bahan Pegangan untuk Memfasilitasi Kegiatan Belajar Aktif untuk Anak dan Remaja Usia 10-14 Tahun*. Jakarta: BKKBN.

Rahmawati, Vivin Eka. Ninik Azizah dan Suyati Suyati. 2012. *Hubungan Pemanfaatan Beberapa Jenis Media Massa dengan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Kelas XI SMA*. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Competitive Advantage

Setianti, Y dan Komala, L. 2013. *Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Pedesaan*. *Edutech* 1(3).

Simon, Laura and Kristian Daneback. 2013. *Teenagers' Use of the Internet for Sex Education: A Thematic and Critical Review of the Literature*. *International Journal of Sexual Health*, 25: 305-319.

Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKKRI). 2017. *Kesehatan Remaja Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Wahyuni, S. 2012. *Hubungan antara Pengetahuan Remaja tentang Penyakit Menular Seksual (PMS) dengan Jenis Kelamin dan Sumber Informasi di SMAN Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Stikes U'Budiyah* 1 (2).

Westerman, David. Patric R. Spence dan Brandon Van Der Heide. 2014. *Social Media as Information Source: Recency of Updates and Credibility of Information*. *Journal of Computer-Mediated Communication* 19(2).

Widyastari, D.A., Shaluhiah, Z., Widjanarko, B
2011. Urinating After Sexual Intercourse
Prevents Pregnancy: Teenagers' Misconceptions
of Reproductive Health Knowledge. *Jurnal
Kesehatan Reproduksi* 1(2) 102-112.

Hasil Penelitian

PENGETAHUAN, PERSEPSI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOWISATA GAJAH DI KAWASAN AEK NAULI, DANAU TOBA

(KNOWLEDGE, PERCEPTION AND POLICY OF ELEPHANT ECOTOURISM MANAGEMENT IN THE AEK NAULI REGION, TOBA LAKE)

Wanda Kuswanda

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli
Jl. Raya Parapat Km 10,5 Sibaganding Sumatera Utara 21174
email: wkuswan@yahoo.com

Diterima: 22 Juni 2019; Direvisi: 10 September 2019; Disetujui: 16 September 2019

ABSTRAK

Pengembangan destinasi wisata sangat penting untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Danau Toba, Sumatera Utara. Salah satu lokasi yang dikembangkan saat ini adalah Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC) di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli sebagai lokasi konservasi dan wisata ilmiah gajah Sumatera. Pemilihan gajah sebagai 'ikon' lokasi ekowisata baru karena gajah merupakan satwa yang menarik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan, persepsi pengunjung dan rekomendasi kebijakan untuk mengembangkan wisata ilmiah gajah di ANECC, KHDTK Aek Nauli, dalam mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan di area ANECC selama enam bulan, mulai dari bulan Mei sampai Oktober 2018. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan wawancara. Responden merupakan pengunjung ANECC yang dipilih menggunakan metode purposive random sampling sebanyak 285 pengunjung. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pengunjung tentang keberadaan ekowisata gajah berasal dari temannya dan media sosial. Mereka berkunjung ke ANECC karena keingintahuan dan tertarik dengan adanya gajah. Persepsi 85% responden adalah positif terhadap wisata ilmiah gajah karena adanya pelayanan yang baik, penyajian atraksi gajah dan fasilitas yang cukup memadai serta masih gratis. Acuan kebijakan yang direkomendasikan untuk pengembangan ANECC adalah: mengimplementasikan animal welfare dan one health bagi gajah; memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pengelola; mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha (travel dan hotel); penyusunan paket ekowisata yang terintegrasi dengan Danau Toba; dan, meningkatkan promosi melalui internet marketing dan jejaring sosial dan menjalin kerjasama dengan masyarakat lokal.

Kata kunci: gajah, ekowisata, persepsi, Aek Nauli, Danau Toba

ABSTRACT

The development of tourist destinations is very important to increase the return of traveler to Lake Toba, North Sumatra. The Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC) is one of the locations that being developed in the Special Purpose Forest Region (SPFR) of Aek Nauli as a location conservation and scientific tourism for Sumatran elephants. Elephant was chosen an 'icon' for new ecotourism because them are animals that attract communities. This study aims to obtain information about knowledge and visitor perceptions as well as policy recommendations to develop elephant scientific tourism for supporting the tourist visits to Lake Toba in ANECC, SPFR of Aek Nauli, North Sumatra. This research was conducted in the ANECC area for six months, starting from May to October 2018. Data collection were used by questionnaires and interviews. Respondents are ANECC visitors who were selected by using the purposive random sampling method. Data analysis is carried out quantitatively whit frequency tables. The results showed that visitors knowledge about the existence of elephant ecotourism came from friends and social media. They visited ANECC for curiosity and interest in the presence of elephants. Perception of 85% respondents is positive for elephant scientific tourism because of good service, elephant attractions presentation and adequate facilities and free. The policy references are recommended for the ANECC development as follows: implement to animal welfare and health for elephants; reinforce

coordination and communication between managers; develop cooperation with business society (travel and hotels); to make ecotourism packages that integrated with Lake Toba; and, improve promotion through internet marketing and social networking and collaborating with local communities.

Keywords: *elephant, ecotourism, perception, Aek Nauli, Toba Lake*

PENDAHULUAN

Kawasan Danau Toba sesuai Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang pengembangan kedepannya diarahkan sebagai tujuan prioritas destinasi pariwisata di Indonesia. Keberadaan Danau Toba telah menjadi magnet bagi masyarakat dunia untuk mengunjunginya karena keindahan danau dan panorama alamnya. Keunikan Danau Toba diantaranya sebagai danau vulkanik dengan luas mencapai 1.145 km² dan kedalaman 450-600 meter tentunya sangat menarik untuk dinikmati oleh wisatawan mancanegara (Chesner, 1988). Sehingga pengembangan berbagai destinasi lainnya sangat penting sehingga kunjungan wisatawan meningkat kembali ke Danau Toba.

Guna meningkatkan daya tarik wisatawan berkunjung ke Danau Toba maka Pemerintah terus mengembangkan berbagai program, baik berupa destinasi wisata lainnya maupun prasarana pendukungnya. Salah satu upaya yang dikembangkan Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) adalah pembangunan *Aek Nauli Elephant Conservation Camp* (ANECC) dan destinasi lainnya di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli. Pemilihan KHDTK Aek Nauli yang merupakan Daerah Tangkapan Air Danau Toba dianggap sangat strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba (Kuswanda dan Pratiara, 2017).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 41 tentang Kehutanan pengembangan wisata di KHDTK harus mengimplementasikan prinsip wisata ilmiah (memadukan wisata dan pendidikan) karena salah satu tujuan penetapan KHDTK adalah sebagai lokasi dan sarana desiminasi hasil penelitian dan pengembangan.

ANECC merupakan lokasi konservasi dan ekowisata di KHDTK Aek Nauli yang dibangun atas hasil kerjasama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (BBKSDAE) Sumatera Utara, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Aek Nauli dan Lembaga Vesswic mulai tahun 2017. Pemilihan gajah sebagai 'ikon' lokasi

ekowisata baru di sekitar Danau Toba karena gajah merupakan satwa yang menarik bagi masyarakat dan belum ada wisata sejenis. Selain itu pemilihan gajah juga diharapkan menjadi bagian program konservasi spesies yang sudah terancam punah dan populasinya di alam terus menurun. Populasi gajah semakin menurun drastis hingga 70% dalam waktu 20-30 tahun terakhir (Sukumar, 2003; Sitompul, 2011). Pada tahun 1980-an, populasi gajah diperkirakan berjumlah 2.800-4.800 individu (Blouch & Simbolon, 1985) dan tahun 2014 diperkirakan hanya tertinggal 1.800 individu (Departemen Kehutanan, 2007).

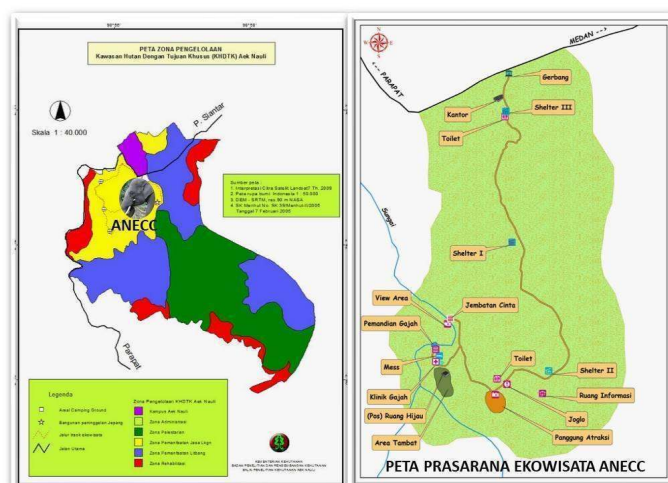
Pengembangan wisata ilmiah gajah di area ANECC, KHDTK Aek Nauli membutuhkan berbagai informasi agar pengelolaan kedepannya lebih optimal. Salah satu informasi yang perlu segera diketahui adalah persepsi para pengunjung (wisatawan) dan kebijakan yang tepat untuk pengembangannya. Menurut Robbins and Judge (2008), persepsi (*perception*) merupakan proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi lingkungan. Persepsi diartikan juga sebagai suatu proses kognitif yang memungkinkan seseorang dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar berdasarkan pengetahuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan, persepsi pengunjung dan rekomendasi kebijakan untuk mengembangkan wisata ilmiah gajah di ANECC, KHDTK Aek Nauli dalam mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara.

METODE

Penelitian dilakukan di area ANECC, KHDTK Aek Nauli selama enam bulan, mulai dari Bulan Mei sampai Oktober 2018. Peta lokasi ANECC dan prasarana pendukung ekowisata yang terdapat di KHDTK Aek Nauli seperti pada Gambar 1. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan data di analisis secara deskriptif. Irawan (2006) menyatakan bahwa kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran "intersubyektif" bukan kebenaran "obyektif". Kebenaran intersubyektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang

bekerja bersama-sama, seperti budaya dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia.



Gambar 1. Peta kawasan dan prasarana ekowisata gajah di ANECC, KHDTK Aek Nauli

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara. Responden penelitian merupakan pengunjung yang datang ke ANECC yang dipilih menggunakan metode *purposive random sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyebaran kuisioner untuk pengetahuan pengunjung pada Bulan Mei sampai Juli dengan jumlah responden sebanyak 210 responden dan untuk data persepsi pada Bulan Agustus sampai Oktober 2018 dengan jumlah responden 75 pengunjung. Wawancara juga dilakukan terhadap responden yang memahami tentang topik penelitian, seperti permasalahan ekowisata dan konservasi satwaliar.

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber pustaka atau referensi lainnya yang diperlukan, seperti journal, buku teks dan hasil penelitian lainnya. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan tabel frekuensi. Penyusunan table frekuensi memuat jumlah frekuensi dan prosentase untuk setiap kategori/karakteristik pernyataan responden (Supangat, 2008). Dari hasil tabel frekuensi kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan KHDTK Aek Nauli sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi lindung diharapkan akan mampu memadukan kepentingan perlindungan hutan dan pemanfaatan melalui penelitian dan

pengembangan serta wisata ilmiah. Pengelolaan KHDTK Aek Nauli juga harus memenuhi prinsip-prinsip konservasi itu sendiri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai obyek ekowisata secara berkelanjutan sesuai dengan potensi yang ada didalamnya dan dikelola secara optimal. Pengembangan riset maupun ketersediaan sarana pendukung harus terus ditingkatkan untuk memberikan nilai guna bagi masyarakat ilmiah maupun masyarakat lain pada umumnya (Kuswanda dan Pratiara, 2017).

ANECC merupakan salah satu lokasi ekowisata gajah yang baru diresmikan pada Bulan November 2017. Namun dalam setahun dibuka, kunjungan ke ANECC telah mencapai puluhan ribu pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat tertarik untuk menikmati obyek wisata gajah dan keindahan hutan yang ada di KHDTK Aek Nauli. Domestikasi dan ekowisata gajah sebenarnya bukanlah hal yang luar biasa bagi beberapa negara di Asia seperti Thailand, India dan Srilanka.

Trippasert (2002) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat 15 pusat konservasi gajah yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta di Thailand. Aktivitas gajah di pusat konservasi tersebut adalah seperti lokasi pengembangbiakan, sekolah pelatih gajah (mahout), pengelolaan ekowisata seperti dengan paket-paket seperti trekking dengan gajah, menunggang gajah, pertunjukan gajah (orkestra, sirkus, melukis, menarik gerobak, dan lain-lain), dan pengembangan pendidikan konservasi gajah melalui pembuatan film dan eksibisi tentang gajah (Bluwstein, 2011). Hasil

analisis kuisioner pengetahuan wisatawan dari 210 responden yang berkunjung ke ANECC seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengetahuan pengunjung terhadap ANECC

No.	Pernyataan Responden	Tahap I (n=60)	Tahap II (n=150)	Total (%)	
1	Informasi tentang lokasi ANECC	a. Media Sosial	23	36	28,1
		b. Teman	19	72	43,3
		c. Sahabat/Pacar	1	4	2,4
		d. Masyarakat sekitar KHDTK	1	0	0,5
		f. Keluarga/Saudara	6	14	9,5
		g. Lainnya (BP2LHK Aek Nauli, melintas, media cetak dan informasi lainnya)	10	24	16,2
		2	Alasan berkunjung ke ANECC	a. Penasaran/tertarik dengan gajah	41
b. Sekedar rekreasi/reftersing	9			11	9,5
c. Edukasi/kunjungan praktek	3			5	3,8
d. Menikmati obyek wisata lainnya	7			33	19,0
3	Pengalaman melihat gajah secara langsung	a. Sudah	21	85	50,5
		b. Belum	39	65	49,5
4	Pendapat tentang gajah, hutan dan fasilitas yang ada di ANECC	a. Fasilitas bagus dan tidak dipungut biaya	16	27	20,5
		b. Gajahnya sehat dan pintar	15	52	31,9
		c. Kombinasi a dan b	10	33	20,5
		d. Fasilitas bagus serta edukasi yang menarik	11	18	13,8
		e. Fasilitas perlu dikembangkan/ditambah	5	9	6,7
		f. Fasilitas kurang baik dan edukasi kurang menarik	1	8	4,3
		g. Edukasinya menarik namun fasilitas kurang baik	2	3	2,4
5	Pentingnya program konservasi gajah	a. Setuju, karena gajah adalah hewan langka	54	98	72,4
		b. Setuju, karena gajah Sumatera adalah hewan endemik Sumatera	2	26	13,3
		c. Setuju, karena gajah adalah hewan menarik	4	26	14,3

Tabel 1 menunjukkan bahwa informasi tentang adanya ANECC secara umum diperoleh dari teman sekitar 43,3%, dari media sosial (28,1%) dan dari anggota keluarga yang pernah mengunjungi ANECC serta media lainnya. Sebagian responden mengaku juga bahwa mengetahui adanya lokasi wisata ilmiah gajah saat melintas menuju Danau Toba dan lokasi lainnya.

Hasil ini menunjukkan bahwa informasi dari mulut ke mulut antara pengunjung dengan teman atau saudaranya ternyata masih lebih efektif dibandingkan media sosial. Hal ini juga dimungkinkan karena sebagian pengunjung terutama yang berusia lanjut belum menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Penyebaran informasi dan promosi tentang ANECC melalui media lainnya tentunya

harus terus ditingkatkan terutama untuk menjangkau masyarakat di luar Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan masyarakat internasional.

Program promosi dan sosialisasi dalam mengembangkan ekowisata sangat penting agar obyek dan destinasi diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas, baik lingkup nasional maupun internasional. Program promosi dan sosialisasi merupakan cara yang tepat untuk memperkenalkan obyek dan destinasi yang belum dikenal publik, terutama keberadaan lokasi wisata dan obyek yang akan dijual dan dapat dinikmati oleh wisatawan. Promosi dan sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa (cetak dan elektronik), bandara, pameran, NGO dan perguruan tinggi (Kuswanda, 2012).

Alasan utama mereka berkunjung ke ANECC sebanyak 67,6% responden adalah penasaran atau tertarik dengan adanya gajah dan sebagian ingin mengetahui obyek wisata lainnya di KHDTK Aek Nauli sebesar 19,0% responden. Dari hasil ini menunjukkan bahwa gajah merupakan salah satu satwa yang memiliki potensi untuk menarik wisatawan ke Aek Nauli. Varma *et al.* (2009) menyatakan bahwa gajah di India telah dijadikan sebagai daya tarik agar wisatawan internasional berkunjung ke negaranya. Namun, untuk meningkatkan ketertarikan dan pengalaman serta kenyamanan bagi wisatawan tentunya obyek lainnya juga perlu dikembangkan untuk memberikan edukasi kepada pengunjung yang lebih luas terutama terkait pemanfaatan jasa lingkungan dari hutan, seperti yang terdapat di KHDTK Aek Nauli.

Pendapat lainnya yang menarik dari pengunjung ke ANECC adalah hampir 50% dari mereka mengaku belum pernah melihat gajah secara langsung. Hal ini yang mengakibatkan mereka secara antusias berkunjung ke ANECC. Keberadaan gajah jinak bagi masyarakat di sekitar Kabupaten Simalungun dan Pematangsiantar tentunya merupakan hal yang baru di sekitar tempat tinggalnya.

Lokasi wisata gajah yang ada di Tangkahan tentunya sangat sulit dikunjungi terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa secara kompetitif, pengembangan ekowisata satwaliar di sekitar Danau Toba tentunya memiliki potensi yang tinggi. Keberadaan KHDTK Aek Nauli yang berada di jalan lintas Propinsi menuju Danau Toba tentunya memberikan kemudahan secara aksesibilitas pada pengunjung.

Pendapat pengunjung sekitar 80% menyatakan bahwa kesan yang mereka peroleh setelah berkunjung ke ANECC adalah fasilitas

yang memadai, tidak dipungut biaya dan keberadaan gajah yang sehat dan pintar. Menurut Daim (2002), gajah dikenal memiliki kemampuan dalam melakukan gerakan-gerakan tertentu yang pada masa lampau sering dimanfaatkan sebagai penghibur dalam sirkus keliling. Gajah merupakan satwa yang cerdas dan bisa dilatih untuk pertunjukan wisata. Walaupun demikian, beberapa pengunjung berpendapat juga bahwa fasilitas wisata masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali, seperti sarana menuju lokasi atraksi yang sedikit jauh dari lokasi parkir kendaraan.

Pengetahuan pengunjung yang cukup menarik adalah yang menyatakan bahwa program konservasi gajah penting untuk dilakukan. Sebagian besar pengunjung sudah mengetahui bahwa gajah merupakan binatang yang dilindungi oleh pemerintah. Hasil wawancara menyebutkan bahwa pengetahuan itu mereka peroleh dari berbagai tayangan di media televisi maupun sosialisasi dari pemerintah. Mereka mengetahui bahwa populasi gajah tinggal sedikit akibat semakin berkurang habitatnya dan perburuan untuk mengambil gadingnya. WWF Indonesia (2018) menyatakan bahwa menurut Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), populasi gajah per 2016 diperkirakan sekitar 1.700 ekor dan lebih dari 700 gajah mati dalam 10 tahun terakhir.

Pengelolaan gajah jinak di ANECC saat ini diarahkan untuk dapat melayani keingintahuan dari masyarakat pengunjung tentang gajah sekaligus sebagai duta bagi gajah Sumatera Utara di alam. Interaksi antara mahout dan gajah dibatasi dalam bentuk perilaku tertentu dan kemampuan gajah diarahkan untuk memosisikan dirinya bagi kebutuhan pemeriksaan kesehatannya dan edukasi bagi pengunjung (Kuswanda *et al.*, 2018).

Hal ini untuk menjaga kesan positif pengunjung terhadap kondisi gajah yang ada di KHDTK Aek Nauli dengan tujuan utama untuk pengembangan konservasi secara eks situ. Pertunjukan yang dapat dinikmati pengunjung lebih menekankan kepada bentuk dan keunikan dari anatomi gajah dan fungsinya secara fisiologi dan tingkah laku alaminya.

Responden penelitian setuju dengan upaya konservasi gajah di KHDTK Aek Nauli. Hasil ini kedepannya akan menjadi model dalam peningkatan peran serta masyarakat dan generasi muda untuk terlibat dalam pengelolaan gajah. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman informasi terhadap gajah juga telah dibangun juga papan informasi dan papan interpretasi yang dipasang disepanjang jalan menuju lokasi atraksi gajah. Fasilitas interpretasi ini merupakan media

untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan edukasi tentang gajah dan hiburan kepada pengunjung.

Persepsi Pengunjung terhadap Pengelolaan ANECC. Hasil analisis persepsi pengunjung berdasarkan 75 responden yang berkunjung ke KHDTK Aek Nauli pada Bulan Agustus sampai September disajikan pada Tabel 2. Pengunjung yang memberikan penilaian persepsi terhadap keberadaan wisata ilmiah gajah berasal dari berbagai propinsi. Sekitar 89,33% berasal dari Sumatera Utara dan sisanya berasal dari luar provinsi, seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi bahkan dari Jakarta. Menurut asal kota, sebagian besar pengunjung berasal dari Kota Pematang Siantar (48%) dan dari kota lain seperti Medan, Tebing Tinggi, Asahan, dan Langkat. Beragam asal propinsi dan kota yang mengunjungi ANECC menunjukkan bahwa kawasan wisata ilmiah gajah ini sudah dikenal masyarakat luas.

Berdasarkan persepsi pengunjung, keberadaan wisata gajah di ANECC saat ini cukup memberi kesan positif bagi para pengunjung. Mereka memberi persepsi yang baik (65,33%) dan sangat baik (20%). Hal ini berarti 85% pengunjung memberi kesan positif terhadap wisata ilmiah gajah. Persepsi yang baik ini tentunya didukung oleh pelayanan, penyajian atraksi gajah dan fasilitas yang cukup memadai yang terdapat di area ANECC. Dari sebagian responden yang memberikan persepsi yang baik ternyata sebanyak 65,33% telah merencanakan wisata ke ANECC dan sisanya kunjungan yang tidak direncanakan (34,67%).

Pengunjung yang tidak direncanakan (kebetulan) adalah kunjungan yang bersifat spontan karena melihat objek wisata pada saat melintasi menuju Parapat atau sebaliknya kearah Medan. Aksesibilitas yang mudah menuju ANECC merupakan satu keuntungan bagi pengelola untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan. Oleh karena itu perlu adanya kesiapan dari pihak pengelola dalam menyediakan saran penunjangnya seperti lahan parkir dan *rest area* dalam mengantisipasi melonjaknya pengunjung terutama pada saat musim liburan.

ANECC di KHDTK Aek Nauli pertama dikenalkan kepada masyarakat tahun 2017, salah satu atraksi unggulan yang khas adalah keberadaan gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Berbagai fasilitas tentunya sudah dibangun uuntuk memberikan kenyamanan selama pengunjung berada pada kawasan wisata ilmiah di ANECC. Pembangunan fasilitas tersebut selama ini masih menggunakan dana pemerintah melalui Balai Besar KSDAE Sumatera Utara dan untuk program penelitian dan pengembangannya melalui Balai Litbang LHK Aek Nauli, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kuswanda *et al*, 2018).

Selain berkunjung ke ANECC, bagi wisatawan yang datang ke KHDTK Aek Nauli dapat juga menikmati beragam atraksi wisata alami lainnya. Lokasi lain yang dapat dikunjungi adalah lokasi air terjun, Taman Primata Sibaganting, Wisata Rusa, Wisata Lebah Madu dan lainnya, seperti pada Gambar 1. Selama di KHDTK Aek Nauli pengunjung dapat menikmati udara segar dan pemandangan hutan pinus dan hutan tropis yang masih baik.

Penyediaan fasilitas, Pengelola ANECC memerlukan biaya. Sumber pendanaan di objek wisata salah satunya diperoleh dari retribusi tiket masuk. Pertanyaan terkait kesediaan membayar pengunjung diajukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kelayakan retribusi seandainya hal ini diterapkan. Sampai dengan saat ini pengelola ANECC belum memberlakukan harga untuk tiket masuk ke lokasi ini. Pengelola hanya menyediakan kotak donasi, seandainya pengunjung mau berkontribusi dalam upaya pelestarian gajah.

Kebutuhan dana masih menggunakan pola kemitraan dimana para pihak yang terlibat BBKSDA Sumut, BP2LHK Aek Nauli dan Vesswic berkontribusi sesuai dengan porsi masing-masing. Kedepan tentu harus dipikirkan uapaya penggalana dana dari masyarakat agar operasional ANECC benar-benar tercukupi dengan baik. Salah satunya adalah pengelolaan dana dari pengunjung yang masuk melalui penetapan retribusi.

Tabel 2. Persepsi Pengunjung terhadap ANECC

No	Persepsi tentang wisata ilmiah gajah	Jumlah (responden)	Persentase (%)
1	Kurang	1	1,33
2	Cukup	10	13,33
3	Baik	49	65,33
4	Sangat Baik	15	20,00
	Jumlah	75	100,00

Hasil penelitian persepsi responden menunjukkan bahwa 76% responden bersedia membayar tiket masuk. Harga tiket masuk berturut-turut menurut 44% pada kisaran Rp 5.000,00 dan 24% pada harga Rp 10.000,00. Sisanya pengunjung bersedia membayar Rp 20.000,00 sampai Rp 25.000,00, meskipun persentasenya sangat kecil (2,67%). Besaran harga tiket masuk ini didasarkan dari pandangan dan kemungkinan kemampuan responden untuk membayar tiket masuk agar dapat menikmati wisata gajah di ANECC. Pendapat responden terhadap besaran harga tiket ini baru mencerminkan kesediaan membayar responden untuk memasuki kawasan ekowisata gajah.

Bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Utara dibagian Selatan, wisata gajah merupakan hal baru yang sebelumnya belum tersedia, termasuk di Taman hewan Pematangsiantar. Tentunya besaran tiket ini belum termasuk biaya apabila ingin menikmati atraksi lainnya bersama gajah, seperti pertunjukan di panggung pertunjukan edukasi gajah, memandikan gajah, berfoto dengan gajah ataupun nganong bersama gajah di dalam hutan yang kedepannya akan ditentukan oleh Pengelola ANECC.

Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam harus dilakukan di dalam dan luar kawasan hutan (Departemen Kehutanan, 1999). Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati beserta Ekosistemnya sebelumnya juga menyatakan bahwa upaya konservasi satwaliar yang dilindungi merupakan tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menjelaskan juga bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk : a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; b. Penangkaran; c. Perburuan; d. Perdagangan; e. Peragaan; f. Pertukaran; g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan h. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, untuk mengembangkan konservasi dan sekaligus ekowisata satwa langka seperti gajah dapat membentuk pusat latihan satwa khusus sebagai tempat melatih satwa agar menjadi terampil sehingga dapat dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan peragaan di dalam areal pusat latihan gajah, patroli pengamanan kawasan hutan, sumber satwa bagi lembaga konservasi lainnya

dan/atau membantu kegiatan kemanusiaan dan pendidikan.

Penetapan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Sekretariat Kabinet Nomor: B.652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 merupakan kebijakan yang penting untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Danau Toba.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengimplementasikan arahan tersebut adalah mengembangkan destinasi wisata alternative di sekitar Danau Toba. Hal ini karena untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Danau Toba perlu adanya penambahan objek wisata alternative yang menarik minat pengunjung ke Kawasan Danau Toba. Salah satu kawasan yang memiliki potensi tersebut adalah kawasan KHDTK Aek Nauli. Keberadaan KHDTK Aek Nauli yang berdekatan dengan Danau Toba dan keberagaman potensi yang ada memiliki peluang yang tinggi sebagai destinasi wisata di sekitar Danau Toba.

Kegiatan pengembangan kawasan ekowisata gajah di KHDTK Aek Nauli juga dapat mendukung sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian LHK dalam rangka melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Strategi 3) dan peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (Strategi 2) dan sekaligus dalam rangka mencapai target peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke kawasan konservasi. Pembangunan ANECC bertujuan untuk mengembangkan konservasi gajah secara eks-situ dan sekaligus dimanfaatkan sebagai lokasi ekowisata yang edukatif.

KESIMPULAN

Pengetahuan pengunjung tentang keberadaan ekowisata gajah di ANECC sangat bervariasi. Responden mengetahui ANECC sekitar 43,3% berasal dari temannya dan 28,1% media sosial, berkunjung ke ANECC sebanyak 67,6% responden akibat penasaran atau tertarik dengan adanya gajah, sekitar 80% responden menyatakan kesan yang baik setelah berkunjung ke ANECC, KHDTK Aek Nauli. Persepsi 85% responden adalah positif terhadap wisata ilmiah gajah. Persepsi yang

baik ini tentunya didukung oleh pelayanan, penyajian atraksi gajah yang sehat dan pintar dan fasilitas yang cukup memadai serta tidak dipungut tiket. Pengunjung bersedia membayar untuk menikmati ekowisata gajah antara RP. 5000-25.000 rupiah. Pengunjung sangat setuju gajah untuk dilindungi karena populasinya sangat sedikit dan pemanfaatannya dapat menjadi lokasi ekowisata seperti di ANECC.

REKOMENDASI

Upaya meningkatkan konservasi dan pengembangan ekowisata gajah di KHDTK Aek Nauli yang dapat dikembangkan oleh pengelola, adalah:

1. Pengelolaan wisata berbasis gajah harus mempertimbangkan moral dan etika ketika menggunakan gajah sebagai daya tarik pariwisata, walau itu untuk tujuan kenyamanan dan hiburan pengunjung. Pengelola harus memperhatikan *animal welfare* dan *one health* yang mengutamakan kesejahteraan dan kesehatan gajah ketika wisata gajah berlangsung. Pendekatan kebebasan untuk kesejahteraan seperti kebebasan dari kelaparan, bebas dari ketidaknyamanan, serta bebas dari sakit atau cedera pada gajah merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ANECC (Mahanani, 2012).
2. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak pengelola, yaitu Balai Besar KSDAE Sumatera Utara, Balai Litbang LHK Aek Nauli dan Vesswic. Pembentukan satu lembaga pengelola yang professional sangat penting untuk menjadi wadah dalam mengembangkan komunikasi antar pihak sehingga rencana pengembangan konservasi dan ekowisata gajah dapat dilakukan secara optimal. Komunikasi dan koordinasi merupakan unsur penunjang kerjasama tetapi merupakan salah satu kunci suksesnya suatu kerjasama (Rahajeng & Manaf, 2015). Wadah komunikasi dapat menjadi sarana pertemuan untuk memberi dan menerima informasi sehingga komunikasi antara pihak yang terjasama terjalin dengan baik.
3. Mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha di Provinsi Sumatera Utara, seperti travel wisata, perhotelan dan lainnya. Pelaku usaha perhotelan dan biro jasa wisata (travel) memiliki peluang yang sangat besar untuk membuka paket-paket wisata ke kawasan ekowisata gajah. Dalam kegiatan ini, para pelaku usaha juga sekaligus akan berperan dalam usaha promosi dan peningkatan kunjungan wisata

ke dalam kawasan melalui pengarahan kegiatan berwisata ke KHDTK Aek Nauli.

4. Penyusunan paket ekowisata yang terintegrasi dengan kunjungan ke Danau Toba. Pengembangan paket wisata akan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi wisatawan yang datang secara rombongan sebab semua komponen tour sudah termasuk dalam harga tour, dan harga tournya. Paket wisata juga dapat digunakan oleh wisatawan agar mereka puas dalam memilih objek wisata yang sudah disusun dalam bentuk paket yang terintegrasi di sekitar Danau Toba.
5. Meningkatkan promosi untuk mengenalkan paket-paket wisata berbasis gajah kepada wisatawan/pengunjung melalui *internet marketing*. Pengelola menyebarluaskan keberadaan ekowisata gajah melalui situs jejaring sosial, *website*, *blog*, *facebook*, dan situs lainnya dengan memasang foto-foto atraksi gajah, fasilitas dan kondisi alam kawasan wisata yang sekiranya dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Promosi lain yang penting adalah berpromosi dari mulut ke mulut. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya cara ini dapat menjaring pelanggan wisata jauh lebih banyak menikmati paket wisata berbasis gajah seperti hasil penelitian di atas. Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan wisata juga merupakan kunci terakhir yang harus dipegang untuk mencapai kesuksesan dalam industri pariwisata (Asteray, 2011).
6. Menjalin kerjasama dengan masyarakat lokal dalam peningkatan program pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk mengembangkan wisata berbasis ekologi (Kiss, 2004). Pelibatan masyarakat dalam ekowisata menciptakan tawaran kombinasi perlindungan ekologis dan budaya serta kesadaran lokal akan nilai melestarikan lingkungan alam dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, seperti penyediaan pakan gajah dan petugas wisata (Neil and Wearing, 2000; Edorgan, 2017).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (BKSDAE) Sumatera Utara, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL), Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli (BP2LHK Aek Nauli) dan Vesswic serta para inisiator pembangunan ANECC. Penulis juga berterimakasih kepada Kepala Balai, para peneliti, teknisi dan bakti

rimbawan BP2LHK Aek Nauli yang telah memfasilitasi dan membantu dalam pengumpulan data serta semua pihak yang telah bekerjasama sampai dipublikasikannya hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asteray, M. 2011. *Community Based Ecotourism (CBET) as a Tool for Biodiversity Conservation and Sustainable Development: A Case Study on the Simien Mountains National Park*. Thesis. Addis Ababa: College of Development Studies Tourism and Development Program, The School of Graduate Studies of Addis Ababa University.
- Blouch, R.A. dan Simbolon, K. 1985. *Elephants in Northern Sumatra*. Unpublished report. Bogor: IUCN/WWF Project 3033.
- Bluwstein, J. 2017. Creating ecotourism territories: Environmentalities in Tanzania's community-based conservation. *Geoforum*. 83: 101-113.
- Chesner, C. A. 1988. *The Toba Tuffs and Caldera Complex, Sumatra, Indonesia: Insights into Magma Bodies and Eruptions* (Disertasi Ph.D.). Houghton: Michigan Technological University.
- Daim, M.S. 2002. *The care and management of domesticated elephants in Malaysia*. Prodising pada conference dan workshop Domesticated Asian Elephant, Bangkok Thailand 5-10 February 2001.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan rencana aksi konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017*. Jakarta: Dirjen PHKA
- Edorgan, N. 2017. Critical views of mainstream approaches on ecotourism. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 5 (1): 20-31.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Kiss, A. 2004. Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds? *Trends in Ecology & Evolution*, 19(5), 232-237.
- Kuswanda W, Situmorang ROP, Berliani K, Barus SP, Silalahi J. 2018. *Konservasi dan Ekowisata Gajah: Sebuah Model dari KHDTK Aek Nauli*. Bogor: IPB Press.
- Kuswanda, W. 2012. Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Satwaliar pada Hutan Konservasi (Studi Kasus: Suaka Margasatwa Barumun, Sumatera Utara). *Prosiding Ekspose Hasil-hasil Penelitian "Peran Penelitian Kehutanan dalam Konservasi dan Rehabilitasi di Sumatera"*. Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam.
- Kuswanda, W. dan Pratiara. 2017. *Studi Kelayakan Pengelolaan KHDTK Aek Nauli Sebagai Sarana Litbang dan Wisata Ilmiah*. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pematangsiantar.
- Mahanani, A.I. 2012. *Strategi Konservasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Daya Dukung Habitat*. Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Tidak diterbitkan.
- Neil, J. dan S. Wearing. 2000. *Ecotourism : Impacts, Potentials, and Possibilities*. London: Butterworth Heinemann.
- Rahajeng, M.S., dan A. Manaf. 2015. Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 3 (2): 112-119.
- Robbins, S. P., dan T.A. Judge. 2008. *Perilaku organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitompul, A.F. 2011. Ecology and Conservation of Sumatran Elephants (*Elephas maximus sumatranus*) in Sumatra, Indonesia. *International Journal of Biodiversity and Conservation*, 5(2): 66-72.
- Sukumar, R. 2003. *The Living Elephants: Evolutionary ecology, behavior and conservation*. New York: Oxford University Press.
- Supangat, A. 2008. *Statistik dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Tipprasert, P. 2002. Elephant and ecotourism in Thailand. *Prodising pada Conference and Workshop of Domesticated Asian Elephant*. Bangkok Thailand 5-10 February 2001.
- Varma, S., Sujata, S. R., Sathyanarayana, M.C., Easwaran, E.K. Rajeev, T.S., Agarwal, M., Mohanraj, N., and Bhanage, N. 2009. *Captive Elephants of Temples of India: An Investigation into the Status, Management and Welfare Significance*. Compassion Unlimited Plus Action (CUPA)- Asian Nature Conservation Foundation (ANCF).
- WWF Indonesia. 2018. *Gajah Sumatera*. [Online] Dari: <https://www.wwf.or.id/program/spesies/gajah-sumatera/>. [Diakses: 12 Nopember 2018].

Hasil Penelitian

ANALISIS KELEMBAGAAN IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA

(INSTITUTIONAL ANALYSIS OF SOCIAL FORESTRY IMPLEMENTATION IN NORTH SUMATERA PROVINCE)

*Oding Affandi**, *Hariadi Kartodihardjo***, *Bramasto Nugroho****, *Sulistya Ekawati****

*Universitas Sumatera Utara
Jalan Tri Dharma Ujung No. 1 Kampus USU Medan
Email: oding@usu.ac.id

**Institut Pertanian Bogor

***Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Diterima: 10 Mei 2019; Direvisi: 05 Agustus 2019; Disetujui: 14 Agustus 2019

ABSTRAK

Tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial (PS) supaya masyarakat mempunyai hak dan akses legal untuk memanfaatkan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kelembagaan implementasi program PS di Provinsi Sumut; dan, 2) memberi masukan penguatan kelembagaan implementasi program PS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi program PS di Provinsi Sumut belum terlaksana dengan baik dan berkategori rendah. Analisis kelembagaan program PS menunjukkan hasil: a) masih lemahnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; b) program PS dengan skema perizinan tidak mengubah tipologi karakteristik sumberdaya hutan (SDH) dari common pool goods menjadi private goods; dan, c) banyaknya aktor yang terlibat serta adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan para aktor menjadikan perilaku aktor belum sepenuhnya mendukung program PS. Rekomendasi penguatan kinerja kelembagaan implementasi program PS, yaitu: a) pada tingkat nasional diterbitkan Inpres atau Kepres dan pada tingkat Provinsi Sumut diterbitkan peraturan gubernur tentang fasilitasi implementasi PS; b) melakukan peningkatan kualitas pendamping dan pelaksana program PS dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan izin skema PS; c) menyusun rencana aksi bersama dalam pelaksanaan program PS dan adanya pengintegrasian dalam program kerja para pihak; d) meningkatkan motivasi pelaksana PS maka diadakan Inovasi Perhutanan Sosial Award; dan, e) mengembangkan usaha PS sebagai industri atau jasa berbasis SDH dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Kata kunci: implementasi program PS, analisis kelembagaan; perhutanan sosial; Sumatera Utara

ABSTRACT

In 2016 the Government of Indonesia regulated a Policy of Social Forestry (SF) so the communities had legal rights and access for utilizing forests. This study aims to: 1) analyze the institutional implementation of SF programs in North Sumatera Province; and, 2) provide advice on institutional strengthening of SF program implementation. The results showed that the performance of SF program implementation in North Sumatera Province has not been realized properly and low categorized. Institutional analysis of the SF program shown: a) The central and local governments still low to provide policy support; b) The SF program with a licensing scheme does not change typology of characteristics of forest resources from common pool goods to private goods; and, c) The many actors involved and the different interests and power of the actors make the behavior of the actors not yet fully support the SF program. To strengthen institutional performance of the SF programs implementation is recommended: a) At the national level, regulate a presidential instruction or a presidential decree and at the provincial level, regulate a governor's regulation concerning the facilitation of SF implementation; b) Improving quality of counterparts and SF program practitioners in the management and business of SF; c) The expert group developed an action plan for enhancing SF scheme implementation; d) To increase the motivation of SF actors,

the government organized a SF Innovation Award; and, e) Development of SF business as an forest-based industry or service by utilizing information technology.

Keywords: *implementation of the SF program; institutional analysis; social forestry; North Sumatra*

PENDAHULUAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) sedang gencar pada dua program kebijakan pengelolaan hutan, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Perhutanan Sosial (PS), yang diharapkan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pengelolaan hutan di tingkat tapak. KPH ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan perlunya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dan organisasi pengelolanya untuk mencapai kelestarian (Kartodihardjo dkk., 2011), sekaligus sebagai perbaikan kelembagaan dalam penegakan hak-hak negara (Nugroho, 2016).

Sedangkan PS merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Sejak tahun 1998, bersamaan dengan proses reformasi dan desentralisasi pemerintahan, program PS di Indonesia semakin berkembang bersamaan dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan (dari *timber based forest management* menjadi *community based forest management/CBFM*) yang bertujuan meningkatkan akses dan hak masyarakat pada hutan negara sekaligus merupakan implementasi dari slogan *pro-growth, pro-job, pro-poor*, dan *pro-environment* (Suharjito, dkk., 2000; Awang, 2003; Hakim, 2010; Darusman dkk., 2013).

Sejalan dengan itu program PS juga dijadikan Program Nasional dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui penetapan target seluas 12,7 juta hektar, sekaligus menjadi program prioritas nasional pada Kementerian LHK periode tahun 2015 – 2019 (Suharjito, 2018). Namun demikian, dari target luasan tersebut Kementerian LHK kemudian mengeluarkan angka 4,3 juta hektar areal PS sebagai target yang dikatakan realistis untuk dapat dicapai hingga tahun 2019.

Memperhatikan progres pencapaian target program PS pada tingkat nasional maupun tingkat lokal di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terlihat bahwa realisasi implementasi program PS masih banyak menghadapi hambatan dan berjalan lambat jika dibandingkan dengan yang

ditargetkan. Pada tingkat nasional, sampai April 2019, dari target 12,7 juta hektar baru terealisasi sekitar 2.645.680 hektar (sekitar 20,83%) lahan hutan yang diberikan ijin pengelolaannya kepada masyarakat dengan rincian: HD 1.323.474 hektar, HKm 653.815 hektar, HTR 336.751 hektar, HA 31.949 hektar, KK 273.061 hektar, dan Kemitraan PS di hutan jati 26.630 hektar (Kementerian LHK, 2019).

Sementara itu di tingkat Provinsi Sumut, berdasarkan analisis data sampai Januari 2019, dari target program PS seluas 550.887 hektar (sesuai Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) pada Lampiran Surat Keputusan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor: SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017), baru terealisasi seluas 61.961,95 Hektar (11,25%). Demikian halnya dari hasil penilaian umum terhadap “berjalannya ijin usaha PS” (yang dikembangkan Ditjen PSKL Kementerian LHK 2017) setelah izin keluar pada duapuluh satu contoh izin pemegang skema PS di Provinsi Sumut, menunjukkan bahwa skema HD dan skema HTR berkategori “Cukup Baik” sedangkan skema HKm dan skema KK berkategori “Baik”. Dari empat skema PS tersebut, belum ada satupun yang terkategori “Sangat Baik”.

Menurut Suharjito (2017a); Hardiyanto, dkk. (2018), beberapa hambatan pencapaian target PS antara lain: a) dukungan peraturan yang kurang memadai; b) rendahnya peran dan dukungan politik dan finansial dari pemerintah daerah; c) rendahnya kapasitas masyarakat; Usulan yang tidak disertai dengan peta dan daftar nama calon anggota kelompok; d) tumpang tindih dengan perizinan yang lain; e) lokasi usulan tidak masuk kawasan hutan; f) kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia yang mengurus perijinan PS; serta, g) belum optimalnya pendampingan/fasilitasi penerima izin PS.

Mengacu pada Nugroho (2013), dapat dinyatakan bahwa program PS yang belum terimplementasi dengan baik terjadi karena adanya kegagalan kelembagaannya (aturan main dan organisasi) dalam pengelolaan hutan. *Pertama*, kegagalan pada ketidaksempurnaan aturan main, di mana kebijakan dan peraturan tidak mampu menjawab persoalan, menimbulkan biaya tinggi, perilaku aktor tidak terkendali, *property right* tidak terdefinisi dengan baik, dan internalisasi eksternalitas tidak berjalan. *Kedua*, kegagalan pada lemahnya kapasitas organisasi dimana organisasi tidak

mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan.

Berdasarkan kondisi tersebut, agar program PS terimplementasi dengan baik atau terjadi perbaikan kinerja implementasi program PS, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas dan perubahan kelembagaan (*institutional change*) (Kartodihardjo, 2006; Wakjira dkk., 2013; Nugroho, 2016). Hal ini penting dilakukan karena program PS merupakan praktek pengelolaan hutan negara yang mempunyai karakteristik sebagai sumberdaya bersama (*common pool resources/CPRs*) yang menggabungkan dua hal yaitu: suatu jenis sumberdaya (hutan) dan suatu kelompok pemilik / pengelola (masyarakat / kelompok masyarakat).

Ostrom (1994), McKean (2000), dan Ostrom (2008), menyebutkan bahwa *CPRs* adalah sumberdaya alam (SDA) atau sumberdaya buatan manusia yang mempunyai sifat: terbatas, cepat rusak, diperebutkan banyak pihak dalam pemanfaatannya, cenderung mengalami kerusakan dari waktu ke waktu, rentan terhadap eksploitasi berlebihan sehingga akan mengancam kelestariannya, pemilik atau pengelola kawasan hutan tidak mampu melarang pihak lain untuk menikmati manfaatnya (*non-excludable*), dan pemanfaatan oleh seseorang akan mengurangi manfaat bagi orang lain (*subtractable*).

Selanjutnya Ostrom (1977) dalam Berge (2004), menyebutkan bahwa sifat ekskludabilitas dan subtraktabilitas akan menentukan karakteristik sumberdaya dari sudut pandang penyediaan dan konsumsinya. Sumberdaya yang memiliki sifat ekskludabel dan subtraktabel merupakan ciri sumberdaya pribadi (*private resources*). Sumberdaya yang ekskludabel dan non-subtraktabel memiliki ciri sebagai sumberdaya klub (*club resources*). Sumberdaya yang non-ekskludabel tapi subtraktabel disebut sumberdaya bersama (*common pool resources*). Sementara itu sumberdaya yang non-ekskludabel dan non-subtraktabel disebut sumberdaya public (*public resources*).

Program PS merupakan upaya pemberian akses secara legal kepada masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat (sebagai aktor) untuk memanfaatkan hutan negara atau hutan adat (baik pada hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi) yang diberikan dalam bentuk skema perizinan (HKm dan HTR), hak (HD dan HA), dan kemitraan (KK) selama 35 tahun dan dapat diperpanjang (kecuali HA sebagai hak menguasai atau memiliki) dengan menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri (Permen) LHK No. P.83/2016 (Firdaus, 2018). Permen ini dibuat untuk menata

hubungan antar aktor yang berisi larangan dan perintah suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan sebagai kinerja dari program PS (Nugroho, 2016).

Mengacu pada Permen LHK No. P.83/2016, aktor kunci dalam implementasi program PS adalah pemerintah, sedangkan aktor utamanya adalah pemegang izin skema PS. Dalam teori hubungan prinsipal dan agen atau teori keagenan (*agency theory*), maka pemerintah berposisi dan berperan sebagai *principle* (pemberi izin), sedangkan masyarakat setempat dan/atau masyarakat hukum adat berposisi sebagai *agent* (penerima izin) yang dalam hubungan keduanya diikat dengan kesepakatan atau kontrak. Dalam kontrak ini, *agent* memiliki kewajiban normative, hukum, atau moral untuk bekerja yang terbaik bagi *principle* (Quinn, 2013). Aktor-aktor ini mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang berbeda-beda dan akan berperilaku sesuai dengan kepentingan dan kekuasaannya (Reed *et al.*, 2009).

Penelitian ini menganalisis kelembagaan implementasi program PS yang dilakukan melalui pendekatan kerangka kerja "Struktur Kelembagaan (*institutions structure*) - Karakteristik Sumberdaya (*characteristic of resources*) - Perilaku Aktor (*actors behaviour*) - Kinerja (*performance*)" yang dikembangkan Nugroho (2016). Pendekatan ini menyebutkan bahwa tercapainya sebuah kinerja dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu: 1) struktur kelembagaan; 2) karakteristik sumberdaya; dan, 3) perilaku aktor. Struktur kelembagaan dan karakteristik sumberdaya akan saling mempengaruhi. Kedua komponen tersebut secara bersama-sama akan mempengaruhi aktor yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja kelembagaan.

Pada implementasi program PS terdapat subtansi dimana masyarakat/ kelompok masyarakat (aktor) sebagai subyek sekaligus penerima izin dalam mengelola hutan negara yang berkarakteristik *CPRs* (karakteristik sumberdaya) dilembagakan dalam sebuah peraturan yaitu Permen LHK No. P.83/2016 (struktur kelembagaan) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budayanya (kinerja) (Hardiyanto dkk., 2018).

Mengacu pada berbagai studi yang telah dilakukan, Ostrom (1990); McKean (1992); Schlager dan Ostrom (1992); Agrawal dan Ostrom (2001); Dietz *et al.* (2003), menunjukkan bahwa dalam rangka pengelolaan SDA yang bercirikan *CPRs* dan guna menghindari terjadinya *tragedy of the common* diperlukan keberadaan kelembagaan sebagai faktor yang sangat penting agar SDA tersebut tetap lestari.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk dilakukan kajian kelembagaan implementasi program PS guna mengukur tingkat keberhasilannya (kinerjanya) sehingga bisa diketahui kelemahan dalam implementasinya dan dapat dirumuskan perbaikan kelembagaan guna menunjang keberhasilan tujuan program PS. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kelembagaan implementasi program PS di Provinsi Sumut; dan, 2) Memberi masukan terkait penguatan kelembagaan implementasi program PS. Kajian ini bermanfaat dalam melakukan penilaian awal kinerja program PS terhadap pemegang izin serta menjadi bagian dari penyusunan *baseline* program PS yang dapat digunakan untuk menjangkau kebutuhan (*needs assessment*) penguatan kelembagaan implementasi program PS.

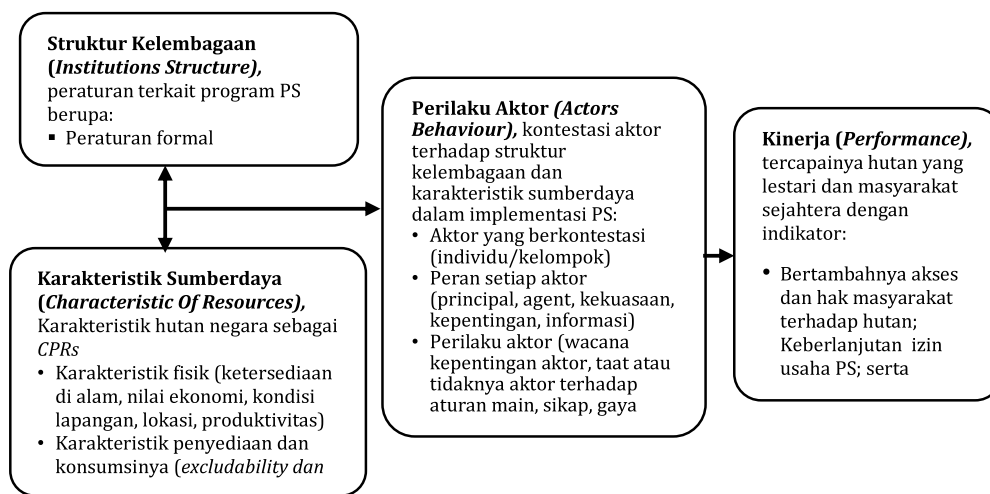
METODE

Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yaitu Propinsi Sumut, yang dilakukan pada bulan November dan Desember 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kelembagaan (*institutional*). Menurut Rhodes (1997) dalam Marsh & Stoker (2002), disebutkan bahwa pendekatan *institutional* adalah suatu obyek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintahan maupun organisasi informal beserta organisasi di luar negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif atau metodologi campuran. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dan analisis dokumen, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pendekatan metodologi campuran berupaya

mempertemukan dan menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian (Creswell, 2010).

Lokus penelitian adalah kelompok penerima izin skema PS sebanyak 21 contoh, dengan rincian: 4 pemegang izin skema HD, 9 pemegang izin skema HKm, 6 pemegang izin skema HTR, dan 2 pemegang izin skema KK. Penentuan jumlah sampel tersebut dilakukan secara proporsional berimbang dari 41 pemegang izin skema PS. Analisis deskriptif dan analisis isi dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memperoleh konteks dan penjelasan terkait dengan hasil analisis kelembagaan melalui pendekatan kerangka kerja yang dikembangkan Nugroho (2016) yaitu: Struktur Kelembagaan - Karakteristik Sumberdaya - Perilaku Aktor - Kinerja (Gambar 1).

Pendekatan analisis kelembagaan menyebutkan bahwa tercapainya sebuah kinerja (*performance*) dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu: 1) struktur kelembagaan; 2) karakteristik sumberdaya; dan, 3) perilaku aktor. Struktur kelembagaan dan karakteristik sumberdaya akan saling mempengaruhi. Kedua komponen tersebut secara bersama-sama akan mempengaruhi aktor yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja kelembagaan implementasi program PS. Struktur kelembagaan berupa kelembagaan formal (seperti undang-undang dan peraturan, aturan hak atas properti, serta kontrak) atau kelembagaan informal (seperti tabu-tabu, tradisi, *code of conduct*, norma dan kebiasaan) (North, 1990).



Gambar 1. Kerangka umum analisis kelembagaan Struktur Kelembagaan – Karakteristik Sumberdaya - Perilaku Aktor – Kinerja dalam implementasi program PS (Modifikasi dari Nugroho, 2016)

Karakteristik sumberdaya meliputi karakteristik fisik dan karakteristik penyediaan dan konsumsinya. Karakteristik fisik dari sumberdaya tersebut seperti ketersediaan sumberdaya di alam, ukuran dan nilai ekonomi SDA, kondisi fisik lapangan, maupun produktivitas sumberdaya. Adapun karakteristik penyediaan sumberdaya dan konsumsinya sangat terkait dengan sifat kemudahan untuk mengecualikan (atau mengeksklusi) aktor-aktor pengguna sumberdaya (ekskludibilitas) dan sifat kelangkaan dan persaingan dari sumberdaya tersebut (subtraktabilitas). Suatu sumberdaya dikatakan ekskludabel (excludable) apabila pihak-pihak yang tidak berhak mampu dikeluarkan dan segala biaya sepenuhnya dapat ditanggung oleh pengelola (Ostrom, 2008).

Sedangkan sumberdaya dikatakan subtraktabel (subtractable) apabila penggunaan oleh seseorang akan mengurangi kesempatan pihak lain untuk memanfaatkannya (Schmid, 2004). Perilaku aktor dimaknai sebagai respon atau reaksi aktor terhadap struktur kelembagaan yang melingkupinya dan karakteristik sumberdaya yang dimanfaatkannya.

Adapun aktor adalah individu atau kelompok yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan dan entitas yang memiliki kemampuan untuk menentukan aksi dari serangkaian alternatif kelembagaan yang tersedia. Aktor dapat meliputi sebuah negara, pemerintah dalam berbagai tingkatan, masyarakat terdampak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, korporasi pada berbagai skala, maupun individu pemanfaat sumberdaya.

Hasil interaksi dan aktivitas antar aktor pada struktur kelembagaan untuk karakteristik sumberdaya tertentu akan menghasilkan kinerja tertentu juga. Pada pengelolaan sumberdaya perhatian biasanya ditujukan pada kelestarian sediaan (*stock*) dan aliran (*flow*). Kelestarian sediaan terkait dengan karakteristik fisik sumberdaya dan aliran manfaat terkait dengan karakteristik penyediaan dan konsumsi sumberdaya tersebut (Nugroho, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Implementasi Program PS di Provinsi Sumut. Keberhasilan program PS sebagai praktek. *CBFM* pada hutan negara yang berciri *CPRs* akan terlaksana jika diperkuat oleh faktor kelembagaan yang meliputi: 1) kepastian kepemilikan lahan oleh masyarakat sehingga dapat merumuskan aturan-aturan dan membatasi pihak lain; 2) sejumlah aturan yang mudah dimengerti oleh masyarakat serta dapat ditegakkan di kalangan mereka dan berbagai lembaga masyarakat termasuk penerapan sanksi dan penyelesaian konflik; dan, 3) adanya mekanisme akuntabilitas (Ostrom, 1990; Dietz *et al.* 2003).

Berikut hasil analisis kelembagaan implementasi program PS di Provinsi Sumut melalui pendekatan kerangka kerja kelembagaan yang dikembangkan Nugroho (2016) menyebutkan bahwa sebuah kinerja dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu: struktur kelembagaan, karakteristik sumberdaya, dan perilaku aktor.

Struktur kelembagaan. Komponen struktur kelembagaan adalah keragaman aturan, baik formal maupun informal. Schmid (2004) sebagaimana dikutip Nugroho (2016) menyebutnya kelembagaan alternatif (*institutional alternatives*) yang mengatur saling keterkaitan (hubungan) antar aktor yang didasarkan pada karakteristik fisik sumberdaya. Pada saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan (aturan) yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan program PS, mulai dari undang-undang sampai peraturan gubernur.

Menurut Zakaria dkk. (2018), meskipun telah terbit berbagai kebijakan yang mengatur PS, namun masih terdapat beberapa ketidaksinkronan antar aturan tersebut yang berpotensi menghambat implementasi program PS. Adapun dalam implementasi program PS, aturan utama yang dijadikan dasar hukum adalah Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Berikut disajikan hasil analisis isi (*content analysis*) secara singkat dari lima peraturan dalam implementasi program PS di Provinsi Sumut (Tabel 1).

Tabel 1. Analisis isi peraturan terkait implementasi PS di Provinsi Sumut

No	Peraturan / Kebijakan	Isi Peraturan terkait Implementasi PS
1	UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Hutan Adat mensyaratkan adanya pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Perda yang membutuhkan proses politik yang panjang dan kompleks serta memerlukan biaya mahal¹. Contoh kasus Perda Kabupaten Humbang Hasundutan No. 3 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengakuan MHA Pandumaan-Sipituhuma baru disahkan tahun 2019 sejak diinisiasi tahun 2004.
2	UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemindahan kewenangan pengelolaan hutan dari kabupaten ke provinsi menyebabkan pemda kabupaten tidak menyusun rencana (program) kerja dan pengalokasian anggaran untuk urusan kehutanan termasuk memfasilitasi usulan PS secara langsung². • Sektor kehutanan merupakan Urusan Konkuren Pilihan bagi pemerintah provinsi (Pasal 12 ayat (3)), namun di sisi lain sub urusan terkait pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (yang bisa dijalankan melalui program PS) menjadi kewenangan provinsi. • Dalam implementasi UU No. 23/2014, sampai saat ini Gubernur Sumut belum punya kewenangan dalam memberikan izin skema PS karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Fasilitas PS (sebagai syarat pendelegasian dari Menteri LHK sesuai No. P.83/2016); Program PS juga belum menjadi Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Provinsi Sumut periode 2018-2023; Pada Pemda Provinsi Sumut terdapat keterbatasan baik SDM maupun anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
3	Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian izin skema PS bisa didelegasikan kepada gubernur namun perlu persyaratan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai program PS dan menyediakan anggaran yang dituangkan dalam Pergub untuk mengimplementasikannya. Akibatnya proses pengajuan skema PS masih melalui pusat (Menteri LHK) dan memakan waktu yang cukup lama; Persyaratan inilah yang dalam tindak lanjutnya memerlukan adanya pertimbangan dan strategi lebih lanjut agar pemberian skema PS dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Gubernur tanpa harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. • Berdasarkan pasal-pasal yang ada, banyaknya persyaratan permohonan izin yang harus dipenuhi menjadi kendala bagi masyarakat sebagai pemohon. Demikian halnya dengan kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang izin skema PS setelah izin keluar banyak yang belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, kedua kondisi tersebut terjadi karena kurangnya informasi, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan dari para pihak (pemda provinsi, KPH, BPSKL wilayah, LSM, perguruan tinggi, dan pihak lainnya).
4	SK Menteri LHK No. 3511 tahun 2018 tentang Peta Indikatif dan Areal PS (PIAPS) ³ (Revisi II)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penetapan PIAPS masih bersifat top down; Pada PIAPS, potensi PS seperti: wilayah hutan adat, Kemitraan PS di kawasan konservasi, dan Kemitraan PS pada 20% areal IUPHHK- HTI untuk tanaman kehidupan belum dipetakan.
5	SK Menteri LHK No. 4865 tahun 2017 tentang target PS di Provinsi Sumut seluas 550.887 Hektar	<ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk Provinsi Sumut: Tidak kuatnya landasan/dasar yang digunakan dalam penentuan luas kawasan hutan yang dialokasi untuk PS pada PIAPS; Masih terdapat areal indikatif untuk PS dimana masyarakatnya tidak tertarik untuk mengajukan izin skema PS; Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang tertarik mengajukan skema PS namun wilayahnya tidak masuk dalam PIAPS
6	SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/765/KPTS/2016 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumut	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pendampingan oleh Pokja PS saat pengajuan izin skema PS dan pasca izin keluar belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan SDM dan biaya operasional. Pokja PS juga belum banyak melibatkan KPH dalam proses pendampingan kepada para pemegang izin skema PS. • SK Gubernur ini juga belum didukung oleh Peraturan Gubernur (Provinsi Sumut) tentang Fasilitas PS. Oleh karenanya keberadaan SK Gubernur ini belum mampu mendorong percepatan pencapaian target PS maupun operasionalnya izin usaha PS. Di sisi lain program PS juga belum masuk sebagai Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Provinsi tahun 2018-2023 di Provinsi Sumut yang konsekuensinya tidak ada alokasi anggaran pada APBD Sumut untuk program PS.

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2019)

Mengacu pada Permen LHK No. P.83/2016, program PS merupakan skema izin dalam memanfaatkan hutan yang diberikan negara kepada masyarakat. Dalam aturan ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin skema PS, mulai dari Cara Permohonan Izin masing-masing skema PS (Bab II) sampai pada ketentuan Tata Cara Pemanfaatan Areal PS (Bab III), Jangka Waktu Dan Evaluasi (Bab IV), dan perihal Hak Dan Kewajiban (Bab V). Dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut mengindikasikan adanya hubungan kontraktual antara pemerintah (sebagai Prinsipal) dengan pemegang izin skema PS (sebagai Agen) yang akan mempengaruhi perilaku para aktor dalam mencapai tujuan proram PS (Nugroho 2016).

Konteks percepatan pencapaian target PS, Permen LHK No. P.83/2016 telah mempertimbangkan kecepatan proses dalam cara pemohonan izin secara sederhana dan waktunya lebih cepat bagi pemohon izin skema PS. Namun demikian, fasilitas ini belum bisa mendorong kelompok masyarakat atau desa untuk mengajukan permohonan izin skema PS karena kurangnya kemampuan dan kesiapan dari pemohon itu sendiri.

Menurut Purwanto dan Zakaria (2017), kendala ketidakmampuan dan ketidaksiapan itu disebabkan oleh: a) kurangnya sosialisasi kebijakan PS pada level masyarakat dan desa, sehingga inisiatif usulan dari masyarakat dan desa masih rendah; serta, b) kurangnya pendampingan dari para pihak (seperti yang diamanatkan dalam Permen LHK No. P.83/2016) kepada masyarakat dan desa tentang cara permohonan maupun rencana kelola hutan serta hal teknis lainnya.

Demikian juga setelah izin keluar, dalam tata laksana kegiatan izin usaha PS dinyatakan bahwa pemegang izin harus mematuhi semua kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHK No. P.83/2016. Terlebih lagi, skema PS yang berada di hutan lindung yang mensyaratkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan fungsi konservasi tanah dan air. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi atau pemegang izin melakukan pelanggaran maka akan

dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penetapan target PS secara nasional dengan luas 12,7 juta hektar yang dibagi menjadi target setiap provinsi dalam kurun waktu 2015-2019 sulit tercapai (Hardiyanto dkk. 2018; Wulandari dkk. 2016). Mengacu pada Tabel 1, sulitnya pencapaian target PS tersebut disebabkan belum sinkronnya beberapa peraturan terkait program PS. Sebagai contoh, dalam UU No. 23/2014 ditegaskan bahwa pemda provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sektor kehutanan. Namun demikian bagi pemda provinsi sektor kehutanan merupakan "Urusan Pemerintahan Pilihan" (Pasal 12 ayat (3)), yang kewenangannya bisa dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi (sebagai urusan konkuren).

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dari sini dapat diketahui bagaimana keberlanjutan implementasi pengurusan kehutanan (termasuk program PS) di daerah karena bukan merupakan urusan pemerintahan wajib. Terlebih untuk pemda yang hanya memiliki dana APBD minim.

Demikian halnya dengan Permen LHK P.83/2016, dari sisi hirarki perundangan Permen ini belum mampu menggerakkan keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Peraturan setingkat menteri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap kementerian lainnya serta hanya mengikat secara internal ke dalam lembaganya (bukan lintas sektoral). Akibatnya, Kementerian LHK tidak memiliki kewenangan memaksa pemda provinsi untuk mendukung program PS. Ditambah lagi penegasan dalam UU No. 23/2014 yang menyatakan bahwa urusan kehutanan merupakan urusan pemerintahan pilihan (Wulandari dkk. 2016).

Karakteristik sumberdaya. Areal hutan yang pemanfaatannya diberikan kepada pemegang izin skema PS merupakan sumberdaya yang dikuasai negara (*state property*) dengan karakteristik awal sebagai *CPRs*. Ostrom (2008), memberi batasan *CPRs* sebagai

sumberdaya yang sulit mengeklusi pihak lain, subtraktabel, berada pada hamparan yang luas, tersebar dan jauh dari jangkauan pengawasan, serta bernilai tinggi. Terdapat banyak kajian yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan atau yang lazim disebut *property rights* merupakan inti dari pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya (Ostrom 1990).

Sesuai Permen LHK No. P.83/2016, melalui izin skema PS, masyarakat (selaku pemegang izin) dapat memiliki akses legal untuk mengelola hutan dan lahan yang setara dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian. Dengan mengacu pada pendekatan tipologi dan kumpulan hak kepemilikan (*bundle of right*) dari Schlager dan Ostrom (1992), maka hak-hak yang dimiliki pemegang izin skema PS ini dapat diposisikan sebagai Pemilik Terikat (*proprietor*) yaitu pihak yang memiliki kumpulan hak berupa: hak akses (hak memasuki suatu wilayah sumber daya); hak pemanfaatan (hak melakukan kegiatan produksi atau memanfaatkan sumber daya; hak pengelolaan (hak untuk mengatur pemanfaatan dan mengubah bentuk sumberdaya menjadi produk tertentu); dan hak ekslusi (hak untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan akses), namun tidak memiliki hak pengalihan (hak menjual atau menyewakan salah satu atau lebih hak-hak sebelumnya).

Sementara itu, jika dilihat dari teori rezim hak atas kepemilikan (*property rights regimes*), program PS dengan aturan main yang ada pada Permen LHK No. P.83/2016 telah merubah tipe kepemilikan yang didefinisikan Hanna *et al.* (1996), yaitu dari kepemilikan negara (*state property*, yaitu ketika hak akses, pemanfaatan, pengelolaan, dan mentransfer hak dikendalikan oleh negara) menjadi tipe kepemilikan kolektif (*communal property*, yaitu ketika hak akses, pemanfaatan, dan pengelolaan menjadi hak bersama dari sebuah komunitas yang sudah terdefinisi secara jelas, misalnya anggota kelompok, koperasi atau organisasi tertentu serta dapat mengatur dan melarang pihak di luar anggota komunitasnya untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut) untuk skema HD, HKm, HTR, dan

Kemitraan; bahkan menjadi tipe kepemilikan pribadi (*private property*, yaitu ketika kondisi yang ada memberikan seseorang atau badan usaha suatu hak untuk membatasi atau melarang orang lain serta memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut) untuk skema HTR (pemegang izin skema HTR boleh perorangan).

Mengacu pada tipologi barang dan jasa menurut Ostrom (1977) dalam Berge (2004), dapat dikatakan bahwa program PS meskipun telah mampu mengubah kepemilikan dari *state property* menjadi *communal property* dan/atau *private property*, namun tetap tidak mengubah karakteristik SDH sebagai sumberdaya bersama (*CPRs*) yang bersifat non-ekskludabel tapi subtraktabel menjadi sumberdaya pribadi (*private resources*) yang bersifat ekskludabel dan subtraktabel.

Menurut Nugroho dan Soedomo (2016), walaupun ada perubahan, bahwa perubahan "kepemilikan" tersebut hanya menjadikan SDH sebagai "*quasi private goods*" atau semi milik pribadi dengan karakteristik tetap sebagai *CPRs*. Kondisi ini, menurut Nugroho (2016) sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pemindahan hak pada hubungan kontraktual antara pemerintah dan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam (IUPHHK-A).

Pemegang IUPHHK-A hanya memiliki sumberdaya aktual berupa kayu/tegakan yang diizinkan untuk ditebang sesuai Jatah Produksi Tahunan (JPT) yang ditetapkan dalam Rencana Karya Tahunan (RKT) yang disahkan oleh pemerintah, sementara areal/lahan dan SDH di luar blok RKT tahun berjalan merupakan sumberdaya potensial bagi pemegang izin dan akan menjadi aktual jika dan hanya jika terdapat jaminan perpanjangan masa konsesi secara kontinyu.

Pada kenyataannya banyak IUPHHK-A yang tidak diperpanjang, sebagai signal bahwa memperoleh perpanjangan izin bukanlah persoalan yang mudah. Situasi demikian menunjukkan bahwa karakteristik SDH dari sudut pandang pemegang IUPHHK-A hanyalah sumberdaya sewaan. Kejadian pada pemegang IUPHHK-A ini dipastikan akan terjadi juga pada pemegang izin skema PS.

Sesuai dengan Pasal 53 Permen LHK P.83/2016 yang menyebutkan bahwa, skema PS berlaku untuk jangka waktu 35 tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 tahun, dan tidak dapat diwariskan. Hasil evaluasi berkala 5 tahunan sebagai dasar perpanjangan izin skema PS. Dalam hal hasil evaluasi pemegang izin skema PS melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada kondisi tersebut, sesungguhnya belum ada jaminan program PS akan mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang diharapkan kecuali karakteristik SDH untuk program PS diubah menjadi karakteristik *private goods*.

Aktor dan perilakunya. Pada implementasi program PS di Provinsi Sumut setidaknya terdapat sekitar 12 (duabelas) aktor atau para pihak yang saling berinteraksi yaitu Kementerian LHK, BPSKL Wilayah Sumatera, Pemda Provinsi Sumut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, KPH, Pokja PS Sumut, Pemegang izin skema PS, LSM pendamping PS, Pemda kabupaten, Perguruan Tinggi, Masyarakat sekitar lokasi izin, dan Badan usaha. Sebagaimana sudah disebutkan, dari aktor tersebut yang menjadi aktor kunci dalam implementasi program PS adalah

pemerintah, sedangkan aktor utamanya adalah pemegang izin skema PS.

Masing-masing aktor mempunyai kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang berbeda-beda serta membentuk interaksi dan hubungan antar aktor dalam berbagai kegiatan yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi program PS. Reed *et al.* (2009), mendefinisikan kepentingan sebagai motivasi yang mendasari aktor melakukan tindakan. Adapun kekuasaan merupakan kemampuan aktor mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya. Pada Tabel 2 disajikan tentang kepentingan, peran, komitmen dan perilaku beberapa aktor dalam program PS di Provinsi Sumut.

Dari duabelas aktor tersebut, dengan mengacu pada perspektif teori hubungan prinsipal dan agen, maka Kementerian LHK berposisi sebagai prinsipal dan pemegang izin skema PS sebagai agen. Sebagaimana tertera dalam kontraktual Permen LHK No. P.83/2016, principal membuat aturan-aturan tentang pemanfaatan hutan dalam skema PS untuk dijadikan pedoman dan ditaati oleh agen. Dalam ketentuannya, agen dituntut agar mengelola SDH milik prinsipal sesuai dengan tujuan prinsipal.

Tabel 2. Kepentingan, peran, komitmen, dan perilaku aktor dalam program PS di Provinsi Sumut

No.	Aktor	Kepentingan dan Peran (Aktivitas)	Komitmen dan Perilaku Aktor
1	Kementerian LHK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepentingan: Terealisasinya target skema PS dan beroperasinya usaha pemegang izin skema PS ➢ Peran: Penetapan Areal Kerja (PAK) melalui pembuatan PIAPS; Penetapan keputusan pemegang izin (SK Menteri LHK) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen: PAK pada PIAPS bersifat top down sehingga kepastiannya kurang kuat (meskipun bisa direvisi setiap enam bulan); Struktur penetapan dan perizinan tidak efektif dan efisien (Masih oleh Menteri LHK); Belum memiliki strategi pendampingan yang komprehensif setelah izin keluar; <i>Baseline</i> data sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi fokus pemberdayaan masih lemah ➢ Perilaku: Membuat dan melaksanakan kebijakan atau peraturan tentang PS, salah satunya Permen LHK P.83/2016 dan peraturan turunan lainnya
2	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepentingan: Terealisasinya target skema PS dan beroperasinya usaha pemegang izin skema PS ➢ Peran: sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen: Wilayah areal kerja yang terlalu luas (meliputi Pulau Sumatera); Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun pendanaan ➢ Perilaku: Fasilitasi implementasi program PS sebagaimana tertuang dalam Permen LHK No. P.83/2016 yang dilakukan bersama dengan KPH dan Pokja PS Sumut .
3	Pemda Provinsi Sumut (Dinas Kehutanan)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepentingan: Terealisasinya target skema PS dan beroperasinya usaha pemegang izin skema PS 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen: Menganggap program PS sebagai program nasional sehingga dukungan fasilitasi masih lemah; Belum ada alokasi anggaran khusus di APBD; Terdapat

		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peran: Fasilitasi implementasi program PS di daerah 	<p>keterbatasan SDM, pengetahuan, dan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perilaku: Belum menyusun Perkada tentang Fasilitasi PS; Belum menjadikan program PS sebagai Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Provinsi Sumut
4	KPH	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepentingan: Terealisasinya target skema PS (terutama skema Kemitraan Kehutanan) dan beroperasinya usaha pemegang izin sehingga ada kontribusi pendapatan melalui bagi hasil kerja sama pemanfaatan dengan mitra, ➢ Peran: sebagai UPT Dinas Kehutanan; Fasilitasi implementasi PS di tingkat tapak 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen: Dukungan terhadap implementasi Program PS cukup baik terutama skema Kemitraan Kehutanan; Masih terdapat keterbatasan anggaran, SDM, pengetahuan, dan informasi. ➢ Perilaku: Bekerja sama dengan BPSKL dan pihak lainnya memfasilitasi implementasi program PS; Menjadikan program PS sebagai program Pemberdayaan Masyarakat pada RPHJP maupun RPHJPd KPH
5	Pemegang izin skema PS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepentingan: Akses terhadap hutan dan lahan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan ➢ Peran: Pemegang izin dan menjalankan izin usaha yang diperoleh 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen: Masyarakat menilai masih terlalu banyak persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam perizinan; Adanya keterbatasan akses informasi, pengetahuan, SDM dan pendanaan; Belum optimalnya pengembangan usaha perhutanan sosial setelah izin diterima; Kurangnya kesiapan kelompok masyarakat atau desa dalam implementasi program PS; Kurangnya sosialisasi dan pendampingan program PS oleh pemerintah, KPH, serta pihak lainnya ➢ Perilaku: Karena banyaknya persyaratan, keterbatasan pengetahuan, dan kurangnya pendampingan masyarakat lambat dan kurang merespon dalam mengajukan skema program PS; Setelah izin keluar, kelompok pemegang izin lambat dalam merealisasikan kewajiban-kewajiban karena keterbatasan SDM, dana dan pendampingan
6	LSM (Pendamping PS)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepentingan: Terealisasinya program kerja organisasi sesuai kesepakatan dengan donator dalam implementasi program PS ➢ Peran: Fasilitasi dan pendampingan pemegang izin skema PS (sebelum dan sesudah izin keluar) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen: Kegiatan fasilitasi tergantung fokus program dan pendanaan dari lembaga donor dan kemandirian LSM, sehingga kegiatan fasilitasi bersifat sementara; Persebaran LSM dalam fasilitasi yang tidak merata; Keterbatasan SDM dan pendanaan ➢ Perilaku: Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada pemegang izin skema PS sesuai dengan ketersediaan anggaran organisasi
7	Pemda Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepentingan: Akses terhadap hutan dan lahan bagi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan ➢ Peran: Fasilitasi pemegang izin skema PS lewat dana desa 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen: Dukungan lemah, karena bidang kehutanan bukan lagi menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemda Kabupaten, termasuk di dalamnya Program PS. ➢ Perilaku: Tidak membuat program dan menyediakan anggaran khusus pada APBD untuk implementasi program PS; Belum melakukan fasilitasi secara optimal dalam implementasi program PS sesuai UU No. 6/2014 tentang Desa.
8	Badan Usaha Milik Negara/Swasta	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepentingan: Terealisasinya program CSR perusahaan ➢ Peran: Fasilitasi dan pendampingan pemegang izin skema PS dalam menjalankan usahanya; Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi izin skema PS (Kasus Ekowisata Mangrove di Desa Lubuk Kertang) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen: Dukungan dalam kegiatan fasilitasi usaha pemegang izin PS cukup besar; Fasilitasi dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas SDM pemegang izin skema PS. ➢ Perilaku: Melakukan fasilitasi kegiatan dan pengelolaan skema PS kepada pemegang izin sesuai dengan program CSR perusahaan; Berkoordinasi dan kerja sama dengan KPH, LSM Pendamping, Perguruan Tinggi dalam kegiatan fasilitasi

Sumber: Hasil wawancara dan pengolahan data primer (2019)

Mengacu pada kerangka pendekatan Nugroho (2016), maka agen akan berperilaku dalam menjalankan izin usahanya sesuai dengan aturan main dan karakteristik sumberdaya yang dimanfaatkannya yaitu SDH sebagai CPRs. Konteks implementasi program PS di Provinsi Sumut, khususnya terkait dengan keterlibatan masyarakat sebagai pemegang izin skema PS, berdasarkan wawancara dengan Marpaung (2019), diketahui bahwa perilaku agen juga dipengaruhi oleh status areal kawasan hutan yang dicadangkan dalam PIAPS Provinsi Sumut.

Pada umumnya status areal kawasan hutan pada PIAPS Provinsi Sumut berupa lahan konflik yang terdiri dari dua tipe yaitu: 1) tipe lahan dikuasai masyarakat dan sudah ditanami kelapa sawit; dan, 2) tipe lahan yang diklaim sebagai lahan milik marga (tanah adat). Lahan-lahan dengan tipe dikuasai masyarakat dan ditanami kelapa sawit sebagian besar berada di wilayah Pantai Timur Sumut (di antaranya meliputi Kabupaten Sergei, Deli Serdang, Langkat, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batubara). Lahan ini diperoleh masyarakat melalui proses jual beli (kawasan hutan secara tidak legal) dan masyarakat "mengakuinya" sebagai lahan milik pribadi (*private property*).

Pada tipe lahan ini masyarakat kurang tertarik dengan program PS. Mereka menginginkan lahannya dipertahankan menjadi lahan milik agar bisa dipindahtanggankan dan tetap bisa ditanami kelapa sawit. Keinginan ini, tentu tidak bisa dipenuhi dalam program PS karena secara umum bertentangan dengan Pasal 56 yang menyebutkan bahwa skema PS bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan (Ayat 1), dilarang dipindahtanggankan (Ayat 2), dan dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau izinnya (Ayat 5).

Sementara itu pada lahan dengan tipe yang diklaim sebagai lahan marga sebagian besar berada di wilayah Pantai Barat Provinsi Sumut (di antaranya meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara). Lahan ini diklaim sebagai lahan adat yang diperoleh melalui warisan secara turun menurun dan ingin

dipertahankan sebagai milik marga berupa tanah adat (*communal proverty*).

Pada kasus dua tipe lahan tersebut, dalam upaya penyelesaian konflik terkait penguasaan tanah kawasan hutan (PTKH) perlu dilakukan upaya lebih mendalam (penelitian terpadu) guna mencari alternative lain yang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, misalnya melalui mekanisme Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Namun demikian, dengan mengacu pada Permen LHK No.17/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, penyelesaian melalui mekanisme TORA juga tidak mudah dilakukan ketika persyaratan dan ketentuan pada perundangan yang berlaku "tidak dapat dipenuhi".

Pada Pasal 3 Ayat (3) misalnya, disebutkan bahwa perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif dilakukan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut pada wilayah yang telah ditunjuk (huruf c) dan harus berada pada Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA (PIATORA) yang ditetapkan Menteri. Persyaratan ini sulit dipenuhi, ketika pada lahan yang dikuasai masyarakat dan sudah ditanami sawit diperoleh melalui jual beli (tidak legal) dan belum dikuasai lebih dari 20 tahun, terlebih areal tersebut berada pada PIAPS dan bukan berada pada PIATORA.

Demikian halnya pada lahan dengan tipe yang diklaim sebagai tanah adat, ketika MHA ingin mempertahankan sebagai hutan adat juga bukan perkara mudah dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum pada: (1) PermenLHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak dan (2) Perdirjen No. P.1/PSKL/SET/ KUM.1/2016 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

Panjangnya proses penetapan Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta menunjukkan bagaimana proses pengajuan hutan adat bukan sebuah perkara mudah. Diperlukan fasilitas semua pihak, khususnya kemauan politik dari pemda kabupaten setempat dengan

adanya pengesahan Perda tentang Pengakuan MHA.

Kinerja. Kinerja merupakan hasil interelasi sosial antar aktor pada struktur kelembagaan dan karakteristik sumberdaya tertentu (Nugroho 2016). Pada kajian ini, kinerja implementasi program PS di Provinsi Sumut difokuskan pada indikator: Bertambahnya luas akses dan hak masyarakat terhadap hutan, Berjalannya ijin usaha PS, dan Dampak program PS (UNDP Indonesia 2015; Ditjen PSKL Kementerian LHK 2017).

1. Akses dan hak masyarakat terhadap hutan. Pada tingkat Provinsi Sumut (sampai Januari 2019), hak dan akses masyarakat terhadap hutan melalui skema PS telah mencapai luasan sekitar 61.961,95 hektar (atau sekitar 11,25% dari target program PS seluas 550.887 hektar). Capaian luasan tersebut dikeluarkan dalam bentuk izin skema PS sebanyak 102 izin (terdiri dari: 13 izin skema HD, 47 izin skema HKm, 12 izin skema HTR, 29 izin skema Kemitraan Kehutanan, dan 1 izin skema Hutan Adat) dengan jumlah kepala keluarga yang terlibat sekitar 14.150 KK (Tabel 3).

Pada kinerja ini, terdapat sejarah baru yaitu disyahkannya Perda Kabupaten Humbang Hasundutan No. 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta pada tanggal 31 Januari 2019. Perda ini merupakan perda pertama pada level kabupaten di Provinsi Sumut terkait pengakuan dan perlindungan MHA dan berhak memiliki HA seluas 5.172 hektar. Keberadaan Perda ini menjadi sangat

penting bagi MHA Pandumaan-Sipituhuta karena merupakan salah satu prasyarat dalam mengajukan permohonan HA kepada Menteri LHK.

Meskipun capaian luasan hak dan akses masyarakat terhadap hutan dalam skema PS masih terkategori rendah (11,25%), namun dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri LHK tentang izin pengelolaan skema PS, kini masyarakat mempunyai legalitas hukum dalam penguasaan lahan dan adanya jaminan tenurial (*tenure security*) bagi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan *bundle of right* yang dimilikinya (Afif 2005).

Jayadinata (1996) dalam Affandi dan Harianja (2008) mengartikan *tenurial security* sebagai kepastian pengusahaan dan pemanfaatan tanah dan segala hasil olahan di atas tanah termasuk hutan. Melalui SK ini juga memperkuat adanya pengakuan (legitimasi) serta memperjelas batas dan klaim wilayah hutan bagi pemegang izin skema PS (Contreras-Hermosilla & Fay 2005).

2. Berjalannya izin usaha PS. Setelah izin skema PS keluar, secara ideal diharapkan para pemegang izin bisa segera menjalankan usaha skema PS yang diterimanya. Namun demikian kondisi ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil kajian terhadap tigabelas kriteria Berjalannya Izin Usaha PS pada masing-masing skema PS diketahui bahwa masih terdapat yang berkategori "Tidak Baik" dan "Cukup Baik" dalam menjalankan usahanya (Tabel 4).

Tabel 3. Rincian capaian luas skema PS Provinsi Sumut (sampai Januari 2019)

No	Skema PS	Luas tercapai tahun- (Hektar)					Total	Jumlah izin	Jumlah KK
		<2013	2014-2015	2016	2017	2018			
1	HD	320.00	0	0	3.541.00	516.00	4.377.00	13	2.706
2	HKm	137.00	610.00	0	5.690.00	25.352.00	31.789,00	47	6.502
3	HTR	11.810,61	3.434,00	0	215.00	0	15.459,61	12	2.569
4	KK	0	0	0	0	5.164,34	5.164,34	29	1.603
5	HA	0	0	0	0	5.172,00	5.172,00	1	770
Jumlah		12.267,61	4.044,00	0	9.446,00	36.204,34	61.961,95	102	14.150

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2019)

Tabel 4. Kategori hasil penilaian kriteria berjalannya izin usaha PS setelah izin keluar terhadap pemegang izin skema PS di Provinsi Sumut

Kriteria Penilaian	Hutan Desa				Hutan Kemasyarakatan			
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
1. Keberhasilan Perencanaan	2	1	1	-	6	1	2	-
2. Penataan Area Kelola	-	1	2	1	4	1	4	-
3. Mutu Zona Perlindungan	1	2	1	-	4	5	-	-
4. Pengembangan Usaha HHBK	-	1	3	-	-	2	5	2
5. Pengembangan Usaha HHK	-	-	4	-	-	-	5	4
6. Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan	-	1	3	-	1	1	2	5
7. Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kawasan	-	-	1	3	-	2	5	2
8. Perlindungan Hutan	-	-	3	1	-	5	1	3
9. Keberhasilan Tata Kelola Usaha	-	1	3	-	2	2	3	2
10. Keberhasilan Keorganisasian	-	3	1	-	4	2	3	-
11. Kewajiban Lain	1	-	1	2	3	-	1	5
12. Keberhasilan Skala Pemberdayaan Masyarakat	-	3	1	-	1	5	1	2
13. Kemantapan Kawasan Izin Skema PS	1	2	1	-	-	4	5	-
Jumlah	5	15	25	7	25	30	37	25

Kriteria Penilaian	Hutan Tanaman Rakyat				Kemitraan Kehutanan			
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
1. Keberhasilan Perencanaan	3	2	1	-	1	1	-	-
2. Penataan Area Kelola	3	1	2	-	1	-	1	-
3. Mutu Zona Perlindungan	2	2	2	-	1	1	-	-
4. Pengembangan Usaha HHBK	-	1	4	1	1	-	-	1
5. Pengembangan Usaha HHK	-	-	5	1	-	-	1	1
6. Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan	-	2	2	2	1	1	-	-
7. Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kawasan	-	-	3	3	-	1	1	-
8. Perlindungan Hutan	-	1	2	3	-	-	2	-
9. Keberhasilan Tata Kelola Usaha	-	3	2	1	1	1	-	-
10. Keberhasilan Keorganisasian	1	2	3	-	1	1	-	-
11. Kewajiban Lain	2	-	1	3	1	1	-	-
12. Keberhasilan Skala Pemberdayaan Masyarakat	-	1	4	1	1	1	-	-
13. Kemantapan Kawasan Izin Skema PS	3	2	1	-	-	1	1	-
Jumlah	14	17	32	15	9	9	6	2

Sumber: Pengolahan Data Primer (2019)

Keterangan : Nominal angka pada tabel menunjukkan jumlah contoh izin pemegang skema PS

Berdasarkan kategori pada kriteria penilaian seperti tertera pada Tabel 4, menunjukkan bahwa sesungguhnya masih terdapat pemegang izin skema PS yang belum menjalankan kewajiban-kewajibannya dan belum menjalankan usahanya setelah izin diperoleh. Dari hasil analisis dan wawancara secara mendalam, penyebab belum berjalannya izin usaha yang diperoleh antara lain: a) Surat Keputusan (SK) izin skema PS baru diperoleh (rata-rata tahun 2017) sehingga belum menjalankan semua indikator yang ada maupun kewajiban seperti tercantum dalam Permen LHK No. 83/2016; b) Kurangnya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah maupun pihak lainnya

dalam menjalankan izin usaha PS, dan (c) Adanya keterbatasan SDM dan biaya dalam menjalankan izin usaha PS.

Rendahnya capaian target luasan dan belum berjalannya usaha program PS di Provinsi Sumut, juga disebabkan karena adanya persoalan kelembagaan terutama belum adanya pelembagaan (peraturan) yang memadai seperti Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi dan Implementasi Program PS. Hal ini juga diperkuat dengan telaahan terhadap dokumen RPJMD Provinsi Sumut, dimana Program PS belum masuk sebagai Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Provinsi Sumut, baik Tahun 2013-2018 maupun Tahun 2018-2023, sehingga

belum ada alokasi anggaran khusus pada APBD untuk mendukung implementasi program PS.

Demikian halnya ketika surat izin sebagai pemegang skema PS sudah keluar, pemegang izin skema PS sebagai agen dalam menjalankan usahanya juga terikat dengan banyaknya ketentuan dan aturan yang terdapat pada Permen LHK No. P.83/2016. Di tengah keterbatasan SDM, dana, dan pendampingan pada akhirnya banyak pemegang izin yang belum menjalankan kewajibannya (perilaku) seperti: membuat tata batas areal kerja, menyusun rencana (pengelolaan hutan, kerja tahunan, dan kerja usaha) sehingga mengakibatkan tidak adanya kegiatan pemanfaatan hutan dan belum banyak berdampak pada perbaikan ekonomi, sosial, maupun lingkungan (kinerja).

3. Dampak program PS. Program PS sebagai salah satu inovasi kebijakan pengelolaan hutan diharapkan menghasilkan perubahan besar dalam pengelolaan hutan dan mempunyai dampak berupa manfaat ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Fajar dan Hardiyato 2015; Supriyanto, dkk. 2017; Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin 2018; Kuncoro, dkk. 2018). Dalam konteks yang lebih luas, jika inovasi program PS diimplementasikan secara efektif, maka akan menjamin kepastian dan keamanan hak tenurial masyarakat serta menjadi salah satu pendukung dalam perbaikan tata kelola hutan (Herawati, dkk. 2017).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, secara umum program PS di Provinsi Sumut berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak akses tersebut tidak serta merta dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi pemegang izin skema PS. Dari 21 contoh skema PS terdapat 13 skema PS (62%) yang belum menjalankan izin usahanya dengan baik sehingga pemegang izin skema PS belum merasakan manfaat program PS secara signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Sementara itu terdapat 8 skema PS (38%) yang sudah menjalankan izin usahanya sehingga program PS memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Salah satu

pemegang izin yang telah merasakan manfaat program PS tersebut yaitu Kelompok Mekar.

Kelompok Mekar sebagai salah satu pemegang izin PS skema Kemitraan Kehutanan (KK) berada di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Kelompok ini telah merasakan dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan dari program PS melalui pengembangan Ekowisata Mangrove Lubuk Kertang. Dari estimasi yang dilakukan, Kelompok Mekar memperoleh pendapatan sekitar Rp12-20 juta perbulan. Bahkan pada musim liburan seperti Hari Raya Idul Fitri, libur Natal dan tahun baru, serta libur sekolah pendapatan bisa meningkat sekitar Rp25-35 juta per musim liburan.

Selain bermanfaat secara ekonomi, program PS juga memberi dampak secara sosial yaitu berkontribusi dalam penanganan konflik tenurial yang mendorong lahirnya kesadaran bersama (*collective awareness*) sebagai faktor pemicu lahirnya aksi bersama (*collective action*) (Purwawangsa 2017). Pada kasus Kelompok Mekar di Desa Lubuk Kertang, aksi bersama diawali dengan perjuangan kelompok masyarakat nelayan yang melihat sabuk mangrove di sekitar desanya hancur karena perambahan sawit di Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.

Masyarakat mampu menyelesaikan konflik dengan perambah sawit ketika LBH Medan, WALHI Sumut, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumut bersatu dalam 'mengusir' perambah yang menanam sawit di areal mangrove pada tahun 2011. Selanjutnya masyarakat yang didampingi Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) dan mendapat dukungan dari dinas kehutanan kabupaten maupun provinsi melakukan penanaman kembali mangrove sehingga berfungsi kembali sebagai kawasan lindung (Batubara 2018).

Pada tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH Wilayah I Stabat, BPSKL Wilayah Sumatera, dan PT Pertamina EP Pangkalan Susu memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mendapatkan izin skema PS. Salah satu kelompok masyarakat tersebut yaitu Kelompok Mekar di Desa Lubuk Kertang yang telah

mendapat pengesahan berupa Surat Keputusan Menteri LHK No. SK. 161/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Hutan Mekar dengan KPH Wilayah I Stabat, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara seluas 60 Hektar, untuk jangka waktu 35 tahun.

Program PS selain berkontribusi dalam resolusi konflik, juga telah menurunkan kegiatan illegal dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Sejak keluar Permen LHK No. 83/2016 peningkatan luasan dan jumlah skema PS di Provinsi Sumut, yang dimulai tahun 2017 hingga tahun 2018, terus meningkat. Pada kondisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlah kasus kegiatan illegal pada kawasan hutan terus mengalami penurunan (Tahun 2015 ada 143 kasus; tahun 2016 ada 46 kasus; Tahun 2017 ada 77 kasus, dan Tahun 2018 ada 5 kasus).

Pemda Provinsi Sumut dalam pencegahan dan penangangan kegiatan illegal dilakukan melalui dua pendekatan yaitu penegakan (jalur) hukum dan pendekatan sosial dengan memberikan hak dan akses secara legal melalui skema PS. Adapun sebagai dampak lingkungan, program PS khususnya pada masyarakat di Desa Lubuk Kertang telah berhasil menjaga kelestarian mangrove dan berhasil menanam kembali ratusan hektar tanaman mangrove. Dengan keberhasilan ini maka hasil ikutan dari mangrove seperti ikan, kepiting, udang, dan hasil hutan bukan kayu lainnya mulai bisa diperoleh kembali dan diusahakan masyarakat. Adanya manfaat lingkungan ini juga mampu mengubah perilaku masyarakat untuk semakin bersemangat merehabilitasi dan mengusahakan areal izin yang diperoleh sesuai dengan aturan yang ada.

Adanya keberhasilan salah satu skema PS yaitu KK pada Kelompok Mekar tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kerja multi pihak (*collaborative governance*) antara Kelompok Mekar, KPH Wilayah I Stabat, Dinas Keutanan Provinsi, PT Pertamina EP Pangkalan Susu, Pendamping kelompok, Pemda Kabupaten Langkat, dan Perguruan Tinggi. Ansell dan

Gash (2007), mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-pemerintah di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi pada kesepakatan bersama dan proses musyawarah (konsultatif) yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur suatu program. Mengacu pada Wiratno (2017), kondisi ini menyerupai kondisi Ekowisata Kalibiru di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta yang dikelola oleh tujuh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tergabung dalam "Paguyuban Kelompok Tani Mandiri" yang mengelola lahan seluas 197 hektar (Hutan Lindung seluas 144 ha dan Hutan Produksi seluas 83 ha) dalam skema HKm.

Penguatan Kelembagaan Program

PS. Berdasarkan kondisi kelembagaan dan kinerja Program PS pada tingkat Provinsi Sumut, terlihat bahwa secara kelembagaan program PS belum terimplementasi dengan baik. Demikian juga dari sisi kinerja, program PS tidak serta merta memberikan manfaat bagi pemegang izin dikarenakan masih lemahnya kelembagaan implementasi program PS di tingkat Provinsi. Berdasarkan situasi tersebut, maka Pemda Provinsi Sumut perlu melakukan serangkaian penguatan kelembagaan sehingga kinerja program PS dapat dicapai dengan baik. Berikut beberapa penguatan kelembagaan yang bisa menjadi solusi alternative dalam implementasi program PS:

1. Penguatan kebijakan program

PS. Kebijakan terkait pendelegasian kewenangan Menteri LHK kepada Gubernur dalam hal pemberian izin skema PS sebagaimana tertuang dalam Permen LHK No. 83/2016 tidak banyak membantu dalam percepatan dan implementasi program PS di daerah. Kondisi ini terjadi karena dalam pendelegasian tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi pemda provinsi seperti: a) Pemda provinsi telah mempunyai RPJMD yang memuat program PS; b) ada pergub tentang Fasilitasi PS; dan, c) menyediakan anggaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Dana Bagi Hasil Sumberdaya

Kehutanan Reboisasi (DBH DR). Pada tingkat Provinsi Sumut, ketiga persyaratan tersebut belum ada yang dipenuhi sehingga Gubernur Sumut tidak bisa mengeluarkan surat keputusan tentang pemberian izin skema PS. Untuk mengurangi hambatan tersebut Pemerintah Pusat yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan pemanfaatan anggaran negara bisa langsung menjalankan program PS dengan mengacu pada UU No. 23/2014 Pasal 19 ayat (1) huruf a, bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat diselenggarakan sendiri.

Selanjutnya jika akan dilimpahkan ke pemerintah daerah, hendaknya mengacu pada kombinasi atas Pasal 19 dan Pasal 24 UU No. 23/2014. Dimana kewenangan PS tetap dipegang pemerintah pusat (Pasal 19 ayat 1 huruf a) dan disertai dengan langkah Kementerian (LHK) melakukan pemetaan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 24 ayat 4, yang berbunyi pemetaan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daerah yang mempunyai urusan pemerintahan pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

Oleh karena itu Kementerian LHK seharusnya terlebih dahulu mengidentifikasi pemerintahan daerah mana yang benar-benar sudah siap bisa menjalankan (diberi delegasi) program PS serta membangun dan memperjelas kebijakan tentang peta jalan (*road map*) implementasi program PS yang akan menjadi acuan pemerintah daerah (Kemitraan 2011; Wulandari, dkk. 2016).

Sejauh ini, komitmen dan dukungan politik anggaran dari Pemda Provinsi Sumut untuk program PS masih belum signifikan. Di daerah, program PS masih dipandang sebagai urusan kehutanan yang menjadi urusan (tanggung jawab) pemerintah pusat dan menjadi urusan pilihan bagi pemda. Karena pemahaman ini menyebabkan pemda belum memasukan program PS sebagai permasalahan dan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut.

Saat ini baru ada 12 provinsi yang mendukung program PS yaitu Aceh,

Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Papua, dan Papua Barat (Zakaria dkk. 2018). Dari beberapa lokasi kisah sukses pengelolaan HKm dan HD, seperti HKm Kalibiru di Kabupaten Kulon Progo dan HD di Kabupaten Bantaeng dan Sigi, diketahui bahwa kesuksesan itu tidak terlepas dari adanya komitmen kelompok masyarakatnya dan fasilitasi LSM yang mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga donor.

Selain itu adanya komitmen pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, yang dibuktikan dengan dukungan alokasi anggaran pada proses menyiapkan usulan sampai dengan pasca mendapatkan izin serta tidak memperlambat proses perijinan. Berkenaan dengan ini maka Pemda Provinsi Sumut harus segera melembagakan program PS dengan cara menyusun peraturan gubernur tentang fasilitasi dan dukungan anggaran untuk implementasi program PS serta menjadikan program PS sebagai permasalahan dan isu dalam RPJMD provinsi.

Terkait alokasi anggaran program PS, Haryanto dkk. (2017), menyebutkan bahwa proses menyiapkan usulan sampai mendapatkan penetapan areal kerja dan ijin usaha pemanfaatan skema PS membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hasil penelitian Indonesian Budget Center (IBC) menyebutkan bahwa anggaran ideal untuk pendampingan dan fasilitasi sampai mendapatkan ijin adalah Rp 327.000 per hektar. Biaya untuk mencapai target luasan program PS di Sumut seluas 550.887 hektar, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 180.140.049.000 (180 Milyar). Menurut Zakaria dkk. (2018), perlu adanya inovasi kebijakan yang mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merevisi ketentuan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang terakhir kali diubah menjadi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mencantumkan program PS ke dalam format Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa Permen LHK No. 83/2016 sudah mempertimbangkan kecepatan proses dan kewenangan yang jelas dalam penyelenggaraan PS. Namun permen

tersebut belum mampu menggerakkan keterlibatan lintas kementerian dan pemda. Selain itu, pendelegasian kewenangan Menteri LHK kepada gubernur sifatnya hanya sukarela, sehingga implementasinya bergantung dari *political will* pemda provinsi (Hardiyanto dkk. 2018).

Sehingga Kementerian LHK tidak memiliki kewenangan memaksa pemda untuk mendukung program PS. Oleh karenanya, supaya kebijakan program PS mampu menggerakkan lintas kementerian dan pemda, maka idealnya dibuatkan kebijakan yang lebih tinggi dari kebijakan peraturan menteri. Pilihan kebijakannya adalah Instruksi Presiden (Inpres) atau Keputusan Presiden (Kepres), atau paling tidak Surat Keputusan Bersama (SKB).

Program PS juga merupakan bagian dari pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pasal 78 ayat 1 UU No. 6/2014 tentang Desa).

Oleh karena itu pemerintah daerah dapat berperan dalam pengembangan program PS dengan membuat Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang diintegrasikan dengan program PS. Hal ini sesuai dengan Permen LHK No. 83/2016 Pasal 61 ayat 1-3 yang menjelaskan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan pemangku Hutan Adat. Dengan demikian, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menjadikan areal kerja PS sebagai basis lokasi pembangunan (Purwanto dan Zakaria 2017).

2. Penguatan kapasitas aktor penyelenggara program PS. Program PS tidak boleh hanya dipandang sebagai bentuk pengakuan dan legalitas atas akses kelola masyarakat terhadap hutan. Lebih jauh perlu adanya aspek pengembangan kapasitas penyelenggara program PS sebagai jaminan keberlanjutan pelaksanaan PS. Di tingkat pemerintah pusat maupun daerah terdapat kebutuhan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas

staf yang mengurus langsung proses perijinan PS maupun penyuluh kehutanan dan pendamping PS. Demikian halnya di tingkat pemegang izin sebagai pelaksana program PS.

Khusus di Provinsi Sumut, keberadaan BPSKL Wilayah Sumatera selaku UPT di bawah Ditjen PSKL Kementerian LHK dinilai kurang optimal perannya dalam implementasi program PS. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan jumlah SDM serta cakupan wilayah kerjanya yang terlalu luas yaitu meliputi pulau Sumatera. Di sisi lain BPSKL wilayah selain membantu proses percepatan PS juga membantu implementasi kegiatan direktorat lain, seperti Bina Usaha Perhutanan Sosial, Resolusi konflik, dan Kemitraan Lingkungan.

Kondisi ini seringkali menyulitkan ketika bekerja dalam proses percepatan PS yang berjalan secara *parallel* di semua provinsi (Hardiyanto dkk. 2018). Karenanya diperlukan penambahan UPT Ditjen PSKL di daerah sekaligus penambahan jumlah SDM yang berkualitas. Jika tidak memungkinkan ditambah maka direkomendasikan untuk penambahan tugas, pokok dan fungsi Ditjen lain (khususnya UPT Ditjen KSDAE dan Ditjen BPDAS HL) untuk dapat membantu dalam implementasi percepatan PS di daerah.

Demikian halnya dengan pokja PPS Provinsi Sumut peran dan kapasitas perlu ditingkatkan. Implementasi Pokja harus didukung oleh ketersediaan sumberdaya, baik pendanaan maupun manusia. Untuk lebih meningkatkan kinerja pokja sebaiknya ketua pokja PPS Provinsi Sumut tidak dirangkap jabatan dengan Kepala BPSKL Wilayah Sumatera.

KPH juga mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi program PS yang efektif dan efisien. Sinergi KPH, Dinas Kehutanan, Pokja PS, BPSKL Wilayah, dan pemda kabupaten merupakan jalan dalam merealisasikan pembangunan masyarakat desa sekitar hutan dan pemerintah hadir di tingkat tapak (Handoyo dan Kurniawan 2018). Peran KPH penting untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan program PS dengan ditunjukkan oleh ketepatan subyek (pelaku PS), obyek (kawasan hutan), dan keadilan antar pelaku.

KPH juga bisa melakukan pendampingan masyarakat untuk pengelolaan PS dan pengembangan bisnis PS yang berbasis hasil hutan termasuk jasa lingkungan (Zakaria, dkk. 2018). Untuk memperkuat peran itu maka KPH harus menjadikan program PS sebagai rencana kerja (kegiatan) yang dituangkan pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang maupun Jangka Pendek (RPHJP/RPHJPD) KPH.

Berdasarkan hasil beberapa kajian tentang pelaksanaan program PS, diketahui bahwa salah satu penyebab lambatnya realisasi program PS adalah rendahnya kapasitas pelaksana program PS, baik kelompok masyarakat pemegang izin maupun pendamping (Suharjito 2017b; Haryanto dkk. 2017; Purwanto dan Zakaria 2017; Hardiyanto dkk. 2018; Zakaria dkk. 2018).

Oleh karena itu penting dilakukan peningkatan kapasitas pelaksana program PS dengan fokus pada aspek: kelembagaan pengelolaan hutan lestari (sistem manajemen dan administrasi kehutanan), usaha PS atau bisnis berbasis masyarakat (melalui pembangunan BUMDes, Koperasi, atau bentuk-bentuk *community enterprise* lainnya), serta pengembangan investasi, produk dan pasar usaha PS.

Penguatan keberlanjutan program PS sebagai sebuah inovasi, adalah hal yang wajar jika aktor penyelenggara program PS mendapatkan imbalan (*reward*). Imbalan ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aktor penyelenggara PS dalam mewujudkan tujuan program PS. Lebih jauh Kim and Chang (2009); Asrori dan Kartika (2018) menyatakan bahwa, penghargaan inovasi yang diberikan kepada pemerintah daerah maupun para pengusul inisiatif inovasi daerah merupakan rangsangan agar pemerintah daerah semangat untuk mendampingi pelaksanaan inovasi daerah.

Oleh karena itu menjadi hal penting jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan "*Inovasi Perhutanan Sosial Award*" di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Hal ini bisa dilakukan sebagaimana pelaksanaan *Nirwasita Tantra Award* (penghargaan dari pemerintah terhadap Kepala Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota, yang dinilai memiliki kepemimpinan yang mampu merumuskan dan menerapkan

kebijakan dan program kerja berbasis pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya) oleh Kementerian LHK.

Kelancaran pelaksanaan *Inovasi Perhutanan Sosial Award* tersebut maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama atau pemerintah pusat secara mandiri membentuk Tim Khusus (atau bentuk lain yang sesuai) untuk menyusun Petunjuk Teknis Penilaian *Inovasi Perhutanan Sosial Award*. Dengan mengacu pada Asrori dan Kartika (2018), dalam penyusunan konsep juknis Penilaian *Inovasi Perhutanan Sosial Award* tersebut setidaknya mencakup tiga pokok yaitu: Penentuan Indikator, Proses Seleksi Peserta Inovasi Perhutanan Sosial Award, dan Metode Penetapan Pemenang atau cakupan lainnya sesuai dengan PP No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah.

3. Pengembangan usaha skema PS setelah izin keluar.

Setelah mendapatkan izin PS, sebagian besar pemegang izin skema PS di Provinsi Sumut cenderung kurang berkembang. Selain karena belum adanya pelembagaan tentang implementasi program PS, juga disebabkan kurangnya fasilitasi penguatan kapasitas dan usaha PS dari para pendamping maupun dari pemerintah. Oleh karena itu diperlukan proses fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha, peningkatan jejaring pasar dan akses modal, serta upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk dari hasil usaha PS.

Proses ini memerlukan partisipasi para pihak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pendamping atau organisasi pemerintah yang mengurus kehutanan. Menurut Zakaria (2018), bahwa keberhasilan pengembangan usaha pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti skema PS, sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah bersama para pihak lainnya dalam memenuhi apa yang disebut sebagai 4 (empat) syarat penting.

Empat syarat penting yang dapat juga disebut 4 pilar tersebut meliputi: serangkaian kegiatan pada ranah legalisasi asset dan/atau akses/*Legalisation* (Pilar 1); serangkaian kegiatan pada lahan di mana program PS itu berlangsung/*on farm* (Pilar 2); serangkaian kegiatan pengolahan hasil hutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi/*off farm* (Pilar 3);

dan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan akses pemasaran atas hasil usaha PS/*market* (Pilar 4).

Setelah memiliki legalitas akses dan hak pada kawasan hutan (Pilar 1), pemegang izin skema PS dituntut untuk melakukan optimalisasi pengelolaan hutan melalui pelestarian kawasan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Pilar 2). Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain: penyusunan rencana kerja pengelolaan, kegiatan rehabilitasi, pengembangan komoditas hasil hutan baik kayu maupun non kayu, pengembangan lahan PS melalui pola *agroforestry* atau wanatani, kegiatan pengamanan kawasan, dan penyusunan rencana kerja usaha (RKU) (Haryanto dkk. 2017; Affandi dkk. 2017).

Peningkatan nilai tambah pengelolaan kawasan pada Pilar 2, pemegang izin skema PS dapat melakukan pengembangan industri berbasis SDH dengan berbagai jenis komoditi hasil hutan seperti kayu, bukan kayu, jasa lingkungan (ekowisata, air bersih, mikro hidro), pertanian, maupun peternakan (Pilar 3). Pada pilar ini, para pemegang izin skema PS dapat membentuk organisasi Asosiasi Pemegang Izin PS (APIPS) dalam rangka mengembangkan, meningkatkan, dan melindungi usaha para anggota APIPS.

Pembentukan organisasi ini juga telah dilakukan oleh pengusaha hutan yang membentuk Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). APIPS sebagai perkumpulan dan mitra para pihak dapat berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengusahaan PS sehingga tercipta kegiatan usaha yang bertanggungjawab, akuntabel, transparan dan profesional.

Melalui koordinasi APIPS, para pemegang izin skema PS dapat melakukan berbagai macam kegiatan guna memperkuat kapasitas pemegang izin seperti: penyusunan RKU yang baik, peningkatan jiwa kewirusahaan sehingga pengusahaan komoditas izin usaha (HHK/HHBK/Jasa lingkungan) menjadi optimal, peningkatan penggunaan teknologi informasi pada semua proses kegiatan usaha, dan pengembangan industri berbasis SDH di bagian hilir.

Pengembangan industri di bagian hilir dapat dilakukan mulai dari pedesaan sehingga mampu meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menahan urbanisasi, dan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di pedesaan. Industri yang dikembangkan dapat dimulai dari pengolahan setengah jadi ataupun pengolahan lebih lanjut sampai barang siap pakai (*finished products*).

Oleh karena itu pengembangan PS tidak berhenti hanya pada pengelolaan hutan di tingkat tapak, tetapi perlu diintegrasikan dengan pengembangan industri dan jasa kehutanan di pedesaan. Dengan demikian diharapkan generasi muda (*milenial*) pedesaan akan lebih tertarik dan dapat berkiprah dalam bisnis industri berbasis SDH di pedesaan. Hubungan saling ketergantungan antara masyarakat pemegang izin skema PS dan masyarakat pelaku bisnis kehutanan akan mampu menjaga kelestarian hutan (Fahmi, dkk. 2018).

Jaminan dan akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan dari skema PS merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pengembangan usaha PS (Pilar 4). Dengan jaminan dan akses pasar yang lebih adil, maka diharapkan pemegang izin skema PS dapat memperoleh harga yang lebih baik bagi produk usaha PS, sehingga menjadi insentif atas upaya yang telah dilakukannya untuk memperoleh dan mempertahankan pengelolaan hutan lestari melalui skema PS. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat membuat serangkaian kebijakan terkait jaminan dan akses pasar hasil hutan dari skema PS.

Menurut Prijono (2017), secara kelembagaan, kemampuan manajerial setiap pemegang izin skema PS bervariasi. Itulah sebabnya diperlukan pendampingan dan pemantauan dari instansi kehutanan di tingkat tapak. Bentuk pendampingan pun berbeda-beda sesuai dengan level kapasitas kelompok, mulai dari fasilitasi pemasaran, akses kredit, membentuk koperasi, sampai membuka jaringan kemitraan. Setelah izin usaha Pengelolaan skema PS terbit, para pemegang izin menghadapi tantangan besar dalam mengelola usaha skema PS.

Dari sisi kelola usaha, pemegang izin skema PS sepantasnya membangun usaha bagi kemandirian bersama. Harapannya, manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat pemegang izin, tapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitar dan pembangunan wilayah. Kemandirian usaha pemegang izin skema PS sangat penting dibangun dalam menghadapi persaingan dengan pemburu rente dalam memperebutkan pasar komoditas PS.

Dalam perspektif wirausaha, maka pemegang izin skema PS dan anggotanya perlu memiliki jiwa wirausaha atau *entrepreneur* dan kemampuan manajerial yang memadai sehingga cakupan bisnis PS tidak terbatas di pasar lokal, tapi menjangkau pasar regional, nasional, bahkan internasional. Dengan kata lain, bahwa pengembangan kebijakan PS sebenarnya juga berarti pengembangan usaha.

Guna memperluas akses pasar produk usaha PS, pemegang izin usaha PS dapat memanfaatkan sarana teknologi dan informasi pada proses promosi dan pemasaran produk usaha PS. Dengan berkembangnya teknologi digital pada saat ini, pemasaran produk dapat dilakukan secara *online* melalui internet, terutama media sosial. Dengan mengacu pada Baqiroh (2019), pemegang izin PS dapat memanfaatkan APIPS sebagai etalase (untuk memajang produk) sekaligus untuk mejaring pasar serta menjadi penghubung antara kelompok usaha PS (KUPS) dan *off taker* yang tertarik dengan produk KUPS, di saat keberadaan *Pesona Mart* belum dapat mengcover baik segi promosi maupun peningkatan penjualan produk usaha PS.

Pada tingkat tapak, KPH selain berperan sebagai pendamping, juga dapat meningkatkan perannya dalam pengembangan model pengelolaan *social enterprise* berdasarkan karakteristik masyarakat lokal. KPH sebagai unit teknis dalam pengembangan skema PS harus segera memainkan peran strategi dalam menginisiasi pertumbuhan ekonomi dengan bisnis lokal sebagai penggerakannya. KPH bisa melakukan *linkages business* dengan pihak-pihak yang saling berkepentingan, utamanya mendorong *market system* dari kelompok usaha PS ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun industri.

KESIMPULAN

Kinerja implementasi program PS di Provinsi Sumut masih terkategori rendah dan belum berjalan dengan baik. Capaian luasan baru 61.961,95 hektar (sekitar 11,25% dari target program PS seluas 550.887 hektar). Setelah izin keluar, masih terdapat pemegang izin skema PS yang belum menjalankan kewajiban-kewajibannya dan belum menjalankan usahanya. Pemberian hak dan akses legal dalam skema PS tidak serta merta dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan ketika dukungan kelembagaan masih lemah.

Pada aspek regulasi di tingkat nasional, masih terdapat kebijakan terkait PS yang belum sinkron dan terintegrasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya sehingga berpotensi menghambat implementasi program PS. Pemen LHK No. P.83/2016 sebagai landasan utama dalam implementasi program PS belum bisa mendorong keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam pencapaian kinerja program PS. Di tingkat pemda, khususnya Provinsi Sumut, dukungan kebijakan implementasi program PS juga masih rendah sehingga menjadi salah satu faktor rendahnya kinerja program PS.

Program PS telah mengubah tipe penguasaan SDH dari penguasaan negara menjadi penguasaan kelompok bahkan individu secara legal. Meskipun telah terjadi perubahan tipe penguasaan SDH, program PS tidak mengubah karakteristik SDH sebagai CPRs menjadi *private resources*, kecuali pada hutan adat dengan status hutan hak pada MHA. Pada sisi aktor, terdapat beragam aktor yang terlibat dalam program PS. Namun karena adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan para aktor dalam program PS, serta belum adanya sinergitas antar aktor pada akhirnya menjadikan perilaku aktor belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi program PS.

Guna mencapai kinerja implementasi PS yang baik, maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui kegiatan seperti: dibuat kebijakan terkait PS yang mampu menggerakkan lintas kementerian dan pemda pada tingkat nasional; penyusunan regulasi tentang fasilitasi implementasi program PS oleh Pemda Provinsi Sumut; adanya peningkatan

kualitas SDM penerima izin skema PS dan para pendamping PS, adanya penyusunan rencana aksi bersama para pihak dan pengintegrasian program PS dalam dalam rencana kerja masing-masing pihak; adanya pendampingan kepada pemegang izin dan kebijakan jaminan pasar dalam menjalankan usaha PS.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dari penelitian dan analisis kelembagaan terhadap implementasi program PS, berikut beberapa rekomendasi dalam meningkatkan kinerja implementasi program PS di Provinsi Sumut:

1. Pada tingkat nasional segera dibuat regulasi setingkat Inpres atau Kepres tentang Perhutanan Sosial sehingga mampu mendorong peran lintas kementerian dan pemda. Pada tingkat daerah, Pemda Provinsi Sumut segera menerbitkan regulasi berupa peraturan gubernur tentang fasilitasi implementasi PS yang diikuti dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumut dengan menjadikan program PS sebagai permasalahan dan isu strategis dalam RPJMD Provinsi.
2. Dalam upaya meningkatkan motivasi dan kinerja aktor penyelenggara PS maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengadakan kegiatan Inovasi Perhutanan Sosial Award. Bersamaan dengan itu segera dilakukan pembentukan Tim Penilai dan penyusunan Juklak Inovasi Perhutanan Sosial Award.
3. Dalam rangka mengembangkan, meningkatkan, dan melindungi usaha para anggotanya, maka para pemegang izin skema PS dapat membentuk organisasi Asosiasi Pemegang Izin PS (APIPS). Dalam prosesnya segera dilakukan inisiasi oleh Kementerian LHK di tingkat pusat untuk ditindak lanjuti oleh BPSKL Wilayah, Pokja PPS, Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, dan KPH di tingkat daerah.
4. Guna menarik generasi muda (milenial) untuk berkiprah dalam bisnis berbasis SDH dalam skema PS, maka pemerintah pusat harus punya rancangan terkait pengintegrasian pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan pengembangan industri dan jasa yang berbasis SDH dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan digital.

5. Melakukan pemetaan peran para pihak secara lebih rinci guna meningkatkan peran para pihak dalam program PS. Selanjutnya pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan para pihak guna menyusun rencana aksi bersama para pihak dalam pelaksanaan program PS di Provinsi Sumut untuk 5-10 tahun ke depan.
6. Strategi rencana aksi yang disusun bisa meliputi: pendampingan pemegang izin skema PS pasca izin terbit; peningkatan dukungan skema anggaran baik dari pemerintah maupun pihak lainnya; memperkuat peran KPH; memperluas hak tenurial masyarakat; dan peningkatan usaha pemegang izin program PS; Melakukan peningkatan kualitas pendampingan dengan cara penambahan jumlah pendamping atau penyuluh program PS serta meningkatkan kemampuan para pelaksana program PS, terutama pemegang izin melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
7. Pendampingan dilakukan bersifat lintas-ruang dan lintas-waktu (terus-menerus) oleh instansi kehutanan di tingkat tapak dan pihak lainnya. Para pendamping berperan dalam komunikasi dan fasilitasi bagi pemegang izin skema PS sehingga tercipta sinergi dalam hal: memperkuat kelembagaan PS untuk mempraktikkan tata kelola hutan yang baik, meningkatkan kapasitas teknik kehutanan, dan membuka jejaring pemasaran.
8. Sesuai aturan yang berlaku pemerintah wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala pelaksanaan program PS. Kegiatan ini untuk memastikan pemegang izin melaksanakan tata kelola sesuai rencana pengelolaan skema PS. Tidak adanya monev akan menjadi preseden buruk di masa datang, dimana pemegang izin melakukan pelanggaran dalam menjalankan izin usaha pengelolaan sekema PS.

UCAPAN TERIMAKASIH

Apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Prof Hariadi Kartodihardjo, Prof

Bramasto Nugroho, dan Dr Sulistya Ekawati selaku Komisi Pembimbing Disertsi; BPSKL Wilayah Sumatera atas fasilitasi kegiatan penelitian ini; Rekan dan Tim peneliti lapangan dalam pengambilan data; Para Kelompok Pemegang Izin Skema PS yang telah bersedia dalam memberikan informasi yang diperlukan; Para Kepala KPH yang memberikan layanan dan fasilitasi selama di lapangan; serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, O dan Harianja, A. 2008. Sistem Tenurial Dan Pengelolaan Lahan Secara Kolaboratif. *Centre of Forest and Nature Conservation Research and Development (CFNCRD) and International Tropical Timber Organization (ITTO)*.

Affandi, O., Zaitunah, A., dan Batubara, B. 2017. Economic Potential And Development Prospect Of Non Timber Forest Product In Agroforestry Practice Around Tourism Park Of Sibolangit, North Sumatera Province. *Forest and Society*. Vol. 1(1):68-77, April 2017. Dari <http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.1096> [Diakses: 20 Juli 2017].

Afif, S. 2005. Tinjauan Atas Konsep Tenure Security dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-Kasus di Indonesia. *WACANA. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* 20(VI).

Agrawal, A and Ostrom, E. 2001. *Collective Action, Property Rights, and Decentralization in Resources Use in India and Nepal*. *Politic and Society* 34(1): 485-514

Ansell, C & Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Asrori dan Kartika, R.S. 2018. Penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2017. *Jurnal Politik dan Kebijakan Inovasi*, 15(2), 65-76, Oktober 2018. Dari: <https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.53> [Diakses: 12 Januari 2019].

Awang, S.A. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Center for Critical Social Studies (CCSS) dan Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Baqiroh, M.F.A. 2019. Pesona Mart Belum Mampu Genjot Pemasaran Produk Perhutanan Sosial. *Harian Bisnis Indonesia*, Edisi 2 April 2019. Dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190402/99/907108/pesona-mart-belum-mampu->

[genjot-pemasaran-produk-perhutanan-sosial](#) [Diakses: 3 April 2019].

Berge E. 2004. *Environmental Protection in the Theory of Commons*. Trondheim Norway: Departement of Sociology and Political Science, Norwegian University of Science and Technology

Contreras-Hermosilla A and Fay C. 2005. *'Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework for Action'*. *Forest Trends*.

Darusman, D., Hardjanto, Suharjo, D., Bahrani, Ichwandi, I., Hero, Y., Kartodihardjo, H., Sudaryanto, Nugroho, B., Nurrochmat, D.R., Sundawati, L., Purwawangsa, H., Trison, S., dan Soedomo, S. 2013. Membangkitkan Kehutanan Indonesia: Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi dalam Suharjo dan Putro (Editor). 2013. *Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru. Refleksi dan Inovasi Pemikiran*. Bogor: IPB Press.

Dietz, T., Ostrom, E., dan Stern, P.C. 2003. *The Struggle to Govern The Commons*. *Science* 302(5652): 1907-1912.

Ditjen PSKL Kementerian LHK. 2017. *Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fahmi, A.A., Susanti, A., Marhaento, H., Bakhtiar, I., Imron, M.A., dan Sanyoto, R. 2018. *Kehutanan Millenials. Tantangan Kehutanan Indonesia di Era 4.0*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.

Fajar, N.R., dan Hardiyanto, G. 2015. *Hutan untuk Kesejahteraan: Cerita dari Lapangan*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Fletcher, A., Guthrie, J., Steane P., Roos, G., dan Pike, S. 2003. Mapping Stakeholder Perceptions for A Third Sector Organization. *Journal of Intellectual Capital* 4(4) pp.505-527. Dari: <https://doi.org/10.1108/14691930310504536> [Diakses: 8 Maret 2016].

Hakim, I., Irawanti, S., Murniati, Sumarhani, Widiarti, A., Effendi, R., Muslich, M., & Rulliaty, S. 2010. *Sosial Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.

Handoyo dan Kurniawan, A.S. 2018. Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Desentralisasi Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15(1) hal: 87-112. Dari

doi:

<http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2018.15.1.87-112> [Diakses: 15 Pebruari 2019].

Hanna, SS., Folke, C., Mäler, C. (Eds.). 1996. *Rights to Nature. Ecological, Economic, Cultural and Political Principles of Institutions for the Environment*. California: Island Press, Washington, DC, Covelo.

Hardiyanto, G., Adnan H., dan Santosa, A. 2018. Percepatan Implementasi Program Perhutanan Sosial. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Policy Paper. Dari <https://fkkm.org/2018/09/27/policy-paper-percepatan-implementasi-program-perhutanan-sosial/> [Diakses: 13 Januari 2019].

Haryanto, Soedomo, S., Rinaldi, D., dan Yudiarti, D. 2017. Laporan *Innovative Financing for Social Forestry Development*. Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB dan UNDP

Herawati, T., Liswanti, N., Banjade, M.R., dan Mwangi, E. 2017. Merancang Masa Depan Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung: Dari Skenario Menuju Aksi. Info Brief CIFOR No. 183, Agustus 2017. Dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6558-infobrief.pdf [Diakses: 10 Mei 2018].

Kartodihardjo, H. 2006. Ekonomi dan Istitusi Pengelolaan Hutan. Telaah Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan. Bogor: Institute for Development Economics of Agriculture and Rural Areas (IDEALS).

Kartodihardjo H., Nugroho B., Putro H.R. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan FORCLIME – GLZ.

Kim, S.E. and Chang, G.W. 2009. *An Empirical Analysis of Innovativeness in Government: Findings and Implications*. International Review of Administrative Sciences 75(2) PP:293–310. Dari: <http://dx.doi.org/10.1177/0020852309104177> [Diakses: 13 Agustus 2017].

Kuncoro, M., Suyatna, H., Sadono, R., Susilo, S., Nairobi, Safei, R., Yulihar, A.R., Tyas, D.W., Lestari, L., Siswoko, B.D., dan Mulyana, L. 2018. Kajian Dampak Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

McKean, M.A. 1992. Success on The Commons: A Comparative Examination of Institutions for

Common Property Resources Management. *Journal of Theoretical Politics* 4(3) hal: 247-281

McKean M.A. 2000. *Common Property: What Is It, What Is It Good, and What Makes It Work? People and Forest: Communities, Institution and Governance*. Edited by Gibson C, McKean MA, Ostrom E, 27-55. Cambridge, Mass: MIT Press.

Nugroho, B. 2013. Reformasi Kelembagaan dan Tata Kepemerintahan: Faktor Pemungkin Menuju Tata Kelola Kehutanan Yang Baik dalam Kartodihardjo (Editor). 2013. Kembali Ke Jalan Lurus. Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. FORCI DEVELOPMENT dan Tanah Air Beta. Yogyakarta.

Nugroho, B. 2016. Kelembagaan, Karakteristik Sumberdaya, dan Perilaku Aktor: Analisis Kritis Kebijakan Pengelolaan Hutan Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor, 26 Nopember 2016

Ostrom, E. 1990. *Governing The Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press (http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf)

Ostrom E. 1994. *Neither Market nor State: Governance of Common-Pool Resources in The Twenty-First Century*. Indiana University.

Ostrom, E. 2008. *Institutions and The Environment*. Journal Compilation Institute of Economic Affairs. (september 2008): 24-31. Published by Blackwell Publishing, Oxford. (<http://beyondestrom.blog.rosalux.de/files/2013/10/Governance-Ostrom-Adaptive-MLG.pdf>)

Prijono, A. 2017. Berbagi Ruang Kelola: Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus – Lampung. *Tropical Forest Conservation Action Sumatera*. Jakarta

Purwanto, A.B. dan Zakaria, R.Y. 2017. Mempercepat Perhutanan Sosial, Peran Pemerintah Kabupaten dan Desa. Policy Brief. Konsorsium Satu Nama. Yogyakarta

Purwawangsa, H. 2017. Instrumen Kebijakan untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Hutan Konservasi. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. Vol. 4 No. 1, April 2017: 28-47 ISSN : 2355-6226 E-ISSN : 2477-0299. Dari: DOI:<http://dx.doi.org/10.20957/jkebijakan.v4i1.20059> [Diakses: 10 Desember 2018].

Quinn, J.J. 2013. Teori Prinsipal Agen dalam Ishiyama, J.T dan Breuning, M (Editor). 2013. Ilmu Politik Jilid 1. Dalam Paradigma Abad

Kedua Puluh Satu. Sebuah Referensi Panduan Praktis. Prenada Media Group. Jakarta

Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H., and Stringer, L.C. 2009. *Who's in And Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management*. Journal of Environmental Management 90(5):1933-1949 (<http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>)

Schlager, E. dan Ostrom, E. 1992. *Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis*. Land Economic, Vol. 68, No. 3. (Aug., 1992), pp. 249-262.

Schmid, A.A. 2004. *Conflict and Cooperation: Institutional and Behavioral Economic*. Oxford, U.K.: Blackwell Publishing.

Nugroho, B dan Soedomo, S. 2016. Panduan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Suharjito, D. dan Purwawangsa, H. 2014. Percepatan Devolusi Pengelolaan Hutan. Vol 1, No 1, April 2014: 12-17: ISSN : 2355-6226 E-ISSN : 2477-0299. Dari: <http://dx.doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i1.10273> [Diakses: 10 Desember 2018].

Suharjito, D. 2017a. Panel Satu Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial pada Konferensi Tenurial 2017. Jakarta, 25-27 Oktober 2017 dengan Tema "Mewujudkan Hak-hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan di Indonesia"

Suharjito, D. 2017b. KPH: Kebijakan, Implementasi dan Masa Depan. Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan *Multistakeholder Forestry Programme 3* (MFP3). Jakarta

Suharjito, D. 2018. Panduan Pendampingan Perhutanan Sosial. Jakarta: Kementerian LHK.

Supriyanto, A., Taufiqurahman, M., dan Priatna. 2017. Mencipta Inovasi. Inovasi untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: PT Temprint.

UNDP Indonesia. 2015. Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia 2014. UNDP Indonesia.

Wiratno. 2017. "Perebutan" Ruang Kelola: Refleksi Perjuangan dan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia. Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Ke-54 Pada Tanggal 16 November 2017 di Yogyakarta

Wulandari, C., Budiono, P., dan Nurrochmat, D.N. 2016. Kesiapan Daerah dalam Implementasikan Program Perhutanan Sosial Pasca Terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari: <http://dx.doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i2.15512> [Diakses: 15 Maret 2018].

Wakjira, D.T., Fischer, A., and Pinard, M.A. 2013. *Governance Change and Institutional Adaptation: A Case Study from Hareenna Forest, Ethiopia*. Environmental Management (2013) 51:912-925 (<http://dx.doi.org/10.1007/s00267-013-0017-9>) [Diakses: 13 Juni 2017].

Zakaria, R.Y. 2018. Pelembagaan Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Masa Depan di Indonesia. Bahan bacaan yang dipersiapkan untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, di Jakarta, tanggal 2 Juni 2018.

Zakaria, R.Y., Wiyono, E.B., Firdaus, A.Y., Suharjito, D., Muhsi, M.A., Suwito, Salam, R., Aprianto, T.C., dan Uliyah, L. 2018. Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program. Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial. Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Jakarta, Januari 2018

Pedoman Penulisan Naskah Ilmiah Jurnal INOVASI

Jurnal INOVASI memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik. Jurnal INOVASI terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal INOVASI Balitbang Provinsi Sumatera Utara, harus memenuhi ketentuan berikut :

1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
3. Komponen utama naskah setidaknya-tidaknya memuat hal-hal berikut:
 - a. **Judul**, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
 - b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, nama instansi, asal negara, alamat korespondensi dan e-mail.
 - c. **Abstrak** ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta kata kuncinya. Abstrak ditulis dalam 1 alinea berisi masalah, tujuan penelitian, hasil dan saran/usulan, dengan jumlah kata 200-300 kata.
 - d. **Pendahuluan**, tidak menggunakan subjudul, berisi penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, serta tujuan penelitian.
 - e. **Metode Penelitian** berisikan disain penelitian yang digunakan, populasi/sampel atau subjek/objek, sumber data, instrumen, analisis dan teknik analisis yang digunakan.
 - f. **Hasil dan Pembahasan**. Hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada ranah kebijakan untuk semua disiplin ilmu. Disajikan tanpa subjudul.
 - g. **Kesimpulan** menjawab tujuan penelitian tanpa melampauinya, disajikan dalam bentuk narasi.
 - h. **Rekomendasi** berupa alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk pointer, berisi bentuk dan telaahannya untuk dilaksanakan mengacu pada prinsip tepat-guna, logis dan relevan.

- i. **Ucapan terimakasih**. Memuat pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan penelitian.

4. Tabel, gambar dan grafik dapat terbaca dengan jelas dan hendaknya agar dilampirkan secara terpisah serta diberi penjelasan yang memadai.
5. Penulisan rujukan sesuai dengan model Harvard. Pada isi tulisan, nama penulis ditulis disertai dengan tahun penulisannya. Pada bagian Daftar Pustaka, penulisan diurut sesuai dengan abjad.
6. Referensi 50% hasil penelitian relevan terdahulu. Beberapa contoh bentuk referensi dalam jurnal ini adalah:

Buku

Abel, R. 2004. *Revolusi Kesehatan Mata: Pencegahan dan Pengembalian Masalah Penglihatan*. New York: Kensington Book

Chaniago, A. 2010. *Studi Pustaka dan Konseptualisasi Penelitian*. Dalam: Zaluchu, F. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Bandung: Citapustaka Media, hal 79-92.

Artikel dari Jurnal

Ang, L. dan Taylor, B. 2005. *Memajemen Keuntungan Konsumen Menggunakan Matriks Portofolio*. *Jurnal Pemasaran dan Manajemen Konsumen Strategik* 12 (5), hal 298-304

Bagian di dalam buku

Ballinger, A. dan Clark, M. 2001. *Nutrisi, Pengendalian Nafsu Makan dan Penyakit*. Dalam: Payne-James, J. dkk. editor. *Dukungan Artifisial bagi Praktik Klinik*. Edisi kedua. London: Greenwich Medical, hal 225-239

Koran

Benoit, B. 2007. *Peran G8 dalam Pemanasan Global*. *Harian Kompas* 29 Mei 2007, hal 9.

Laporan

Komisi Eropa. 2004. *Laporan Pendahuluan terhadap Implementasi dari Strategi Pemasaran Internal 2003-2006*. Luxemburg: Unit Publikasi Komisi Eropa.

Konferensi

Fiedelius, H.C. 2000. *Miopi dan Penurunan Visual: Aspek Global*. Dalam: Lin, L.L.K. dkk. editor. *Miopia Terbarukan II: Prosiding Konferensi Internasional ke-7*. Taipei, 17-20 Nopember 1998. Tokyo: Springer, hal 31-37.

Tesis

Garcia-Sierra, A. 2000. *Investigasi Penyebab Ca-Serviks pada Wanita Usia Subur di Perkotaan*. Tesis PhD, Universitas Indonesia.

Jurnal Artikel Elektronik

Merchant, A.T. 2009. *Diet dan Aktifitas Fisik pada Anak-Anak di Kawasan Kumuh Perkotaan: sebuah Studi Cross Sectional*. *Jurnal Nutrisi* [Online] Edisi 6. Dari: <http://www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-6.1.pdf> [Diakses: 10 Mei 2007].

Web Page

Thompson, B. 2006. Mengapa Balita Butuh ASI [Online]. Dari: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/459876> [Diakses: 10 Mei 2007].

Depkes RI. 2006. Panduan Imunisasi [Online]. Dari: http://www.depkes.go.id/bayi_panduan_imunisasi/2345 [Diakses: 19 Februari 2011].

7. Naskah dituliskan dengan menggunakan Times New Roman 12, maksimal 20 halaman A4 spasi ganda, ditulis dengan program komputer Microsoft Word.
8. Naskah yang masuk hendaknya diterima 2 (dua) bulan sebelum waktu penerbitan untuk *direview* oleh anggota dewan redaksi dan *reviewer* (mitra bestari) yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi.
9. Dewan Redaksi berhak menolak naskah ilmiah yang dianggap tidak layak muat di Jurnal Inovasi. Pengiriman naskah ke alamat redaksi melalui Open Journal System (OJS) pada laman: <http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>
10. Redaksi berhak menolak naskah yang isi dan formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan naskah di atas dan redaksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah tersebut.
11. Setiap penulis yang karya tulisnya telah diterbitkan, akan mendapat satu buah cetak lepas dan satu buah *full print*.
12. Setiap penulis menyetujui untuk mengalihkan hak ciptanya ke Jurnal Inovasi jika naskahnya diterima untuk diterbitkan.

Indeks Penulis

A

Affandi, Oding, "Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara", 16(2): 139-162

Aleksander, "Konstruksi Model Perilaku Pelayanan Kesehatan", 16(1): 21-36

Aulia, Dwira Nirfalini *lihat* Manurung, Hadasa

B

Bahri, Samsul *lihat* Manurung, Hadasa

Bangun, Rita Herawaty Br, "Potensi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Unggulan Dalam Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai", 16(2): 75-84

Budi T, Kristian, "Sektor Basis di Kabupaten Blitar, Jawa Timur: Analisis PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2010-2016", 16(2): 85-94

E

Ekawati, Sulistya, *lihat* Affandi, Oding

G

Gustiasari, Widia, *lihat* Sidabutar, Windo Harjoin

H

Hamsari, Hidayat, *lihat* Siagian, Dumora Jenny Margaretha Siagian

Hardiansyah, "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir", 16(1): 47-57

Hendrik, Herman, "Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", 16(1): 37-45

I

Intan, L. N., *lihat* Hardiansyah

K

Kartodihardjo, Hariadi, *lihat* Affandi, Oding

Kencana, Suri, "Studi Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek-Proyek Infrastruktur di Kota Binjai", 16(2): 105-114

Kuswanda, Wanda, "Pengetahuan, Persepsi dan Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Gajah di Kawasan Aek Nauli, Danau Toba", 16 (2): 129-137

L

Lutfi, A., *lihat* Hardiansyah

M

Mahulae, Porman Juanda Maspomari, "Deskripsi Permasalahan Upaya Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Danau Toba Sumatera Utara", 16(1): 11-20

Manurung, Hadasa, "Dampak Penataan rmukiman Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kawasan Bagan Deli Belawan", 16(1): 1-10

N

Nasution, Zulfi Prima Sani, "Studi Diagnostik Tingkat Penerapan Kultur Teknis Kelapa Sawit Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Sawit Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas Utara", 16(2): 95-103

Nugroho, Bramasto, *lihat* Affandi, Oding
Nurkhoiry, Ratnawati, *lihat* Nasution, Zulfi Prima Sani

R

Rahutomo, Suroso, *lihat* Nasution, Zulfi Prima Sani

S

Siagian, Dumora Jenny Margaretha Siagian, "Peranan Aktor Dalam Pengelolaan Bank Sampah Berkelanjutan di Kota Medan", 16(1): 59-73

Sidabutar, Windo Harjoin, "Analisis Hubungan Antara Tingkat Keterpaparan Media dengan Tingkat Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Sumatera Utara", 16(2): 115-127

Sitorus, Muhammad Ancha, *lihat* Sidabutar, Windo Harjoin

Syahrizal, *lihat* Kencana, Suri

T

Tarigan, Ahmad Perwira Mulia, *lihat* Kencana, Suri

W

Widianingsih, Ida, *lihat* Alessander

Z

Zuska, Fikarwin, *lihat* Siagian, Dumora Jenny Margaretha Siagian

DAFTAR ISI VOLUME 16

	<i>Halaman</i>
Dampak Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kawasan Bagan Deli Belawan (Hadasa Manurung, Dwira Nirfalini Aulia, Samsul Bahri)	1-10
Deskripsi Permasalahan Upaya Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Danau Toba Sumatera Utara (Porman Juanda Marpomari Mahulae)	11-20
Konstruksi Model Perilaku Pelayanan Kesehatan (Alexsander, Ida Widianingsih, Heru Nurasa, Widya Setiabudi Sumadinata)	21-36
Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Herman Hendrik)	37-45
Implementasi Kebijakan Publik Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir (Hardiansyah, L.N. Intan, A. Lutfi)	47-57
Peranan Aktor Dalam Pengelolaan Bank Sampah Berkelanjutan di Kota Medan (Dumora Jenny Margaretha Siagian, Hidayat Hamsari, Fikarwin Zuska)	59-73
Potensi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Unggulan Dalam Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai (Rita Herawaty Br Bangun)	75-84
Sektor Basis di Kabupaten Blitar, Jawa Timur: Analisis PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2010-2016 (Kristian Budi T.)	85-94
Studi Diagnostik Tingkat Penerapan Kultur Teknis Kelapa Sawit Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Sawit Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas Utara (Zulfi Prima Sani Nasution, Ratnawati Nurkhoiry, Suroso Rahutomo)	95-103
Studi Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek-Proyek Infrastruktur di Kota Binjai (Suri Kencana, Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Syahrizal)	105-114
Analisis Hubungan Antara Tingkat Keterpaparan Media dengan Tingkat Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Sumatera Utara (Windo Harjoin Sidabutar, Muhammad Ancha Sitorus, Widia Gustiasari)	115-127
Pengetahuan, Persepsi dan Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Gajah di Kawasan Aek Nauli, Danau Toba (Wanda Kuswanda)	129-137
Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara (Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sulistya Ekawati)	139-162

